

**KONFLIK NEGARA DENGAN WARGA NEGARA  
STUDI KASUS : PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA  
NUKLIR (PLTN) MURIA**



**TESIS**

Nama : SUARDI HERIK  
NPM : 0606023564

T  
-----  
24972

**Konsentrasi Kajian Statejik Pengembangan Kepemimpinan  
Program Kajian Ketahanan Nasional  
Program Pasca Sarjana  
Universitas Indonesia**

Jakarta  
2008

**PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS INDONESIA**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KONFLIK NEGARA DENGAN WARGA NEGARA  
STUDI KASUS : PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA  
NUKLIR (PLTN) MURIA**

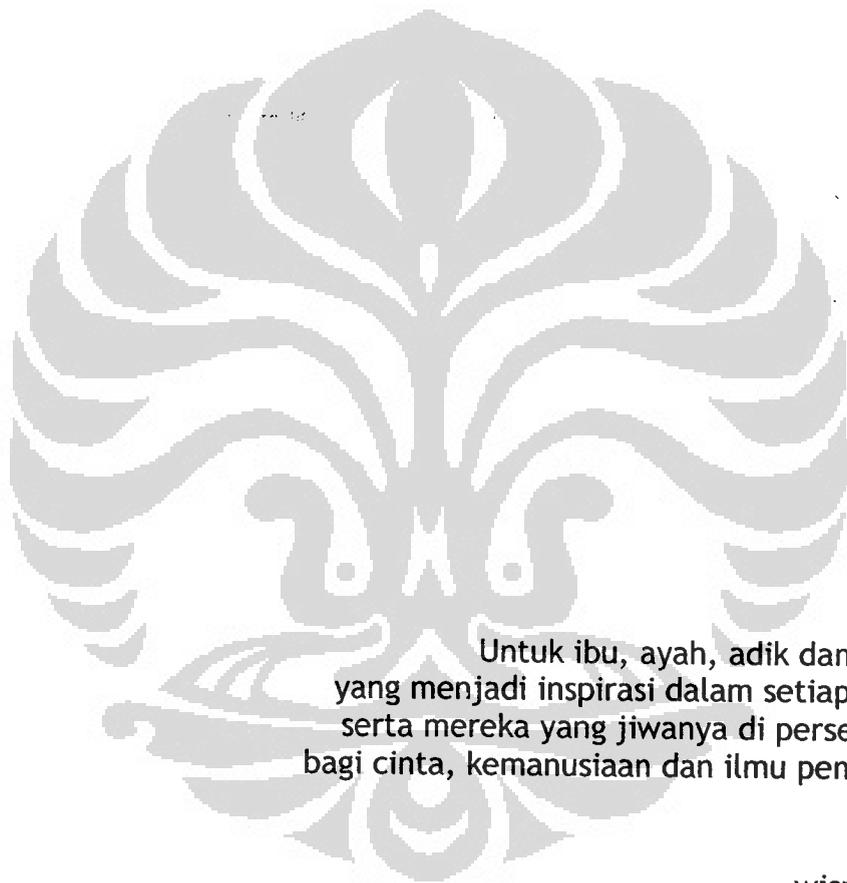
**TESIS**

**Diajukan sebagai salah-satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains**

**Nama : SUARDI HERIK  
NPM : 0606023568**

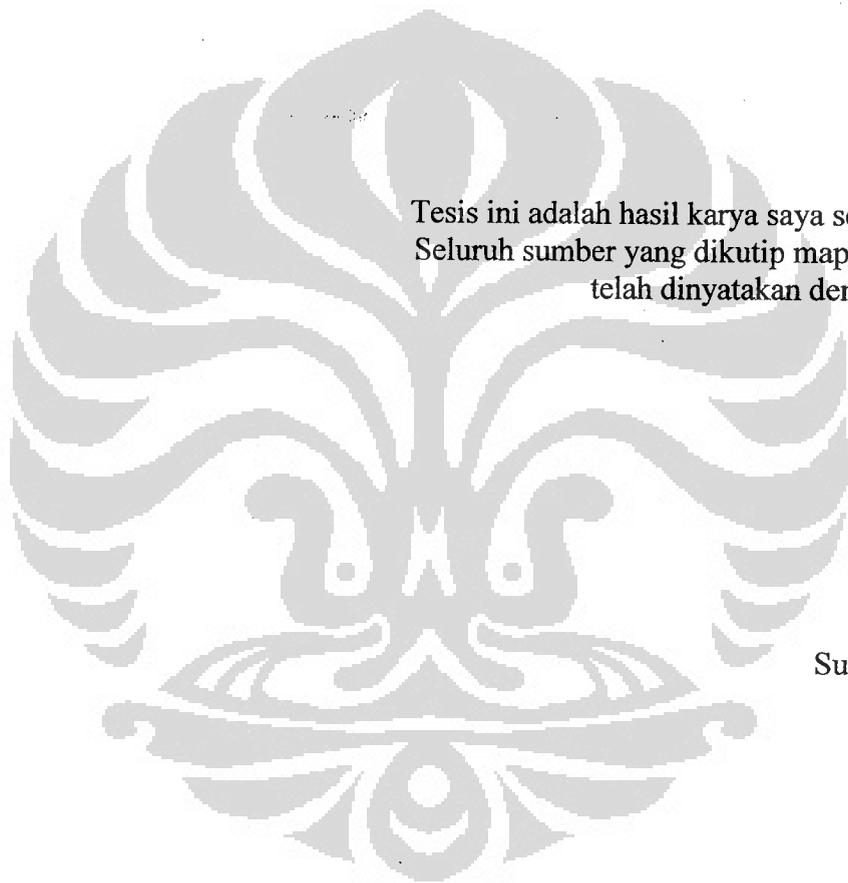
**Konsentrasi Kajian Statejik pengembangan Kepemimpinan  
Program Kajian Ketahanan Nasional  
Program Pasca Sarjana  
Universitas Indonesia**

**Jakarta  
2008**



Untuk ibu, ayah, adik dan keluarga  
yang menjadi inspirasi dalam setiap mimpi  
serta mereka yang jiwanya di persembahkan  
bagi cinta, kemanusiaan dan ilmu pengetahuan

wisma rini UI



Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan  
Seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk  
telah dinyatakan dengan benar

Suardi Herik

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
 Nama : Suardi Herik  
 NPM : 0606023564  
 Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
 Judul Tesis : Konflik Negara dengan Warga Negara studi kasus  
 Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)  
 Muria

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada program Kajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Amy S. Rahayu, M.Si

(.....)

Pembimbing : Dr. Hanneman Samuel

(.....)

Penguji Ahli : Dr. Asnatio Lasman

(.....)

Jakarta, 3 Juli 2008

**Universitas Indonesia**

## KATA PENGANTAR

Getir rasanya melihat setiap mimpi dan harapan kita untuk hidup dengan damai, terganggu oleh jagal yang selalu mengintai dari kegelapan. Jagal yang datang bersama kesewenang-wenangan datang dalam berbagai wujud, kadang nampak pada moncong negara, belati perusahaan atau kadang seringai manusia. Jelasnya semuanya menyiratkan keserakahan. Mencoba meneropong sisi damai yang terkoyak itulah saya mengambil topik ini sebagai penelitian akhir disamping dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Studi Ketahanan Nasional, Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, ridho dan rahmat-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini. Kesadaran bahwa hidup dan pencapaian tidak pernah benar-benar kita raih sendiri, kecuali selalu ada orang lain didalamnya. Maka dengan rendah hati, takjim saya sampaikan pada Prof. Dr Enoch Markum, Dr. Amy S Rahayu, M.Si, Prof. Dr Wan Usman, Dr Dody Prayogo, dan Prof Dr. Burhan Magenda yang membuat saya tahu lebih banyak. Hormat saya pada Dr. Budi Setiawan –Deputi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Menegpora- yang dengan santun, memberi lebih banyak dari apa yang saya perlukan.

Tesis ini takan pernah terwujud tanpa bimbingan dan tuntunan Bapak Dr. Hanneman Samuel, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran di dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini, ringan hidupnya adalah inspirasi. Serta Ir. Fahmi Idris –Mentri Perindustrian RI- yang memberikan bantuan dana agar penelitian dapat selesai tepat waktu. Terima kasih pula Bapak Dr. Asnatio Lasman, selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, memberi masukan kepada penulis sehingga tesis ini menjadi lebih baik, dan senyum teduhnya membuat saya merasa terlindungi. Mereka yang di Jepara yang telah membantu penelitian di lapangan, pak Haeruddin, Rijal, Gus Nung, Sumedi, Darul dan Mahmud, entah apa jadinya penelitian ini tanpa mereka.

Dalam pergulatan intelektual itu cinta Ibu, Ayah, adik Eva, dan adik Gure, Awir serta keluarga adalah inspirasi terbesar dalam mengarungi saat-saat sulit. Terutama buat adik Mardan (almarhum) bagiku kau selalu ada dalam hatiku, maaf tak banyak yang yang bisa saya beri selama hidupmu. Rekan-rekan wisma Rini UI, K' Agus, K' Sira, K' Ucu, k' Tri, K'Boge, Ono, Sugi dan Fikri, tawa rekah semua adalah suport semangat bagiku, terima kasih. Sobat-sobatku yang menyeberangi lautan untuk membeli mimpi, Habibi, Rama, Ramlan, Parlas, Picol, Penja, Pipin, Jalarambang, Topan dan Cikki, Indah dunia bersama kalian. Teman seperjuangan di PB HMI, Ketum Fajar, ucim, Komar, Rowi, Kasmin, Ari dan Sarif, mimpi kita untuk masa depan yang lebih baik adalah kekuatanku. Buat perempuan dari lembah mandalawangi, yang menjadi mimpi untuk menjalani hidup bersama, meski dua tahun sudah, tanpa disadari telah lewat sebagai bayangan

Teman dalam pergulatan intelektual saya selama dua tahun di salemba yang mistis, Borkat, Agus, pak Zul, Ucok, Akbar, fatah, Gita dan semua-semua. Buat mas Afiq, mbak mumpuni, mbak prapti, Rijal dan mbak Gita terimah kasih. Maaf yang tidak tertulis kalian semua tahu cintaku tak berkurang dan terima kasihku selalu. Demikian kuliah dua tahun saya adalah keberhasilan dari banyak orang yang telah dengan ikhlas membantu.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenaan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua. Dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi cinta, kemanusiaan dan ilmu pengetahuan.

Salemba, 3 Juli 2008

**Penulis**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS  
(Hasil Karya Perorangan)**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suardi Herik  
NPM/NIP : 0606023564  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Konsentrasi : Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Konflik Negara dengan Warga Negara studi kasus Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Muria**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini

Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal: 3 Juli 2008  
Yang menyatakan

( SUARDI HERIK)

## ABSTRAK

Nama : Suardi Herik  
Program studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Konsentrasi : Kajian stratejik Pengembangan Kepemimpinan  
Judul : Konflik Negara Dengan Warga Negara Studi Kasus : Proyek  
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Muria

Konflik negara dengan warga Negara adalah salah satu fenomena yang terjadi pasca reformasi 1998. Perubahan politik ini memberikan dampak yang signifikan pada hubungan Negara dengan warga Negara dalam mengelola relasinya, sekaligus telah mengantarkan pada kesadaran untuk memperjuangkan semua hak sosial, politik maupun ekonominya.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat konflik yang terjadi antar Negara dengan warga Negara pada kasus rencana proyek PLTN Muria yang rencana tapaknya di ujung lemah abang desa balong kecamatan kembang kabupaten jepara, Dengan mengajukan pertanyaan penelitian dimensi dan sebab apa yang terjadi pada konflik ini dan bagaimana peran kepemimpinan dalam mengatasi konflik ini.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini dilakukan di Desa Balong dan Kabupaten Jepara. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen, pengamatan dan wawancara mendalam. Data diabstraksi, dipilah dan dianalisis kemudiandilaporkan dalam pemaparan deskriptif. Sejumlah teori yang digunakan adalah tentang konflik, relasi Negara dan warga Negara serta teori kepemimpinan.

Dari penelitian memperlihatkan hubungan antar faktor dalam peristiwa-peristiwa konflik cukup kompleks. Secara substansial, faktor utama yang perlu dilihat dalam dinamika konflik adalah intensitas konflik –yakni tingkat kekerasan- namun terbentuknya intensitas konflik secara terbatas dipengaruhi pula faktor lain dalam dimensi dinamika, yakni eskalasi, fluktuasi, peran aktor dan lembaga, serta karakteristik lokal. Pada faktor sebab yakni ketimpangan, perubahan politik, eksploitasi, dominasi, dan pemberdayaan secara substansi faktor eksploitasi dan pemberdayaan menjadi sebab utama dari konflik. Sedangkan peran kepemimpinan baik lokal maupun pusat belum memperlihatkan tindakan kepemimpinan –yakni *speed, priority, dan fleksibility* untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung.

Dari gambaran penelitian nampak bahwa Dinamika dan sebab konflik merupakan gejala yang dapat di baca indikasi kemunculannya oleh sebab itu maka sebaiknya pemerintah dapat memperhatikan kemunculan indikator itu dan segera mengambil tindakan kepemimpinan untuk meredam dan mencegah kekerasan yang potensial terjadi. Dalam jangka panjang pemerintah harus memberikan Jaminan kepastian terhadap PLTN tidak hanya dalam jaminan teknologi, akan tetapi kepastian hukum dan kepercayaan secara institusional untuk mengelola proyek dengan potensi resiko besar. Dan terakhir ruang dialog agar dibuka dengan transparan dan akuntabel bagi semua stekholder,

Kata kunci

Konflik, Kepemimpinan, PLTN, Negara, warga negara.

## ABSTRACT

Name : Suardi Herik  
Study Program : National Resilience Study  
Title : Conflict between a state and the society : A Case Study of Nuclear Electric Power Muria

A conflict between a state and the society is one of a phenomena happening after reformation 1998. This political change affects a significant thing on relation between a state and the society to manage the relation. Additionally, it also increases an understanding to struggle all of social rights, political rights and economical rights.

This research was conducted to know what conflict happening between a state and a society on case of PLTN Muria project planning, which its construction is planned in Dusun Ujung Lemah Abang, Desa Balong, Kembang district of Jepara regency.

This research was conducted in Desa Balong and Jepara Regency with a qualitative approach. Data collecting was conducted through document research, observation and in-depth interview. Those data were abstracted, selected, and analyzed, then the data was reported through descriptive explanation. A number of theories used on this research are conflict theory, the relation between a state and the society theory and leadership theory.

The result of this research describing a relation among many factors on the conflict is complex. Substantially, the main factor which must be known on a conflict dynamism is a conflict intensity – a violent level -, however, the conflict intensity is determined by other factors on the conflict dynamism. Those factors are escalation, fluctuation, the role of an actor and institution, and a local character. Cause factors are political change, exploitation, domination, and empowerment. Exploitation and empowerment factor are substantially the main cause on this conflict. Otherwise, the role of leadership not only from local government but also from national government haven't indicated a leadership action – that is speed, priority, and flexibility - to solve the conflict.

From the research explanation, the conflict dynamism and the conflict cause are an indication which can be known its appearing. Thus, it is very recommended that the government could focus on this indicator appearing and take a leadership action to assuage and prevent a violent potency. Our government have to be able to ensure of PLTN, not only technology warranty but also law and belief warranty institutionally to manage its project with a high risk. The last point, dialogue space must transparently be open and accountable for all of stakeholders.

### Key word

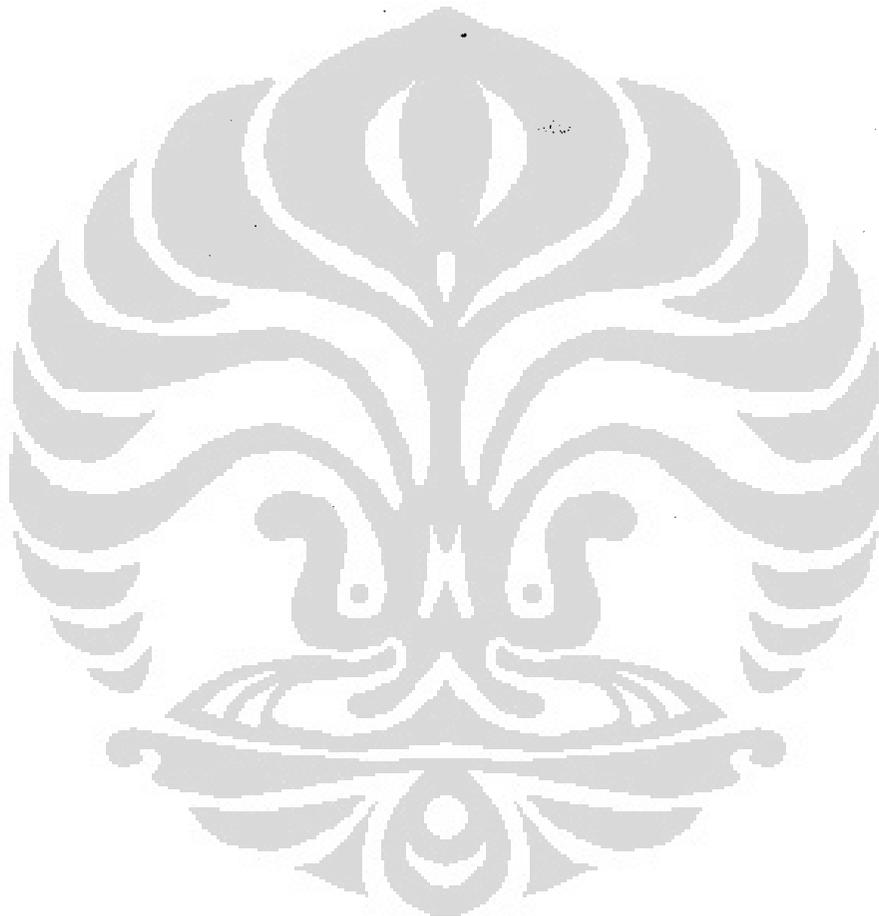
Conflict, leadership, nuclear electric power, state , society

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kerangka Konseptual .....	3
1.4.1 Konflik : Defenisi, tahapan dan dimensi.....	4
1.4.2 Sebab dan Dinamika Konflik.....	16
1.4.2 Relasi Negara dengan Warga Negara .....	18
1.4.3 Politik Energi Nasional.....	21
1.4.3.1 Potensi sumber Energi nasional.....	22
1.4.5.2 Kebijakan Energi Nasional.....	24
1.4.3.3 Arah kebijakan energi Nuklir Nasional.....	26
1.4.5 Kepempinan dalam konflik.....	30
1.5 Metodologi Penelitian.....	32
1.5.1 Teknik Pengumpulan Data.....	33
1.5.2 Analisis Data.....	34
1.6 Sistematika Pembahasan.....	35

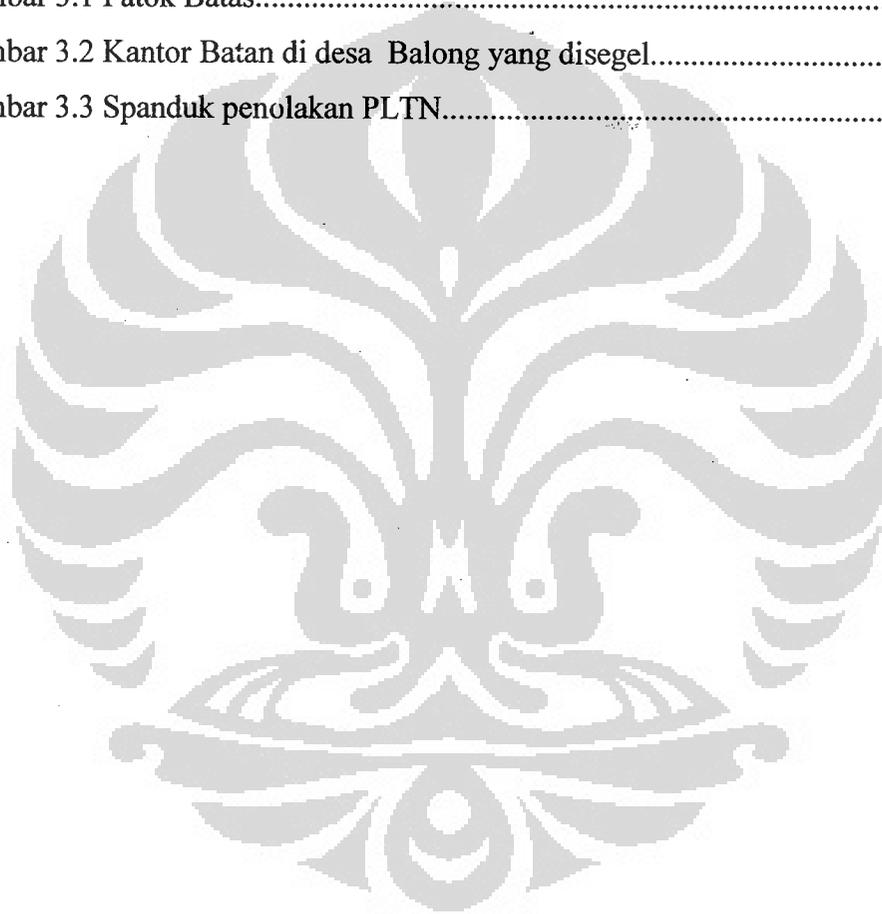
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
	2.1 Studi penentuan tapak PLTN.....	37
	2.2 Kabupaten Jepara.....	38
	2.2.1 Sejarah Jepara.....	39
	2.2.2 Penduduk.....	40
	2.2.3 Agama.....	41
	2.2.4 Industri dan Ketenaga kerjaan.....	42
	2.3 Desa Balong.....	43
	2.3.1 Penduduk.....	44
	2.3.2 Mata Pencaharian .....	45
	2.3.3 Pendidikan.....	45
<b>BAB III</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
	3.1 Dinamika Konflik.....	46
	3.1.1 Eskalasi dan Bentuk .....	47
	3.1.2 Fluktuasi konflik.....	51
	3.1.3 Intesitas Konflik.....	54
	3.1.4 Peran Aktor Atau Lembaga.....	58
	3.1.5 Karateristik Lokal.....	62
	3.2 Sebab Konflik.....	63
	3.2.1 Ketimpangan .....	64
	3.2.2 Perubahan Politik.....	66
	3.2.3 Ekspoitasi.....	68
	3.2.4 Dominasi.....	70
	3.2.5 Pemberdayaan.....	71
	3.3 Kepemimpinan Dalam Konflik.....	74
	3.3.1 Kecepatan Tindakan.....	75
	3.3.2 Prioritas.....	78
	3.3.3 <i>Fleksibilitas</i> .....	80

<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan.....	83
5.1 Saran .....	84
<b>Daftar pustaka.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



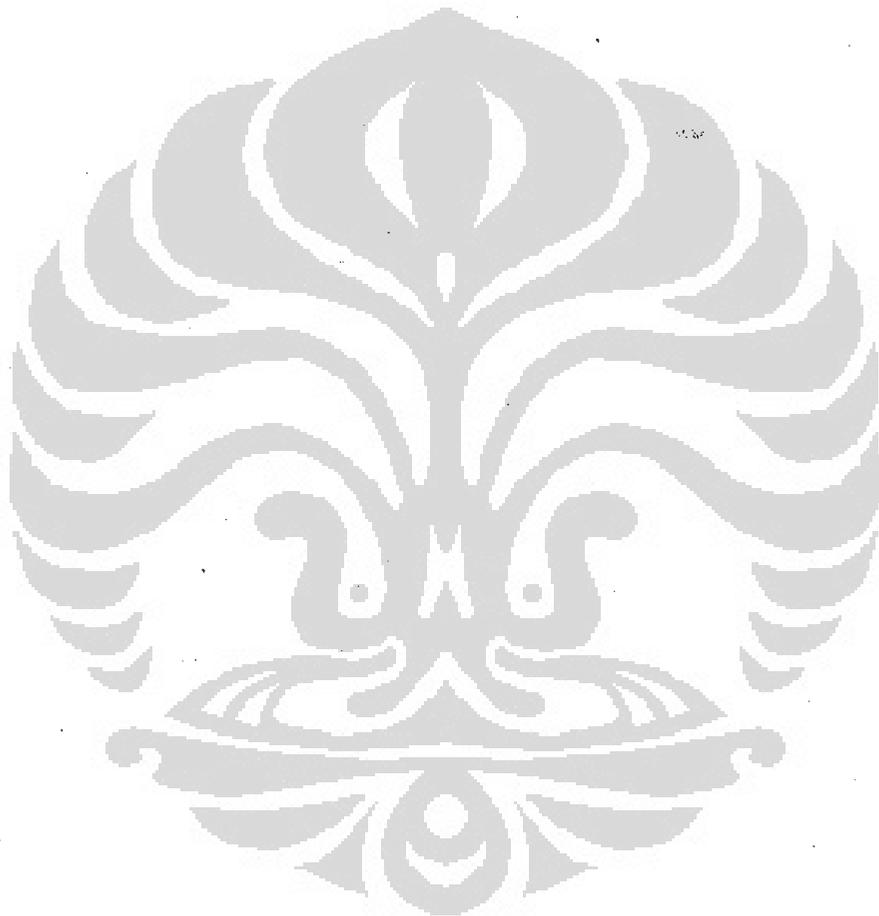
## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Model kerangka koseptual penelitian.....	3
Gambar 1.2 Skenario optimalisasi energi 2025.....	25
Gambar1.3 Road map Industri Nuklir 2025.....	29
Gambar 1.4 Road map PLTN 2025 .....	29
Gambar 2.1 Peta kabupaten Jepara.....	40
Gambar 2.2 Peta Kecamatan Kembang.....	44
Gambar 3.1 Patok Batas.....	50
Gambar 3.2 Kantor Batan di desa Balong yang disegel.....	53
Gambar 3.3 Spanduk penolakan PLTN.....	55



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Cadangan energi fosil Indonesia (status tahun 2005).....	22
Tabel 1.2 Cadangan energi Non-Fosil Indonesia.....	23
Tabel 3.1 Peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi.....	58



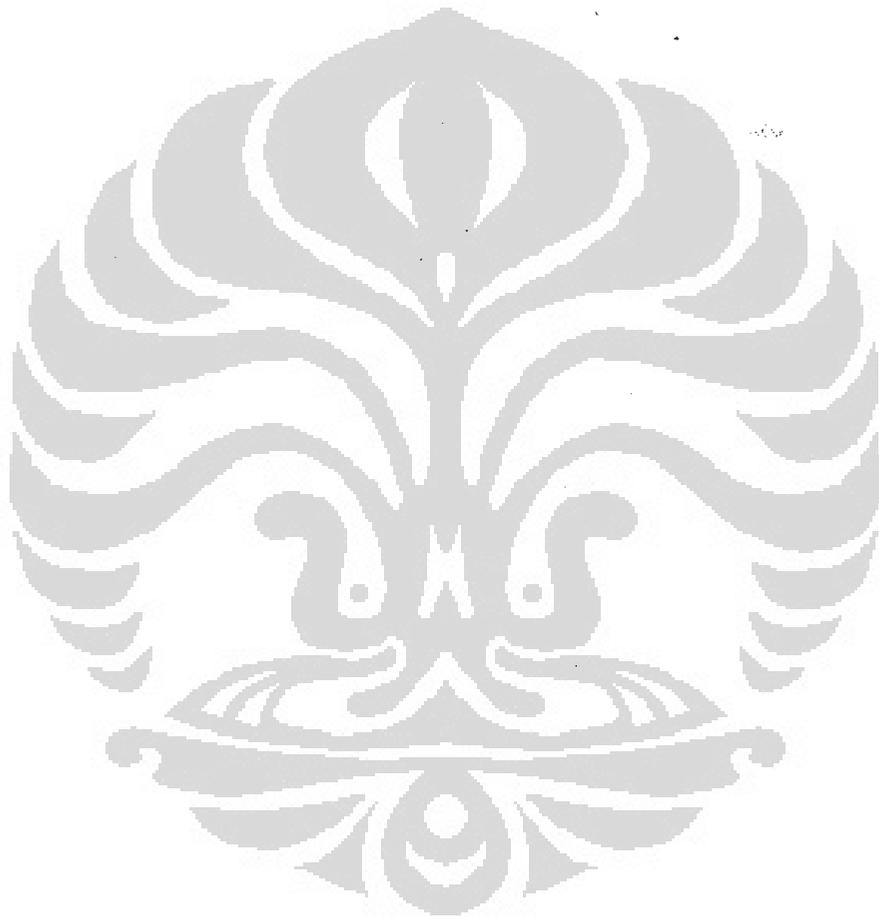
## **Daftar lampiran**

Lampiran 1 Biodata penulis.

Lampiran 2 Daftar Informan.

Lampiran 3 Pedoman Wawancara.

Lampiran 4 Transkrip wawancara



## BAB I

### PENDAHULUAN

Kebutuhan energi meningkat sejalan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi negara-negara di dunia. Namun peningkatan kebutuhan akan energi di ikuti dengan penurunan cadangan sumber energi utama khususnya minyak dan gas bumi. Upaya pencarian energi alternatif, menuju pada sumber energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi perhatian pemerintah, ilmuwan maupun LSM pengembangan energi. Nuklir telah menjadi salah satu alternatif pemecahan permasalahan energi di masa yang akan datang. Namun demikian permasalahan usaha pengembangan nuklir selama tiga puluh terakhir mengalami pasang surut. Termasuk Indonesia yang terus mempersiapkan diri untuk menjadikan nuklir sebagai pendukung kebutuhan energi di masa depan. Untuk itu telah lahir seperangkat regulasi yang terkait Energi Nuklir seperti UU No 10 Tahun 1997 (Ketenaganukliran), UU Nomor 17 Tahun 2007 (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025), Perpres Nomor 05 Tahun 2006 (Kebijakan Energi Nasional), dan UU Nomor 30 tahun 2007 (Energi).

#### 1.1. Latar Belakang

Konflik sosial antar warga negara<sup>1</sup>, konflik warga negara dengan negara<sup>2</sup> atau warga negara dengan pengusaha yang mencapai eskalasi sampai pada kekerasan fisik telah terjadi di banyak tempat. Konflik ini begitu beragam jenisnya, mulai dari konflik yang bernuansa etnis (konflik di Sampit, Sambas), konflik antar agama (konflik di Ambon, dan Poso), konflik antar kampung, antar kampus, konflik pengelolaan hutan dan tanah, konflik penentangan kebijakan negara oleh warga negara. dan lain-lainya.

Konflik yang bersifat vertikal antara warga negara dan negara yang makin tinggi intensitasnya pasca reformasi 1998. Daftar konflik seperti ini tentu cukup panjang mengingat benturan kepentingan yang terjadi antara kebijakan negara

---

<sup>1</sup> Dalam tesis ini saya menggunakan kata "warganegara" sebagai ganti dari kata "masyarakat" untuk memberi penekanan yang lebih pada relasi "warganegara," "negara," dan "bisnis" sebagaimana lazim digunakan dalam analisis sosiologi.

<sup>2</sup> Menggunakan negara sebagai kata ganti untuk pemerintah –baik pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa- beserta aparatus birokrasi dan keamanan serta semua unit kerja pemerintah yang terlibat dalam proyek ini

disatu pihak dengan kepentingan warga negara lain. Konflik ini terkadang mencapai eskalasi konflik pada tingkat kekerasan namun ada juga yang baru atau hanya sampai pada kontraversi wacana.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Muria yang kontroversial dapat dilihat dimensi konflik dan wacana yang dimainkan oleh negara bersandar pada subyektivitas yang dimilikinya. Pada awalnya dilontarkan wacana kelangkaan energi listrik di Jawa yang dilakukan oleh pemerintah dan para teknokrat (BATAN) yang memprediksi bahwa pada tahun 2020 nanti akan terjadi kelangkaan listrik.

Energi listrik yang berbasis fosil seperti minyak dan gas bumi sudah semakin menipis maka alternatif yang paling murah adalah PLTN. Nuklir dianggap energi yang paling efisien karena 1 kg uranium setara dengan 3.000 ton batu bara atau 160 truk tanki, minyak diesel berkapasitas a 6.500 liter. PLTN Muria yang akan dibangun tersebut diharapkan akan, beroperasi pada tahun 2017 dan menghasilkan daya listrik sebesar 1000 MW.

Alasan, teknologi nuklir sangat berbahaya bagi lingkungan apabila terjadi kecelakaan seperti trauma terhadap kecelakaan Chernobyl (1986) yang kemudian memicu gerakan anti PLTN yang mengglobal. Kebijakan rencana penutupan PLTN-PLTN yang ada adalah di Jerman. Negara ini memiliki 17 reaktor PLTN, satu sudah selesai dibangun di kota Hamm tetapi karena gerakan protes anti nuklir reaktor tersebut dibekukan dan kebijakan selanjutnya adalah menutup secara bertahap reaktor-reaktor lainnya. Sampai pada kegagalan negara-negara berkembang seperti Brazil dan Filipina dalam Pengembangan PLTN.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dalam konflik yang terjadi seputar pembangunan PLTN dengan kebenaran subyektif yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Maka dirumuskan beberapa pertanyaan kunci yaitu :

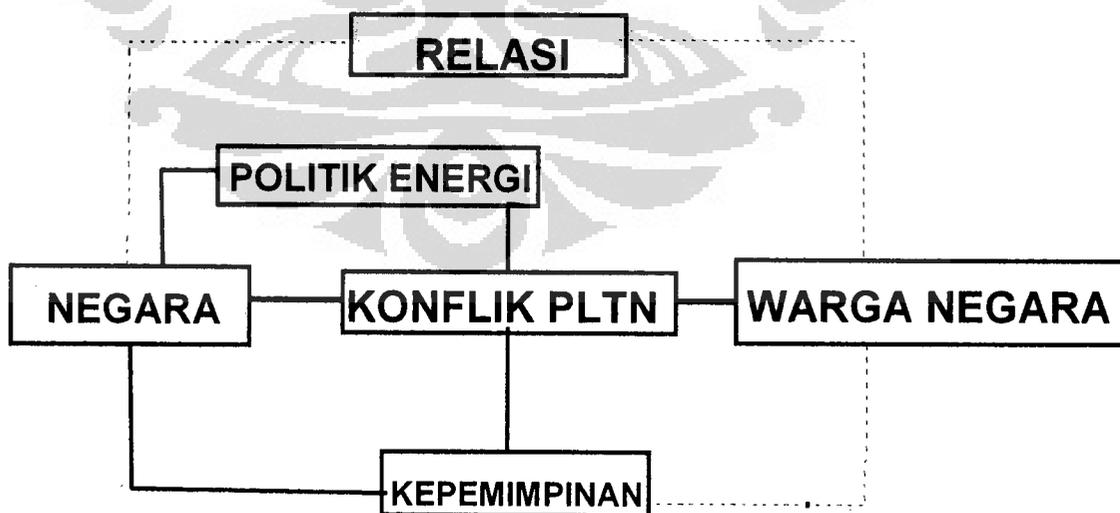
1. Bagaimana dimensi dinamika dan sebab konflik yang terjadi terhadap rencana pendirian PLTN Muria ?
2. Bagaimana peran kepemimpinan dalam penyelesaian konflik proyek PLTN Muria?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana dimensi dinamika dan sebab konflik pada rencana pendirian PLTN Muria serta melihat bagaimana peran kepemimpinan dalam penyelesaian konflik proyek PLTN Muria.

### 1.4 Kerangka konseptual

Menjelaskan peristiwa konflik antara negara dan warga negara dengan terlebih dahulu membangun kerangka konseptual yang selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis fenomena konflik secara empirik. Pada penelitian ini terlebih dahulu melihat pendekatan apa yang terbangun, terkait relasi antara negara dengan warga negara sehingga dapat melihat unit analisis yang relevan. Relasi inilah yang selanjutnya melahirkan kebijakan negara terhadap berbagai program negara –terutama yang terkait langsung dengan warga negara- termasuk pada proyek PLTN. Dengan melihat kebijakan politik energi nasional yang menjadi program pemerintah untuk mewujudkan PLTN sebagai salah satu jalan mengatasi krisis energi listrik. Kebijakan energi nasional yang diturunkan dalam bentuk program berhadapan dengan kepentingan warga negara yang tidak sejalan atau merasa tidak sejalan, melahirkan konflik-konflik yang termanifestasi dalam berbagai bentuk. Fenomena ini yang kemudian menjadi analisis penelitian ini termasuk peran kepemimpinan dalam penyelesaian konflik ini. Model kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Model kerangka koseptual penelitian

#### 1.4.1 Konflik : pengertian, tahapan, dan dimensi

Dalam benak setiap manusia pada umumnya ada suatu gambaran dan harapan akan situasi ideal dimana ada keseimbangan dalam hidup. Untuk mencapai situasi ideal ini, di ciptakanlah sistem kebudayaan manusia dan di terapkan dalam bentuk pranata-pranata. Namun selalu ada faktor yang menyebabkan suatu keadaan menjauh dari keadaan seimbang ini. Karena sifatnya yang menjauhkan dari kondisi ideal ini maka konflik bagi sebagian orang diberi makna negatif. Sementara ada yang melihat konflik dari sudut pandang yang berbeda, di mana konflik dilihat sebagai faktor yang membawa dinamika dalam kehidupan manusia dan memebrei kesempatan untuk munculnya suatu perubahan.

Perbedaan sudut pandang mengenai konflik ini membawa pada bergamnya defenisi konflik itu sendiri serta sikap orang terhadap konflik dalam menghadapinya. Namun secara garis besar, ada dua kata yang di gunakan sebagai penyebutan keadaan semacam ini dalam kajian-kajian mengenai konflik, yang pertama adalah kata konflik itu sendiri (*Conflict*), dan kata yang kedua yang juga sering digunakan adalah kata sengketa (*dispute*). Pengertian keduanya agak berbeda, menurut definisi dalam The Word Book Dictionary (1991), defenisi kata konflik(*Conflict*) adalah pertikaian atau perseteruan, terutama dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan defenisi sengketa (*dispute*) lebih mengarah kepada perbedaan pendapat atau pertengkaran karena dua pihak atau lebih tidak spendapat satu sama lain. Dari kedua definisi ini terlihat bahwa pengertian kata konflik mencakup pengertian sengketa sebagai salah satu manifestasinya. Namun ada kemungkinan bahwa dalam konflik yang terjadi tidak terdapat sengketa.

Dalam diskursus mengenai konflik, banyak definisi yang di kembangkan oleh para ahli dan pemerhati masalah ini. Beberapa definisi atau pengertian beserta faktor dan dimensi dalam defenisi tersebut,

Suatu proses atau keadaan diamana dua pihak atau lebih berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing karena adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak (Koentjaraningrat, dkk : 1984). Dimensi meliputi, Proses atau keadaan, Usaha menggagalkan pihak lain dan perbedaan pendapat, nilai serta tuntutan,

Benturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang di sebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan kelangkaan sumberdaya alam (Fuad dan Maskanah : 2000). Dimensinya meliputi benturan, nilai, satatus, kekuasaan dan sumber daya alam.

Konflik sosial bermula dari perbedaan dan muncul permukaan jika ada elemen lain. Perbedaan itu bisa berupa perbedaan cara penerimaan, pemahaman, ide dan pemikiran yang mendasar, perasaan dan emosi serta keinginan yang membawa kearah yang berlawanan (Glasi,1999). Dimensinya perbedaan, cara penerimaan atau presepsi, pemahaman, ide dan pemikiran , perasaa dan emosi serta keinginan.

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher dkk, 2001). Dimensinya memiliki atau merasa memiliki dan sasaran-sasaran.

Dapat juga diartikan sebagai proses pencapaian tujuan dengan melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (konflik, pertikaian, pertentangan)(Sokento, 1983). Dimensinya pencapaian tujuan, norma dan nilai.

Tumbukan klaim hak atas tanah dan atau sumber daya alam lain yang berasal dari alas yang berbeda namun masing-masing pihak meyakini kesahihannya sebagai dasar untuk mempertahankan fungsi suatu kawasan berikut sumber dayanya (fauzi : 2002) Dimensinya Klaim, Sumber daya, perbedaan alas, kebenaran subyektif dan fungsi sumber daya.

Data mengenai proses sengketa didapat dari pendokumentasian penggalan sejarah ketidakpahaman dalam masyarakat, atau antar kelompok (nader dan Todd : 1978). Dimensinya Ketidaksepahaman antar anggota masyarakat atau antar kelompok.

Dari beberapa defenisi konflik tersebut dapat ditarik suatu defenisi yang memiliki makna luas dan lengkap sebagai acuan dalam penulisan ini. Konflik adalah suatu keadaan atau berupa prosess/rangkaian kejadian di mana terdapat duaorang atau/kelompokatau lebih yang memiliki suatu kebenaran subyektif yang berbeda atau berlawanan berupa pendapat, nilai, tuntutan, status kekuasaan cara

pandang/presepsi, pemahaman, ide/pemikiran, perasaan/emosi, kemampuan akses dan/atau kontrol terhadap wacana dan sumberdaya. Perbedaan-perbedaan ini saling berbenturan atau berlawanan satu sama lain karena arah dan tujuannya berbeda. Selama proses berlangsung, masing-masing pihak yang terlibat berusaha untuk memenangkan kebenaran subyektifnya demi mendapatkan pemuasan atau pemenuhan yang menjadi kepentingannya. Benturan atau perlawanan ini terejawantahkan dalam sikap, pemikiran, keinginan dan tingkah laku masing-masing pihak sehingga muncul apa yang disebut permusuhan, persaingan, percekocan, gangguan sengketa, pertengkaran, perkelahian ataupun kekerasan fisik.. akibat yang ditimbulkan dari pengejawantahan ini dapat berupa terganggunya hubungan interpersonal maupun sosial. Rusaknya atmosfer hubungan sosial dalam konteks yang lebih luas ataupun kerusakan fisik manusia maupun benda-benda yang ada disekitarnya.

Dari pengertian konflik yang begitu panjang ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam melakukan kajian mengenai konflik. Pertama adalah keterlibatan dua pihak atau lebih atas suatu hal , baik itu bersifat abstrak maupun kongkrit. Berangkat dari suatu hal yang menjadi sumber konflik ini, terjadilah perbedaan antara pihak-pihak yang terlibat. Perbedaan yang ada merupakan potensi terjadinya konflik dan dari potensi ini berlangsunglah tahapan-tahapan konflik atau yang disebut proses eskalasi. Dalam menentukan pilihan untuk melanjutkan tahapan konflik atau tidak, biasanya ada beberapa pertimbangan mendasar yang menjadi acuan, yaitu pertimbangan untung rugi dan tujuan pihak terkait jika suatu konflik di lanjutkan. Beberapa hal yang sering menjadi bahan pertimbangan untung rugi adalah faktor kemampuan baik berupa material, waktu, ketahanan psikologi, kepemilikan sumber daya sosial dan nilai-nilai para pihak yang berasal dari sistem budayanya.

Yang kedua adalah bahwa konflik dalam pengertian ini dipandang sebagai suatu proses yang eksis dan *innate* atau melekat dalam kehidupan manusia (Gluckman : 1965, moore, 1978,1986, Nader dan Todd : Yasmi : 2003). Yaitu konflik dilihat sebagai suatu rangkaian dari berbagai kejadian di mana pihak yang terlibat atau dilibatkan berusaha untuk memenangkan kepentingannya masing-masing baik dengan mengalahkan kepentingan yang lain (pendekatan menang-

kalah) atau dengan mengkompromikan kepentingan masing-masing (pendekatan menang-menang) lepas dari berhasil atau tidaknya usaha tersebut. Dengan berlandaskan pada pengertian ini konflik yang terjadi dapat dilihat sebagai suatu bagian kebudayaan yang dinamis yang senantiasa berkembang dan berubah.

Konflik berubah setiap saat, melalui beberapa tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Analisis dasar konflik terdiri dari lima tahap (Fisher dkk, 2001). Tahap pertama adalah pra konflik, ini adalah periode dimana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik yang tersembunyi dari pandangan umum. Meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terjadi ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.

Tahapan kedua adalah konfrontasi, pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika salah satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang kala pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi diantara kedua belah pihak. Masing-masing pihak mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan dan mungkin mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan kekerasan dan konfrontasi. Hubungan antara kedua belah pihak menjadi semakin tegang, mengarah pada polarisasi di antara pendukung masing-masing pihak.

Tahapan ketiga adalah konflik, ini merupakan puncak konflik. Ketika ketegangan dan atau kekerasan terjadi paling hebat. Dalam skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal diantara kedua pihak yang bertikai kemungkinan terputus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak-pihak yang lain.

Tahap ke empat adalah akibat. Suatu konflik akan menimbulkan akibat, satu pihak mungkin menaklukkan pihak lain atau mungkin melakukan gencatan senjata. Satu pihak mungkin menyerah atas desakan pihak lain. kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian. Apapun keadaannya,

tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun dengan kemungkinan adanya penyelesaian.

Tahap kelima adalah pascakonflik. Situasi pada akhirnya diselesaikan dengan mengakhiri berbagai konfrontasi, kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan menjadi lebih normal diantara kedua belah pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini seringkali kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

Tahapan-tahapan ini tidak selamanya terjadi secara berurutan. Setiap tahapan memungkinkan untuk melompat pada tahap selanjutnya atau tidak memasuki tahapan yang lain karena selama tahapan-tahapan berlangsung selalu ada pilihan untuk menangani konflik yang terjadi. Dalam hal ini para pihak yang terlibat konflik dihadapkan pada pilihan kapan memulainya penanganan konflik, bagaimana menangani konflik, dan siapa yang terlibat atau melibatkan diri dalam konflik tersebut.

Menurut Deutsch, dkk dalam Emirzon (2001), terdapat beberapa elemen yang memperparah konflik, yaitu :

(1) Proses kompetisi

Para pihak berkompetisi satu sama lain karena mereka percaya bahwa tujuan mereka berlawanan.

(2) Salah persepsi dan bias

Orang cenderung berpikir secara konsisten dengan persepsi mereka terhadap konflik. Oleh karena itu, mereka cenderung menginterpretasi orang dan peristiwa. Dengan kata lain, berfikir dengan cara demikian cenderung menjadi stereotip dan bias.

(3) Emosional

Konflik cenderung emosional, misalnya para pihak yang khawatir, marah dan frustrasi. Oleh karena itu, emosi cenderung mendominasi pikiran, dan para pihak dapat menjadi sangat emosional dan irasional sehingga konflik semakin membesar.

(4) Kurang komunikasi

Dalam hal terjadi kemunduran komunikasi, dimana para pihak kurang berkomunikasi dengan pihak yang tidak setuju dengan mereka, dan lebih-lebih dengan orang yang sependapat.

(5) Permasalahan kabur

Dalam hal ini akar permasalahan dalam perselisihan kabur dan kurang jelas. Para pihak tidak mengerti kapan perselisihan dimulai, apakah konflik siap di selesaikan ?, kekaburan permasalahan di sebabkan oleh permasalahan yang tidak relevan.

(6) Komitmen yang kaku

Dalam hal ini, para pihak menjadi lebih berkomitmen dengan pandangan mereka dan mereka kelihatan kehilangan muka serta terkesan bodoh. Proses berfikir menjadi kaku, para pihak cenderung melihat permasalahan sebagai sesuatu yang sederhana dan tidak lebih kompleks serta multidimensi.

(7) Memperbesar perbedaan meminimalkan persamaan

Pihak berpegang teguh pada komitmen mereka sehingga permasalahan menjadi kabur. Mereka hanya melihat kedudukan satu sama lain sebagai oposisi yang berlawanan. Semua faktor yang berbeda dan terpisah dari setiap pihak semakin membesar dan menekan, sementara persamaan dan kebersamaan yang mereka bagi menjadi sederhana dan di minimalkan.

(8) Peningkatan konflik

Konflik akan meningkat apabila para pihak bertahan dalam pandangannya, kurang toleransi, kurang menerima pihak lain, kurang komunikasi dan emosional. Hasil yang diharapkan adalah para pihak berusaha menang dengan meningkatkan komitmen pada posisi mereka, meningkatkan sumber-sumber mereka untuk mendapatkan kemenangan dan meningkatkan kegigihan mereka.

Glasi (1997) menggambarkan beberapa tingkatan eskalasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sehingga memasuki tahap konflik atau sengketa. Tingkatan itu secara berurutan menunjukkan keadaan yang semakin parah. Tingkatan pertama adalah ketegangan karena masing-masing pihak bertahan pada kebenaran subyektifnya. Dalam tahap ini, kedua belah pihak masih berniat untuk mendengarkan argumen, alasan atau pendapat pihak lain dan berniat

menyelesaikan perbedaan yang ada. Jika dalam tahap ini konflik tidak terselesaikan maka tahap kedua, yaitu perdeBATAN atau polemik (*debate/polemics*) mungkin dilakukan. Tahap ini ditandai dengan ketidakmauan masing-masing pihak untuk mendengarkan pihak lain. Menjadi penting adalah membenaran diri dan penegasan sikap dan posisinya sebagai pihak yang benar dan hal inilah yang dianggap sebagai kenyataan yang faktual. Pada tingkatan ini, masing-masing pihak menempatkan diri dalam posisi ekstrem yang berlawanan satu sama lain. Upaya komunikasi verbal untuk menyelesaikan konflik justru digunakan untuk menyerang pihak lain dan memepkrkokoh posisinya.

Gagalnya kesadaran akan situasi ini akan membawa konflik pada eskalasi berikutnya yaitu tindakan dan bukan kata-kata yang bekerja (*action not words*), dimana tindakan-tindakan pragmatis dilakukan untuk lebih mengeksplisitkan kebenaran subyektif yang tidak terkomodasi. Upaya penyelesaian verbal justru dapat memperburuk keadaan karena masing-masing pihak merasa pihak lain tidak mau mnedengarkan dan hanya menuntut untuk didengarkan. Bahkan bahasa non verbal yang mungkin dilakukan secara tidak sengaja sekalipun di interpretasikan kedalam makna negatif. Masing-masing pihak sudah terperangkap oleh pemahaman mengenai kebenaran dirinya dan kehilangan empatinya.

Keadaan bisa semakin memburuk pada saat gambaran atau *image* pihak lain melulu terlihat negatif. Pada tingkatan keempat yang disebut sebagai gambaran dan koalisi ini, masing-masing pihak memeberikan penilaian negatif atau prasangka buruk terhadap pihak lain dan menciptakan gambaran mereka berdasarkan penilaian dan prasangka ini dan gambaran ini kemudian memfosil dalam pemahaman mereka. Apapun tindakan yang dilakukan pihak lain akan mengokohkan gambaran negatifnya. Bahayanya adalah informasi ini kemudian digunakan untuk memepengaruhi pihak lain diluar mereka sehingga tergalang kekuatan karena dukungan pihak lain atau untuk melakukan konsolidasi kedalam pihak lain. Masing-masing pihak menunggu waktu untuk menggunakan informasi apapun tentang pihak lain yang dapat digunakan untuk memenangkan posisi mereka.

Pada saat satu pihak menemukan suatu masa yang tepat maka masuklah tingkatan kelima, yaitu kehilangan muka (*loss of face*), dimana informasi itu di

gunakan untuk mempermalukan pihak lain sehingga kehilangan kekuatan emosional dan psikologinya. Ini merupakan salah satu senjata bagi pihak tersebut untuk memenangkan diri mereka selain berbagai ungkapan menyakitkan yang sengaja di lemparkan. Pihak yang melakukan aksinya pada tingkatan ini justru merasa melakukan suatu hal yang terbaik karena memperlihatkan kebusukan pihak lain beserta kebenaran subyektifnya. Keburukan yang terekspos ini kemudian akan di akumulasi dengan keburukan lain yang di hubungkan dengan masalah-masalah lain dalam periode waktu tertentu yang sengaja di buat relevan. Sementara itu, pihak yang merasa kehilangan muka akan melakukan apa saja untuk memulihkan keadaan, yang mungkin justru akan memperburuk keadaan. Pada tingkatan ini, upaya untuk memperbaiki keadaan agar dapat kembali menjadi seperti semula hampir muskil dilakukan.

Aksi yang mungkin dilakukan oleh pihak yang merasa dipermalukan adalah menggagalkan kekuatan untuk menyerang balik. Hal ini dilakukan dengan mencari dukungan dari pihak lain atau mencari informasi mengenai pihak lawan dan menggunakannya untuk mengancam. Pada tingkatan strategi ancaman (*strategies of threat*), usaha ini dilakukan dengan sepenuh hati dan hati-hati. Informasi ini kemudian digunakan untuk membawa keburukan pihak lawan ke arena yang lebih luas. Tidak hanya itu, ancaman terhadap potensi dilakukannya proses litigasi merupakan senjata ampuh yang mungkin dilakukan. Hal ini untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan merupakan amunisi yang cukup kuat yang akan membuat pihak lain berpikir dua kali untuk meneruskan konflik ini. Jika keadaan berimbang, maka eskalasi akan menurun dan terjadilah proses menang-kalah. Namun jika kekuatan berimbang, maka keduanya akan saling mengancam dengan tingkat ancaman yang lebih berbahaya dan dengan area publik yang luas.

Pada akhirnya, ancaman akan diaktualisasikan dalam tindakan nyata. Pada tahap awal, satu pihak akan menyerang apa saja yang menjadi potensi ancaman dari pihak lain. Cara apapun dilakukan agar pihak lawan kalah. Tidak ada lagi yang dapat menghentikan tindakan yang dilakukan, bahkan tidak juga nilai-nilai dasar kemanusiaan. Kerusakan atau kerugian yang dihasilkan dari suatu tindakan di pandang sebagai suatu keberhasilan dan dirayakan dengan kegembiraan. Pada tingkatan serangan kekerasan yang sifatnya terbatas (*limited destructive blow*) ini,

tahapan kalah-kalah sudah dimulai. Tingkatan yang kedelapan, yaitu fragmentasi pihak musuh (*fragmentasi of the enemy*) menandai dimulainya tahapan perang habis-habisan dimana pihak lawan diserang atau dilumpuhkan total baik secara material, psikologis, ataupun spiritual. Pihak penyerang bertekad untuk berjuang mati-matian untuk "menghabisi" pihak lawan. Jika pihak yang terkalahkan masih belum menyerah juga dalam situasi ini maka jadilah tingkatan terakhir, yaitu sama-sama masuk jurang (*together into abyss*), dimana tindakan "bunuh diri" dipandang sebagai suatu tindakan yang bernilai, selama itu juga dapat menghancurkan pihak lawan. Pada tingkatan ini, kedua belah pihak hancur total.

Namun demikian, setiap konflik selalu mengalami penurunan atau fase de-eskalasi baik dalam kekerasan cara yang di gunakan maupun dari segi pihak yang terlibat. Walaupun bukan secara otomatis penyelesaian konflik terjadi setelah de-eskalasi terjadi, namun pada umumnya suatu penyelesaian konflik diawali dengan fase de-eskalasi. Kriesberg (1998) menguraikan bahwa beberapa faktor yang dapat menyebabkan eskalasi dapat pula menjadi faktor eskalasi. Secara umum proses de-eskalasi ini terjadi secara internal dalam pihak-pihak yang berkonflik, dalam hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan dalam lingkungan sosial terjadinya konflik tersebut.

Proses-proses internal meliputi faktor sosial-psikologis, yaitu rasa tanggung jawab masing-masing pihak terhadap konflik yang dihadapi dan tidak lagi menyalahkan pihak lain. Pihak-pihak yang terlibat juga mungkin membuat atau memiliki suatu kerangka berpikir yang baru mengenai konflik yang terjadi yang kemudian membawa pada suatu pertimbangan bagaimana situasi konflik ini bisa membawa keuntungan bagi semua pihak. Kondisi semacam ini bisa terjadi dalam konteks yang bervariasi yang mungkin terjadi karena adanya pilihan-pilihan kebijakan atau aturan.

Selain faktor sosial-psikologis, faktor emosional-kognitif juga berperan. Terbangunnya kesadaran mengenai resiko berlangsungnya konflik yang dapat mempengaruhi situasi dan hubungan yang sudah diterbina merupakan pertimbangan diambilnya langkah de-eskalasi. Kesadaran ini biasanya di peroleh dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, baik yang dialami sendiri maupun dari pengalaman orang lain, baik melalui workshop, terapi personal, maupun refleksi

pribadi. Faktor kognitif-efektif berupa kemampuan untuk memberikan simpati dan juga empati juga memberikan andil besar dalam de-eskalasi.

Dalam suatu organisasi, perubahan organisatoris internal dapat membawa perubahan ke arah de-eskalasi. Perubahan kepemimpinan dan orientasi kebijakan yang dimiliki bisa menjadi titik balik suatu proses eskalasi menjadi de-eskalasi. Demikian juga pertimbangan mengenai besar kecilnya biaya atau ketaksamaan beban tugas dalam menghadapi bisa membuat para pelaku berpikir dua kali untuk melanjutkan suatu konflik. Oleh karena itu, sekali keputusan untuk melakukan de-eskalasi di jatuhkan, biasanya sulit untuk kembali mengalami eskalasi.

Selain faktor internal, faktor-faktor internal dalam proses-proses interaksi yang terjadi juga menjadi faktor-faktor penyumbang terjadinya de-eskalasi. Hubungan resiprokal baik yang berimbang maupun yang tidak berimbang dapat membawa pada proses de-eskalasi. Reaksi yang berlebih pada suatu konflik bisa merupakan suatu pemaksaan bagi pihak lain untuk tidak melanjutkan konflik. Namun sikap yang terlalu kompromistis juga mengarahkan pada fase de-eskalasi atau bahkan pada berakhirnya suatu konflik.

Pada suatu proses interaksi yang lebih berimbang, pihak-pihak yang terlibat akan berusaha untuk bisa memahami satu sama lain mengenai konflik yang terjadi maupun mengenai konflik yang berseberangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari proses eskalasi yang tidak diperlukan dan tidak efisien. Dengan interaksi yang berimbang ini, pihak-pihak yang berkonflik ini kemudian bahkan membangun norma-norma atau aturan-aturan bersama sebagai panduan dalam melakukan kegiatan di suatu arena tertentu. Selain itu, untuk menghindari berkembangnya konflik, pihak yang terlibat dapat dengan sadar melakukan pembatasan isu konflik dan tidak terpengaruh oleh apapun sehingga isu konflik meluas dan mengalami eskalasi.

Kehadiran provokator atau mobilasator juga merupakan faktor penyumbang pada proses de-eskalasi. Peran pihak ketiga ini bisa menjadi inspirator bahwa suatu de-eskalasi mungkin dilakukan dan sekaligus memberikan model-model cara de-eskalasi. Dalam posisi tertentu, pihak ketiga bisa juga memberikan batasan terhadap kemungkinan eskalasi berlanjut dan memaksakan terjadinya

eskalasi. Dengan pendekatan yang lebih lunak, pihak ketiga ini bisa menjadi penengah untuk memfasilitasi terjadinya proses de-eskalasi.

Selama tahapan-tahapan berlangsung, baik pra-konflik, konflik, sengketa, maupun proses de-eskalasi, sebenarnya ada sejumlah pilihan tindakan yang dapat diambil. Tindakan-tindakan ini merupakan model-model pengangan konflik. Nader dan Todd (1978) mengemukakan beberapa pilihan tindakan yang mungkin diambil oleh suatu pihak dalam situasi konflik. Pilihan yang pertama adalah membiarkan apa yang terjadi atau disebut sebagai sikap membiarkan (*lumping-it*). Pilihan tindakan ini tersedia pada tahap pra konflik dimana rasa ketidakadilan itu kemudian dibiarkan saja berlalu. Ada kemungkinan juga keluhan sudah disampaikan pada pihak kedua, namun tidak mendapatkan tanggapan. Akibat dari tindakan ini berdampak pada keberlanjutan hubungan antara pihak yang dirugikan dan pihak yang merasa dirugikan. Faktor-faktor pertimbangan untung rugi yang telah disebutkan sebelumnya menjadi dasar dari pilihan sikap keberlanjutan hubungan ini. Kegagalan untuk mendapatkan efek dari tindakan ini atau dilaksanakannya tindakan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sumber daya material, waktu, dan sumber daya sosial berupa informasi mengenai pranata pengangan konflik yang ada beserta aksesnya, ataupun berupa ketidaksimetrisan hubungan antara pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang merugi.

Tindakan yang kedua disebut sebagai *avoidance* atau penghindaran. Jika yang dipilih adalah langkah ini, maka yang terjadi adalah pemutusan hubungan antara kedua belah pihak. Pemutusan hubungan ini sendiri sebenarnya merupakan "hukuman" dari pihak yang dirugikan. Di sini, pihak yang memutuskan hubungan memiliki keberdayaan untuk memutuskan hubungan dengan pihak lain yang dirasa merugikannya.

Tindakan lain yang mungkin dipilih adalah *koersi* atau pemaksaan. Praktik tindakan ini dilakukan dengan pemaksaan pihak lawan untuk mengikuti kebenaran subjektif salah satu pihak. Kadang-kadang hal ini dilakukan dengan kekerasan. Ketiga tindakan di atas dikategorikan sebagai tindakan yang unilateral atau bersifat *self-help* karena ketiadaan pihak lain selain pihak yang terlibat dalam konflik. Tindakan lain yang bersifat *self-help* namun melibatkan kedua belah pihak adalah negosiasi di mana mereka sendirilah yang menentukan cara untuk

menyelesaikan konflik dan penyelesaian ini didasarkan atas kesepakatan bersama. Upaya ini bersifat bilateral.

Ada saatnya di mana pihak lain yang pada awalnya tidak terlibat dalam konflik kemudian menjadi terlibat karena memang dilibatkan oleh pihak yang terlibat konflik atau secara suka rela melibatkan diri didalamnya. Pada proses mediasi, misalnya, ada pihak ketiga yang terlibat didalam konflik yang terjadi dimana keterliBATANNya harus disetujui pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. KeterliBATAN ketiga pihak ini bisa karena permintaan pihak yang terlibat konflik.

Perlu dilihat juga keterbatasan pilihan tindakan dan hubungan kausal antara pilihan yang diambil dan konsekuensinya atas keterliBATAN pihak dalam konflik mengingat berbagai dimensi dalam konflik. Menurut Nader dan Todd (1978), struktur hubungan sosial berperan penting disini, struktur hubungan sosial ini terlihat dalam pola-pola dan tipologi hubungan horisontal dan vertikal dari para aktor dalam arena sosial. Persoalan siapa yang terlibat dalam konflik dalam banyak masyarakat sering lebih penting dari pada apa yang dilakukan aktor tersebut. Selain struktur hubungan sosial, ada dimensi penting lain dalam konflik, yaitu kontrol atas sumber daya yang terbatas.

Dimensi lain yang penting adalah aktor dan tujuan yang dimilikinya. Para pelaku ini membawa kepentingan dan motif masing-masing dalam arena interaksi ini. Tidak hanya pihak yang terlibat langsung tapi juga pihak yang (bersedia) terlibat atau dilibatkan. Tujuan atau motif ini akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Dimensi lain adalah keberadaan pranata hukum dan forum sebagai pirantinya. Pranata sendiri adalah berbagai aturan dan mekanisme yang disepakati bersama dan melembaga dalam masyarakat yang mengatur status dan peran para pelaku kegiatan dalam arena sosial. Akses menuju pranata dan forum ini berhubungan erat dengan kekuasaan dan status dalam struktur hubungan sosial. Forum ini memiliki pengertian yang lebih luas dari sekedar organisasi. Namun demikian, keberadaan pranata lain seperti kekerabatAN dan jaringan sosial dengan struktur organisasi tradisional dapat juga di manfaatkan sebagai arena penangan konflik.

Selain keberadaan pranata dalam suatu masyarakat, ada dua dimensi lain yang sifatnya lebih merupakan sumber pertimbangan praktis namun amat penting yaitu waktu dan biaya. Dengan pertimbangan biaya yang di keluarkan dan hasil yang akan dicapai, seseorang mungkin mengambil langkah untuk mengulur waktu dan menghindari atau bahkan segera menindaklanjuti konflik yang dihadapinya. Namun waktu juga dapat berfungsi sebagai penyelesai konflik di mana seiring dengan berlalunya waktu gunung es kedua belah pihak akan meleleh dengan sendirinya. Yang dimaksud dengan biaya disini bisa berupa material, fisik, emosi mapun psikologi. Kekurangan atau kerugian berdasar perhitungan biaya ini merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan pilihan tindakan dalam menangani konflik.

Satu dimensi lain adalah dimensi budaya, yaitu ideologi, nilai-nilai, pengetahuan dan sikap hidup. Faktor ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji konflik untuk mencari cara pandang mengenai diri atau *inner-view* dari pihak yang terlibat konflik. Namun demikian, hal ini tidaklah mudah dilakukan. Untuk sistem nilai bisa tertuang dalam pepatah yang berlaku dalam suatu masyarakat atau ungkapan tertentu yang sering diucapkan oleh baik laki-laki ataupun perempuan mengenai sesuatu hal ataupun petuah tua-tua dan tokoh masyarakat kepada anggota lain. Namun demikian untuk sistem nilai ini perlu juga dilihat hubungannya dengan sistem hukum nasional. Pertentangan antara nilai-nilai dan aturan lokal dengan sistem hukum nasional merupakan sumber konflik yang besar dan banyak terjadi di Indonesia.

#### **1.4.2 Sebab dan Dinamika Konflik**

Sebab Konflik dapat sangat beragam antara satu kasus dengan kasus yang lain, relatif jarang diakibatkan oleh satu sebab. Kebanyakan merupakan kombinasi dari masalah-masalah dalam hubungan antara pihak yang bertikai, dengan tingkat signifikansi yang berbeda. Teori konflik sangat menekankan sebab konflik pada tiga faktor (Perdue : 1986) yaitu *Pertama* : ketimpangan, eksploitasi dan Dominasi. Jika faktor ini muncul namun didukung oleh kekuatan represif negara seperti pada orde baru maka konflik tidak mengemuka, oleh karena itu fenomena konflik akhir-akhir ini disamping faktor ketimpangan, dominasi dan

eksploitasi melainkan juga adanya faktor perubahan politik dan pemberdayaan pada masyarakat (Prayogo : 2006)

Secara teoritik ketiga faktor ini dapat menyebabkan konflik antara negara dengan warga negara namun bagaimana tingkat signifikansinya itu yang sulit untuk diukur. Oleh karena itu ketimpangan, eksploitasi dan dominasi dapat dilihat sebagai sebab struktural sedangkan perubahan politik dan pemberdayaan dilihat sebagai sebab non-struktural. Faktor *pertama* ketimpangan dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan secara obyektif namun secara subyektif ketimpangan ini dapat muncul dari masyarakat karena melihat, mengukur dan ikut merasakan ketimpangan yang dapat mungkin terjadi pada komunitas mereka sejalan pelaksanaan proyek dengan melihat, menyaksikan dan mendengar informasi yang terjadi pada komunitas lain. Faktor *kedua* eksploitasi, dapat berwujud pengambil alihan baik secara paksa atau tidak atas obyek fisik lokal seperti hak warga atas lahan, atau dalam bentuk lain seperti penggunaan tenaga kerja lokal sebagai pekerja rendahan dengan upah rendah, serta dampak lingkungan (fisik dan sosial) yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek. Selanjutnya faktor *ke-tiga* yaitu dominasi, dapat dilihat bagaimana peran dan posisi pemerintah terhadap komunitas, dalam menyelesaikan konflik Faktor *ke-empat* adalah perubahan politik dimaksudkan sebagai perubahan sistem dan atmosfer politik sejak reformasi (politik) 1998, kemudian diperkuat dengan digulirkannya desentralisasi melalui otonomi daerah (1999). Faktor *ke-lima* pemberdayaan merupakan upaya penguatan posisi komunitas secara politis pemerintah. Gerakan ini biasanya dilakukan oleh pers atau NGO dalam bentuk penyebaran informasi, penguatan kesadaran serta bantuan advokasi. Dengan atmosfer yang baru perilaku politik di tingkat komunitas berubah menjadi lebih bebas. Komunitas dapat secara terbuka dapat lebih bebas, komunitas dapat secara terbuka mengemukakan aspirasi kepentingan mereka.

Selain sebab yang melekat dalam konflik juga tidak terjadi serta tapi mengalami dinamika yaitu 1) fluktuasi konflik 2) intensitas konflik, 3) eskalasi dan bentuk konflik 4) aktor dan lembaga yang terlibat. Ciri pertama yang cenderung melekat dalam konflik adalah adanya fluktuasi berkaitan dengan tahapan kegiatan proyek, yaitu –eksplorasi, pembebasan lahan, konstruksi dan

operasi-konflik cenderung meningkat pada tiap transisi kegiatan proyek. Hal ini terjadi karena pada tiap periode transisi terjadi perubahan yang pengaruhnya cukup besar terhadap kepentingan warga komunitas. Ciri kedua dari dinamika konflik adalah adanya intensitas yang berbeda. Tidak semua konflik berbentuk kekerasan (*Violent conflict*) atau sebaliknya non-kekerasan (*non-violentconflic*), namun jelas bahwa konflik dapat meningkat dari non kekerasan hingga kebentuk kekerasan. Peningkatan konflik ini dapat diprediksi dan semestinya ini negara dapat menduga akan terjadinya peningkatan konflik, namun kadangkala menyepelekan adanya indikasi awal. Ciri *ke-tiga* dari dinamika konflik adalah adanya eskalasi dan beragam bentuk konflik. Eskalatif konflik adalah gerakan peningkatan ketegangan hubungan antar pihak, eskalasi konflik merupakan indikator akan adanya peningkatan konflik. Ciri *ke-empat* adalah peran aktor dan lembaga, baik sebagai pendorong atau peredam konflik Aktor adalah para elit lokal maupun nasional, tokoh adat preman ataupun individu yang signifikan. Sedangkan lembaga mencakup organisasi pemerintah, NGO, pers organisasi masyarakat, Organisasi kemahasiswaan dan organisasi profesi. Konflik akan semakin rumit jika jumlah institusi yang terlibat dan berkepentingan semakin banyak dan lebih rumit jika antar kelompok kepentingan ini terjadi kompetisi.

#### 1.4.3 Relasi Negara dengan Warga Negara

Banyak teori tentang bagaimana negara berperan dalam pembangunan sosial dalam konteks relasinya dengan warga negara. Beberapa pendekatan untuk melihat relasi ini yakni pendekatan *Welfare economics*, *Neoliberalism* dan *institutionalist theory*. Pendekatan kesejahteraan ekonomi menekankan pentingnya peran sentral negara dalam mengatur relasi sosial dengan kepentingannya masing-masing. Sebaiknya dalam pendekatan neoliberal, justru peran negara dibuat seminimal mungkin guna memberi ruang kepada warga negara dan pelaku bisnis untuk berkembang menurut prinsip kebebasan dan efisiensi ekonomi. Ha-joo chan menyarankan prinsip ketiga dengan *institutionalist theory*, yakni mendorong *entrepreneurship* dan melakukan *conflict management*. Pada pendekatan ini negara berperan menjadi manajer yang memberikan jaminan atas hak kepemilikan serta penetapan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik

Dalam konteks Indonesia, Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, dari pembacaan terhadap pola dan karakteristik institusi sosial dan bisnis beserta relasi kepentingan politik yang mengitari “Indonesia” ini merupakan salah satu yang menyebabkan langgengnya kekuasaan “Orde Baru.” Karena semua pemangku kepentingan yang selama ini diuntungkan dari distribusi modal negara tersebut dengan segala cara dan daya upaya, akan mempertahankan rezim kekuasaan yang berpihak pada mereka. Dengan kata lain, analisis mengenai mengapa Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun, tidak semata karena kemampuan dia mempengaruhi orang atau alat-alat kekuasaan yang ada di tangannya, tapi juga oleh kelompok kepentingan yang selama ini diuntungkan kepresidenannya.

Konseptualisasi negara sebagai institusi seperti di atas membawa kita pada pemahaman bahwa Indonesia itu adalah Jakarta atau Pusat. Lain halnya dengan Michel Foucault yang melihat negara sebagai “seni memerintah” yang mencermati bagaimana kekuasaan negara tersebut digunakan dan dimanipulasi dari waktu ke waktu dalam relasi negara – warganegara. Dia menjelaskan bahwa dinamika relasi negara – warganegara ini sebagai *governmentality* yang mengacu pada tiga hal: *pertama* upaya pengembangan seperangkat institusi, prosedur, analisis dan refleksi, kalkulasi dan taktik yang memungkinkan praktik kekuasaan dalam bentuk yang terumit pun mungkin dilaksanakan. Targetnya adalah populasi, bentuknya adalah politik ekonomi, dan alat utamanya adalah aparatus keamanan. *Kedua*, semacam kontestasi bentuk kekuasaan sepanjang peradaban “Barat” (kedaulatan, disiplin, dll) yang secara terus menerus saling mengungguli satu sama lain, di satu sisi berkaitan dengan rangkaian aparatus ketatapemerintahan yang spesifik dan di sisi lain formasi keseluruhan kompleksitas kemampuan untuk bertindak atau berbicara dalam situasi sosial tertentu. *Ketiga*, merupakan proses, lebih dari sekedar hasil sebuah proses, yang melaluinya konsep negara kesejahteraan pada Abad Pertengahan, ditransformasikan ke dalam negara administratif selama abad lima belas dan enam belas, secara gradual menjadi ‘*governmentalized*’. (Foucault : 1991).

*Governmentality* mengacu pada pemapanan “seni memerintah” (*the art of governing*) yang mengintroduksi ekonomi ke dalam praktik-praktik politik. Memerintah suatu negara berarti menggunakan prinsip-prinsip ekonomi bagi

kesejahteraan seluruh warganegaraanya dan sekaligus menjalankan praktik kontrol dan pengawasan [surveillance] atas warganegaraanya (Foucault : 1991). Ada dua target dari *governmentality* ini yaitu “teritori” dan “penduduknya”. Dengan teritori mengacu pada kedaulatan dan dengan penduduk mengacu pada kesejahteraan (Foucault : 1991). Namun konsep ini kemudian sudah lama menghilang dari model “negara modern” sekarang ini. Meskipun perkembangan ilmu “seni memerintah” telah banyak berkembang secara ilmiah tapi arahnya sudah keluar dari konsep “kesejahteraan” (Foucault : 1991). Melalui pengaruh ilmu statistik dalam “ketatanegaraan” dan ekonomi, masalah ketatapemerintahan bergeser menjadi angka-angka dan proporsi-proporsi tertentu dalam tiap bagian persoalan penduduk (Foucault : 1991).

Chatterjee dengan lebih gamblang menjelaskan pengertian dan pergeseran konsep *citizen* (warganegara) ke *population* (penduduk). Menurut dia warganegara merupakan ranah teori sedangkan populasi merupakan ranah kebijakan (*policy*). Dengan warganegara dia memiliki hak dan kewajiban, sedang dengan populasi dia berubah menjadi angka-angka yang merupakan obyek dari kebijakan. Konsep populasi bersifat deskriptif dan empiris, sedang warganegara memiliki nilai normatif. Populasi bisa diidentifikasi, diklasifikasi dan dipaparkan secara empiris melalui survey dan sensus. Tidak seperti konsep warganegara, yang menyertakan konotasi etika partisipasi dalam kedaulatan negara, konsep populasi menyediakan aparat pemerintah dengan seperangkat instrumen yang bisa dimanipulasi bagi kepentingan kebijakan – ekonomi, administratif, hukum dan bahkan mobilisasi politik – yang bisa menjangkau sebagian besar penduduk suatu negara. Foucault menyebutnya *governmentalization* dari negara. Rezim kekuasaan pada zaman modern ini mengamankan legitimasinya bukan melalui partisipasi warganegara tapi dengan mengklaim sebagai penyedia kesejahteraan populasi dalam model gagasan analisis biaya dan laba (Chatterjee 2004: 34).

Dalam konteks pengelolaan sumber energi di Indonesia, pendekatan dan pemanfaatan sumber-sumber energi abai terhadap sisi normatif negara. Seolah hanya warganegara yang memiliki kewajiban menjalankan fungsinya untuk patuh pada peraturan perundang-undangan. Konsep *governmentality* ini menekankan aspek relasi negara dengan warganegara secara timbal balik. Politik energi sejak

Orde Baru adalah politik sentralistik, bahkan totaliter, yang di dalamnya berbagai kebijakan tentang energi nasional ditentukan oleh elite kekuasaan, yang mempunyai otoritas tunggal menentukan produksi, distribusi, dan konsumsi energi. Mereka tidak hanya mempunyai otoritas mengatur energi, tetapi sekaligus juga menjadikannya sebagai lahan pengayaan diri, dengan mengabaikan kepentingan publik sebagai subyek pembangunan energi-the subject of discourse.

Meski *governmentality* ini menyangkut adanya kekuasaan atas teritori tertentu sebagai indikasi sebuah negara, namun konsepsinya mengenai teritori tersebut dilihat sebagai sesuatu yang *taken for granted*, seperti sebuah peta yang memang sudah ada tanpa perlu diperbantahkan lagi. Pada hal bagi warganegara, teritorial tersebut tidak saja menyangkut areal jelajah, tapi juga menyangkut relasi kuasa yang menentukan akses sumber daya dalam teritori tersebut.

#### 1.4.4 Politik Energi Nasional

Sektor energi Indonesia terus mengalami perubahan yang dinamis dimasa-masa mendatang, mulai dari kebutuhan hingga bagian suplai energi. Penetapan total kebutuhan untuk pengembangan energi diperkirakan akan kontiniu, perhitungannya diambil dari faktor konsumsi perkapita terkecil dan pemakaian sumber daya energi terbarukan di suatu area perkotaan. Pada bagian suplai menunjukkan perbedaan dari gambaran itu, untuk beberapa tahun kedepan kebutuhan energi akan mengalami peningkatan hingga berbarel-barel. Kurangnya infrastruktur dan rendahnya iklim investasi merupakan indikator rendahnya suplai energi dalam negeri.

Dalam upaya mengatasi beban krisis energi pemerintah telah mempercepat program restrukturisasi sektor energi. Tujuan restrukturisasi sektor energi adalah memperbaiki efisiensi sektor energi melalui pengenalan sistem yang berorientasi kepada mekanisme pasar untuk menarik minat investasi swasta dan meletakkan dasar yang lebih baik bagi pembangunan yang berkelanjutan. Langkah-langkah utama yang dilakukan Pemerintah dalam mereformasi sektor energi adalah melalui penerapan Undang Undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang Undang Nomor 20/2002 tentang Kelistrikan, Undang-undang nomor 27/2003 tentang Panas Bumi, Undang-undang no 30/2007 tentang energi nasional beserta perangkat peraturan-peraturannya

### 1.4.3.1 Potensi sumber Energi nasional

Data dari tahun 1977 produksi minyak Indonesia yang mencapai 1,7 juta bph, tetapi lima tahun kemudian anjlok ke angka 1,2 juta bph. Sempat naik pada medio 1980-an ke angka 1,6 juta bph. Tetapi setelah itu terus berfluktuasi dan dalam empat tahun ini lantasi menurun. Tahun 2004 hingga September lalu baru ke titik 0,9 juta bph dan sekarang dari Kapasitas kilang dalam negeri yang terpasang 1.057 juta barrel per hari yang beroperasi antara 750-800 ribu barrel per hari.

Sedang alasan mendasar, mengapa gas bumi menjadi energi substitusi BBM paling tepat, yakni mengingat jumlah cadangan gas bumi Indonesia setara 4 kali lebih besar dari cadangan minyak sekitar 183 TCF atau setara dengan 31 miliar barel minyak. Dalam 5 tahun terakhir, produksi gas bumi mengalami kenaikan 13% dan gas yang masih tersimpan di bumi Pertiwi sekarang ini cukup untuk dipergunakan selama 62 tahun ke depan. Peluang gas bumi sangat cerah. Namun dari 8,35 BSCF yang di produksi perhari hanya 3,47 BSCF yang digunakan domestik dan 4,88 BSCF yang di ekspor.

Sementara itu produksi batubara Indonesia pertahun mencapai 140 juta ton. Bila dibandingkan dengan konsumsi dunia yang mencapai 5 milyar ton, prosentase batubara Indonesia hanya sekitar 2,8 persen. Masalah kebutuhan batubara untuk PLN ke depan lebih banyak dilihat dari berbagai sisi. Hanya untuk PLN saja akan meningkat menjadi sekitar 70 juta ton per tahun.. Dari total produksi batubara Untuk ekspor 107 juta ton batubara Untuk batubara domestik 36 juta ton.

Cadangan energi fosil Indonesia (status tahun 2004):

Jenis Energi	Sumber Daya	Cadangan Terbukti	Produksi (per tahun)	Perbandingan (Cadangan/Produksi)
Minyak Bumi	86,9 milyar barel	9,1 <sup>*)</sup> milyar barel	367 juta barel	23 tahun
Gas Bumi	384,7 TSCF	188 TSCF	3,0 TSCF	62 tahun
Batubara	57 milyar ton	19,3 milyar ton	130 juta ton	147 tahun
Uranium (Nuklir)	24.112 ton	3.000 MW	-	11 tahun

*\*) Termasuk Blok Cepu*

Tabel 1.1 Cadangan energi fosil Indonesia (status tahun 2005)  
Sumber DESDM (2007)

Sampai saat ini, pasokan energi kita masih didominasi minyak dan gas bumi. Dari total kebutuhan energi primer Indonesia sekitar 700 juta setara barel minyak (sbm), 54,4 persen dipenuhi dari minyak dan 26,5 persen dari gas bumi. Jadi, lebih dari 80 persen kebutuhan energi nasional dipasok dari migas. Karenanya, kemelut energi nasional tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keduanya.

Disamping sumber energi fosil yang cadangannya terbatas, Indonesia memiliki potensi sumber energi non fosil (non konvensional) yang besar terutama energi Air dan Panas bumi yang merupakan sumber energi terbesar di dunia.

Potensi sumber daya panas bumi Indonesia diperkirakan sekitar 27.000 GW. Potensi yang sudah dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik baru sebesar 807 MW. Sementara itu Potensi tenaga air di seluruh Indonesia secara teoretis diperkirakan sekitar 75.000 GW yang tersebar pada 1.315 lokasi. Dari potensi tersebut, diperkirakan sebesar 34.000 GW dapat dikembangkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas di atas 100 MW. Dari Pemetaan oleh LAPAN di 120 lokasi menunjukkan area-area potensial untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan sebagian kecil pantai selatan Jawa. Teknologi yang sudah diterapkan, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik Saat ini diperkirakan kira-kira 35 % dari total konsumsi energi nasional (khususnya di daerah perdesaan) masih berasal dari biomassa. Potensi biomassa yang terbesar berasal dari limbah kehutanan, perkebunan dan pertanian. Apabila dimanfaatkan secara optimal, dapat membangkitkan tenaga listrik sekitar 50 GW.

Energi Non Fosil	Sumber daya	Setara	Pemanfaatan	Kapasitas Terpasang
Tenaga Air	845,00 Juta BOE	75,67 GW	6.851,00 GWh	4.200,00 MW
Panas Bumi	210,00 Juta Boe	27,00 GW	2.593,50 GWh	800,00 MW
Mini/Micro hydro	458,75 MW	458,75 MW		84,00 MW
Biomass		49.81 GW		302,40 MW
Tenaga Surya		4,80 KWh/m/hari		8.00MW
Tenaga Angin		8,29 GW		0,50 MW

Tabel 1.2 Cadangan energi Non-Fosil Indonesia (status tahun 2005)  
Sumber DESDM (2007)

Mengacu pada data potensi energi nasional maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional untuk itu disusun kebijakan nasional di Bidang Energi Nasional

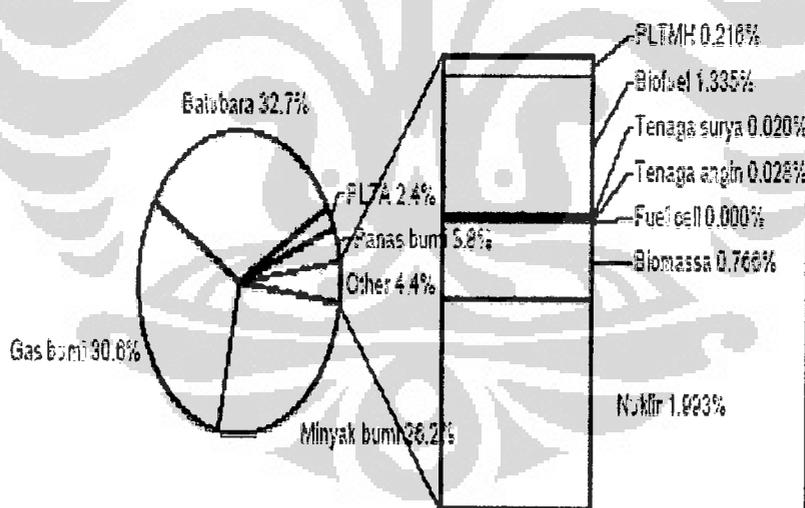
#### **1.4.5.2 Kebijakan Energi Nasional**

Indonesia sudah mempunyai Kebijakan Nasional di Bidang Energi yang tersusun dalam Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE). Hal ini diperlukan agar energi sebagai bahan bakar untuk pembangunan kesejahteraan sosial ekonomi rakyat dapat di dayagunakan dengan benar dan baik.

Tujuan utama pembangunan energi adalah; 1). Menjamin penyediaan energi di dalam negeri, baik dari sumber dalam negeri maupun dari luar negeri, sesuai perkembangan kebutuhan dengan harga yang layak dari pertimbangan nilai ekonomi, sehingga dapat menjamin pola penyediaan yang dapat dipertahankan dan dapat mendukung terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan; 2). Mengoptimalkan pemanfaatan energi untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang maksimal; 3). Menggunakan energi, baik pada kegiatan hulu maupun pada kegiatan hilir, secara aman dan berwawasan lingkungan, melalui pola pemanfaatan sumber daya energi secara efisien dan bijaksana; dan 4). Meningkatkan ketahanan nasional di dalam pengelolaan sistem energi, khususnya dalam menghadapi tantangan dan hambatan di dalam pemenuhan akan kebutuhan energi masa kini dan masa mendatang dengan mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang energi, serta fungsionalisasinya di Industri dan di dalam melaksanakan pengelolaan dan perencanaan energi.

Untuk melaksanakan strategi pembangunan, maka ditetapkan 5 (lima) kebijakan utama yaitu: (1). Melakukan penganeekaragaman jenis energi yang digunakan oleh setiap sektor pemakai; (2). Menciptakan iklim yang mendorong upaya penemuan cadangan tambahan dan baru; (3). Melakukan upaya konservasi di sisi hulu dan sisi hilir untuk kepentingan generasi mendatang; (4). Menerapkan konsep ekonomi pasar dalam pemanfaatan energi; dan (5). Memasukkan pertimbangan mengenai dampak terhadap lingkungan hidup pada setiap aspek pemanfaatan energi.

Secara rinci kebijakan yang ditempuh dalam pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi adalah; a). Menetapkan harga energi sesuai dengan keekonomiannya; b). Mendorong pengembangan infrastruktur energi terbarukan dan konservasi energi yang bertumpu kepada masyarakat; c). Memprioritaskan penggunaan energi terbarukan; d). Menerapkan prinsip-prinsip hemat energi dalam manajemen energi; e). Membudayakan sikap hidup hemat energi; f). Meningkatkan peran *stakeholder* dalam pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi; g). Meningkatkan kerjasama di tingkat nasional, regional, dan internasional, terutama dalam rangka akses informasi, pendanaan, dan alih teknologi; h). Mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri di bidang energi terbarukan dan konservasi energi; i). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang energi terbarukan dan konservasi energi; j). Mengembangkan usaha penunjang energi terbarukan dan konservasi energi di dalam negeri; dan k). Meningkatkan akses masyarakat terhadap energi<sup>3</sup>. Dengan kebijakan ini selanjutnya secara teknis disusun blue print energi nasional 2025 dengan kebijakan mengoptimalkan potensi sumber-sumber energi nasional dengan strategi *mix energy*.



Gambar 1.2 Skenario optimalisasi energi 2025

Sumber. DESDM (2007)

Dari skenario diatas terlihat bahwa dari total kebutuhan energi nasional, terdapat pemanfaatan energi nuklir sebesar 2 %.

<sup>3</sup> Blue print energi nasional

### 1.4.3.3 Arah kebijakan energi Nuklir Nasional

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, Indonesia akan mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan perdamaian, kesehatan, kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan untuk kepentingan kemanusiaan. Karena itu, Presiden meminta supaya tidak perlu takut kepada dunia internasional dalam mengembangkan teknologi nuklir itu. Sebab negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris masih memiliki nuklir yang banyak. Indonesia tidak akan mengembangkan nuklir seperti Korea Utara, Israel, Pakistan, dan India<sup>4</sup>.

Gagasan tentang kemungkinan pembangunan reaktor daya di Indonesia memenuhi kebutuhan energi nasional, muncul pada seminar tenaga atom pertama yang diselenggarakan bersama Institut teknologi Bandung (ITB) dan lembaga Tenaga Atom (LTA) di Bandung pada tahun 1962. sebagai tindak lanjut telah dilakukan bebrapa studi introduksi PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir) Indonesia secara efektif telah dimulai sejak tahun 1972 dengan pembentukan komisi persiapan pembangunan –PLTN (KP2-PLTN), perencanaan energi opsi nuklir dari tahun 1991 sampai 2007 dibagi dalam 5 periode.

#### 1) periode 1991-1996

Sesuai dengan keputusan Sidang Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) tahun 1989, badan tenaga nuklir (BATAN) di beri tugas melaksanakan studi tapak dan studi kelayakan PLTN (STSK-PLTN) yang pelaksanaanya dilakukan oleh konsultan utama Newjtec dari Jepang, dan telah dilaksanakan dari tahun 1991-1996. Salah satu pokok bahasannya adalah perencanaan energi nasioanal jangka panjang dengan opsi nuklir lengkap dengan studi ekonmi dan pendanaannya. Adapun ruang lingkup studinya : Analisis Neraca energi nasional, analisis sistem kelistrikan nasional, pemilihan kapasitas unit pembangkit listrik, estimasi biaya pembangunan PLTN, ongkos pembangkitan Listrik, strategi pendanaan. Adapun rangkuman hasilnya meprojektikan selama 30 tahun (1990 -2019) kebutuhan energi primer meningkat antara 6-7 %

---

<sup>4</sup> Suara Pembaruan, Jumat, 6 Juli 2007 hal 11 kol 1

pertahun. Merekomendasikan agar PLTN layak beroperasi pada tahun 2003/2004 dalam sistem jaringan listrik Jawa-Bali. Sampai dengan tahun 2019 kontribusi energi nuklir diperkirakan sebesar 10% dari kebutuhan energi nasional

2) Periode 1997 -1998

Untuk menjamin kualitas hasil studi terdahulu, telah diterapkan program jaminan kualitas melalui pelaksanaan re-evaluasi studi energi nasional jangka panjang dengan opsi nuklir yang dilakukan yang independen yaitu PT rakayasa Industri dibantu oleh konsultan surgent dan Lundy dalam optimalisasi dan analisis pengembangan listrik untuk jaringan Jawa – Bali.

3) Periode 2001 – 2002

Tujuan studi adalah untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan nasional dalam sektor energi dan listrik di Indonesia, dengan memperhitungkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, yang dilaksanakan melalui pengkajian secara komprehensif terhadap potensi berbagai jenis sumber energi dalam kontribusinya memenuhi pasokan dan kebutuhan energi nasional jangka panjang secara optimal dan konsisten untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dampak konflik ekonomi tahun 1998, proyeksi penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan gaya hidup serta teknologi yang mencerminkan kebijakan pemerintah sekarang sekarang merupakan pertimbangan penting dalam studi ini.

4) Periode 2002-2005

Pada periode ini disusun rencana aksi energi nuklir adalah *pertama* : memanfaatkan energi nuklir yang ekonomis, aman andal dan ramah lingkungan untuk mendukung penggunaan dalam sistem tenaga listrik di seluruh Indonesia. *kedua* mengembangkan sistem pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir antara lain peraturan perijinan

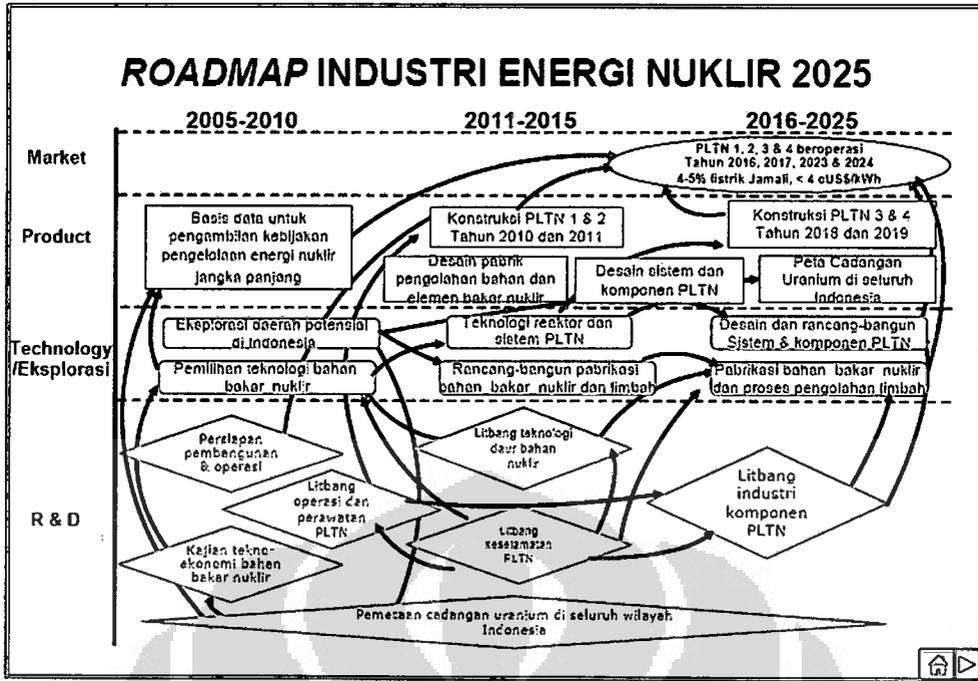
tapak, konstruksi dan operasi PLTN. *Ketiga* mengembangkan akses pasokan bahan bakar nuklir dan memacu partisipasi industri nasional dalam rangka tranfer teknologi.

5) Periode 2006 s/d saat ini

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan energi kelistrikan, antara lain : UU No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, UU no 30 tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Presiden no 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006, komposisi bauran energi (*mix energi*) yang diharapkan bisa tercapai pada tahun 2025 sesuai dengan Perpres tersebut adalah sebagai berikut : Minyak bumi 20%, batu bara 33%, bahan bakar nabati 5%, panas bumi 5%, sumber energi terbarukan lainnya (Biomassa, nuklir, air, surya, angin) 5% dan batubara yang dicairkan sebesar 2%.

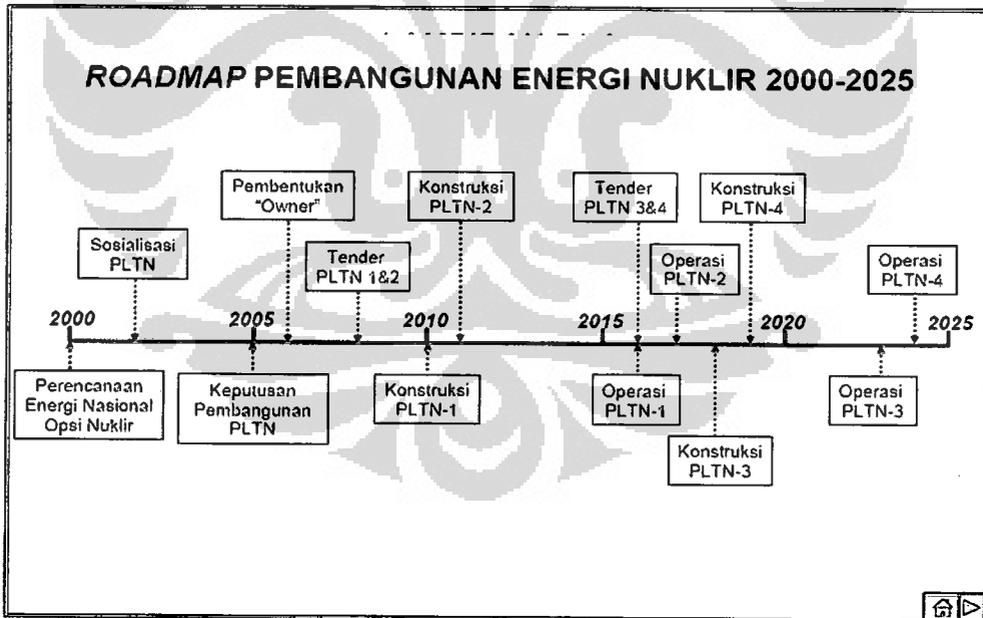
Indonesia sudah menandatangani sejumlah nota kesepakatan kerja sama bidang nuklir dengan beberapa negara. Rusia, Jepang, Korea Selatan, Canada, dan Amerika Serikat (AS). Semuanya tengah menjajaki kemungkinan menjadi vendor utama dalam pembangunan PLTN yang akan didirikan di Semenanjung Muria pada 2017 mendatang. Mengenai teknologi nuklir negara mana yang akan diadopsi baru akan diketahui setelah tender yang diselenggarakan pada kurun 2007-2008.

Berdasarkan perhitungan BATAN, PLTN akan menyumbangkan listrik dua persen dari total kebutuhan listrik Indonesia dalam 20 tahun ke depan. Pemerintah merencanakan konstruksi PLTN akan dimulai pada 2010, dan mulai beroperasi pada 2016.



Gambar 1.3 Road map Industri Nuklir 2025

Sumber : DSDEM (2007)



Gambar 1.4 Road map PLTN 2025

Sumber : DSDEM (2007)

#### 1.4.5 Kepemimpinan dalam konflik

Pemimpin memiliki peran yang amat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya untuk mengatasi konflik. Pemimpin dalam situasi konflik adalah pembentukan pola pikir yang baru, yang tidak dikuasai oleh definisi bahwa konflik sama dengan destruksi (Susanto : 1997). konflik sebagai “*turning point in history/life*”, suatu titik balik dalam kehidupan yang dampaknya memberikan pengaruh yang amat signifikan, bisa ke arah negatif, bisa ke arah positif, tergantung reaksi yang ditunjukkan oleh individu, kelompok masyarakat atau suatu bangsa.

Bagi seorang pemimpin konflik adalah *zero hour* dalam artian tidak ada waktu untuk berdiam diri lagi, melainkan harus segera melakukan tindakan tertentu. Ada desakan waktu terkait dalam definisi ini, bahwa penundaan suatu tindakan akan membawa konsekuensi negatif. Dalam definisi ini, tercermin suatu kecemasan, dan konotasi konflik menjadi lebih banyak dikaitkan dengan keruntuhan dan konsekuensi negatifnya. Seorang pemimpin tidak boleh menganggap konflik sebagai halangan, melainkan sebagai sarana pembaharuan. Memang di dalam konflik akan selalu terdapat adanya ancaman (*threats*) tetapi yang harus digali adalah peluang-peluang (*opportunities*) yang sebenarnya terbuka justru karena adanya konflik.

Konflik, yang disebabkan oleh permasalahan internal maupun eksternal meminta perhatian lebih dari para pemimpin organisasi. Pemimpin di sini tidak hanya diartikan tataran atas saja, tetapi juga pemimpin-pemimpin kecil di masing-masing departemen, pemerintahan daerah maupun bagian atau kelompok kerja. Konflik umumnya menyebabkan keteraturan kerja atau rencana tidak dapat lagi dipertahankan seperti semula. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat mengambil hikmah dari ketidakteraturan yang terjadi dan berupaya untuk mencari jalan keluar praktis yang mengacu pada tujuan holistik, yang tentunya sudah disesuaikan terhadap konflik yang dihadapi.

Tiga indikator tindakan kepemimpinan dalam konflik yang perlu diperhatikan : *speed, priority & flexibility*, *Speed* merupakan salah satu elemen utama, karena kondisi konflik membutuhkan kecepatan tindakan, dan tidak dapat menunggu perombakan strategi secara rinci. Namun kecepatan tindakan harus

didukung oleh ketepatan dalam memilih alternatif (*priority*). Selain kecepatan dan prioritas, konflik memerlukan adanya *flexibility* dalam artian memiliki tingkat “kelenturan” sampai derajat tertentu (Susanto : 1997).

Kondisi konflik biasanya menimbulkan beragam masalah sampingan dan efek berantainya kadang-kadang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Oleh karena itu, dalam menentukan prioritas, sebaiknya diperhatikan beberapa alternatif tindakan dan tidak hanya terfokus pada satu penyelesaian saja. Reorientasi terhadap aspek kecepatan, prioritas dan fleksibilitas tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena ketiganya saling melengkapi dan untuk memperoleh pola penyelesaian yang lebih mengena, ketiganya perlu dilengkapi dengan kreativitas dalam mencari upaya penyelesaian masalah, yang akan berperan banyak dalam menentukan alternatif-alternatif skenario penyelesaian yang dibutuhkan.

Dalam kondisi “normal”, peran penyusun strategi dan peran sebagai pemimpin perubahan masih dapat dibedakan dengan jelas sampai tingkatan-tingkatan tertentu, berdasarkan pada jenjang kepemimpinan yang diduduki. Akan tetapi, dalam masa Konflik, ketika kecepatan menjadi salah satu kunci sukses, fokus bergerak ke arah implementasi meskipun harus tetap dibekali dengan strategi yang tepat dan dilandasi oleh kekuatan informasi yang mencukupi. Oleh karena itu, kedua peran ini, yaitu peran sebagai penyusun strategi dan sebagai pelaksana seakanakan menyatu.

Fungsi penyusun strategi tidak lagi hanya mengutamakan penyelesaian konseptual saja, tetapi harus secara dini mampu menyusun dua macam strategi, yaitu strategi praktis dan strategi visioner sekaligus, agar tuntutan untuk tetap eksis dalam masa Konflik dapat dipenuhi dan tuntutan untuk terus melangkah ke arah impian masa depan juga dapat diteruskan. Meskipun demikian, cakupan tanggung jawabnya tidak cukup hanya sampai pada penyelesaian strategi saja, karena desakan waktu untuk segera dapat mencari jalan keluar, strategist ditantang untuk sekaligus dapat berperan sebagai inisiator dan sebagai pelaksana. Yang juga perlu diperhatikan adalah pembentukan kewaspadaan agar tidak terjadi fenomena manajemen yang sering disebut sebagai *inner court syndrome*, karena dalam kondisi Konflik hal ini akan sangat membahayakan semua kelompok. Biasanya para penyusun strategi dan pemikir dikategorikan sebagai *inner* dan *level* lini

pertama dan operasional dikategorikan sebagai *outer*. Kedua lingkaran ini saling terangkai dan saling mempengaruhi dalam implementasi organisasi sehari-hari. Yang ditakutkan dalam sindroma lingkaran inti ini adalah perkembangan peran seorang perencana yang merangkap juga sebagai pelaksana, yang akhirnya melunturkan orientasi berpikir dan orientasi bekerjanya ke arah operasi praktis sehari-hari.

Konflik biasanya menyebabkan para pemimpin terutama level atas lebih terfokus pada permasalahan-permasalahan yang bersifat ekonomi-politik. Oleh karena itu, dalam menghadapi kondisi semacam ini, level menengah ke bawah harus dapat lebih “mandiri” dalam menentukan pola perbaikan praktis dari berbagai permasalahan yang muncul, yang dapat langsung dijalankan tanpa menunggu perintah dari atas. Untuk itu, prinsip kepemimpinan diri sendiri *self leadership* perlu dihidupkan, dibina dan dikembangkan. Menyelesaikan permasalahan sendiri juga berarti harus mampu untuk dapat menghadapi konflik dengan percaya diri. Oleh karenanya, *peran sebagai decision maker perlu diperluas menjadi mediator internal, counselor dan problem solver*. Selain menghadapi konflik, biasanya Konflik mengarah pada penurunan keterikatan emosional karyawan dengan . Oleh karena itu, terutama bagi pemimpin pemimpin kelompok kerja, diperlukan kehandalan untuk dapat mempertahankan “attitudinal commitment” yang sesuai dengan “jiwa” dan budaya . Dalam kondisi Konflik pemimpin harus dapat mengoptimalkan kehadirannya dalam , dan membina diri secara cepat agar dapat melaksanakan multiperan, baik sebagai pemikir, pelaksana, pengawas maupun penasehat .

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat di definisikan sebagai *participant-observation* karena peneliti menjadi instrument utama dalam pengumpulan data dengan cara mengobservasi secara langsung obyek yang diteliti (Prasetya Irawan,2006). Pendekatan ini di pilih berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini memerlukan data yang bersifat informasi kualitatif, sehingga dapat memahami substansi dari konflik terkait dimensi konflik yang ada dan cara negara menormalisasi perilaku masyarakat dalam mengamankan berbagai ”kepentingan”

didalamnya. Pendekatan ini diambil dengan asumsi bahwa setiap konteks terkait dengan penelitian bersifat kritis sehingga masing-masing memberikan andil secara kontekstual terhadap data-data di lapangan. Penentuan informan dilakukan untuk menjangring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber (Moleong, 1993 : 165)

### 1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang akan dipakai untuk merumuskan kesimpulan-kesimpulan melalui model triangulasi<sup>5</sup>. Teknik-teknik pengumpulan data yang dipakai adalah:

#### a. *Observation of Participation.*

*Observation of participation* merupakan teknik pengumpulan data yang dimodifikasi oleh para ahli etnografi mutakhir seperti Tedlock (dalam Denzin & Lincoln;2005) dari teknik *participant observation* yang telah ada sejak akhir abad ke-19. Seabad yang lalu, *participant observation* dipakai oleh para ahli etnografi untuk meneliti suatu komunitas kecil dan berbudaya homogen. Tedlock mengatakan, untuk menggunakan teknik *observation of participation* yang sedang menjadi trend sekarang ini, seorang peneliti dituntut untuk memahami secara mendalam aspek-aspek kehidupan dari komunitas yang ditelitinya. Dengan kata lain, peneliti harus hidup dalam komunitas tersebut dalam kurun waktu tertentu (idealnya minimal 2 tahun). Tedlock meyakini pengumpulan data seperti ini mampu memberikan informasi dokumenter yang bukan saja “benar” (*true*), tetapi juga merefleksikan pandangan dari obyek yang diteliti terhadap realitas.

#### b. Studi literatur.

Dalam riset ini, penulis melakukan studi literatur dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu untuk memahami teori-teori tentang konflik. Tahap kedua mengumpulkan teori-teori dan regulasi yang berkaitan dengan regulasi dan

<sup>5</sup> Triangulasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data penelitian secara lengkap dengan melakukan kombinasi metode untuk memahami suatu fenomena

kebijakan energi nasional Tahap ketiga adalah untuk mengumpulkan semua diskursus yang berkembang sepanjang rencana pendirian PLTN

### c. *Indepth Interview*

Informan kunci sangat bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui keadaan masyarakat, beberapa informasi tertentu lebih mudah di peroleh secara individu daripada dalam kelompok akibat situasi konflik yang mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan individu terhadap pihak lain. Selain itu informan kunci berguna untuk memberikan umpan balik bagi peneliti untuk membuat interpretasi awal mengenai informasi tertentu.

Teknik wawancara yang digunakan adalah *emphatetic interviewing* yang sedang menjadi trend baru dalam penelitian kualitatif (Fontana dan Frey dalam Denzin & Lincoln;2005). Penulis menempatkan diri sebagai pewawancara yang berpartisipasi secara aktif (*active participant*) dalam interaksi dengan informan sehingga proses wawancara mengalir dengan 'kendali' kedua pihak (penulis dan informan) yang terpola oleh konteks dan situasi dimana wawancara dilakukan.

### 1.5.2 Analisis Data

Analisis data selanjutnya dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu *pertama* : mempelajari berbagai data yang tersedia dari berbagai sumber, baik yang didapat dari penelusuran dokumen, pengamatan, maupun wawancara (data primer). Pada tahap ini, data dikelompokkan dan dipelajari guna melihat relevansinya dengan aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian seperti konflik, dimensi konflik, peran negara dan bentuk-bentuk penyelesaian konflik.

*Kedua* : mengadakan reduksi data dengan jalan abstraksi, berupa rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga konsistensinya sehingga tetap dalam koridor tema penelitian. Pada tahap ini, peneliti membuat ringkasan terhadap substansi berbagai dokumen, salinan data lapangan, maupun transkrip atas wawancara informan.

*Ketiga* : membuat satuan-satuan dan kategorisasi, kategori didasarkan atas dasar pikiran, intuisi, pendapat dan kriteria tertentu data dan informasi yang diperoleh. Selanjutnya menempatkan data pada kategori aspek-aspek yang diteliti, misalnya, aspek yang di ungkap oleh informan terkait aspek dimensi konflik siapa saja, demikian pula terkait dengan aspek dan bentuk-bentuk penyelesaian konflik. Dengan membuat kategorisasi ini peneliti juga membuat ringkasan terkait mengenai keterangan atau pendapat kunci dari informan terkait aspek-aspek penelitian tersebut.

*Keempat*: melakukan pemeriksaan keabsahan data. Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang sudah di abstrasikan, disusun dalam kategori-kategori dan telah dilakukan penandaan secara konsisten. Peneliti juga melakukan triangulasi data primer dengan data-data dokumen lainnya.

Setelah tahapan-tahapan di atas, peneliti melakukan analisis data dan penafsiran data. Kemudian mengolahnya ke dalam pemaparan yang kritis bersifat deskriptif analitik. Deskripsi ini memuat sejumlah narasi mengenai proses, temuan dan kecenderungan yang menonjol dari hasil penelitian. Analisis akan memuat sejumlah narasi mengenai berbagai temuan terkait konflik pengelolaan konflik rencana pembangunan PLTN. Berbagai narasi mengenai temuan tersebut di uraikan sebagai hasil pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

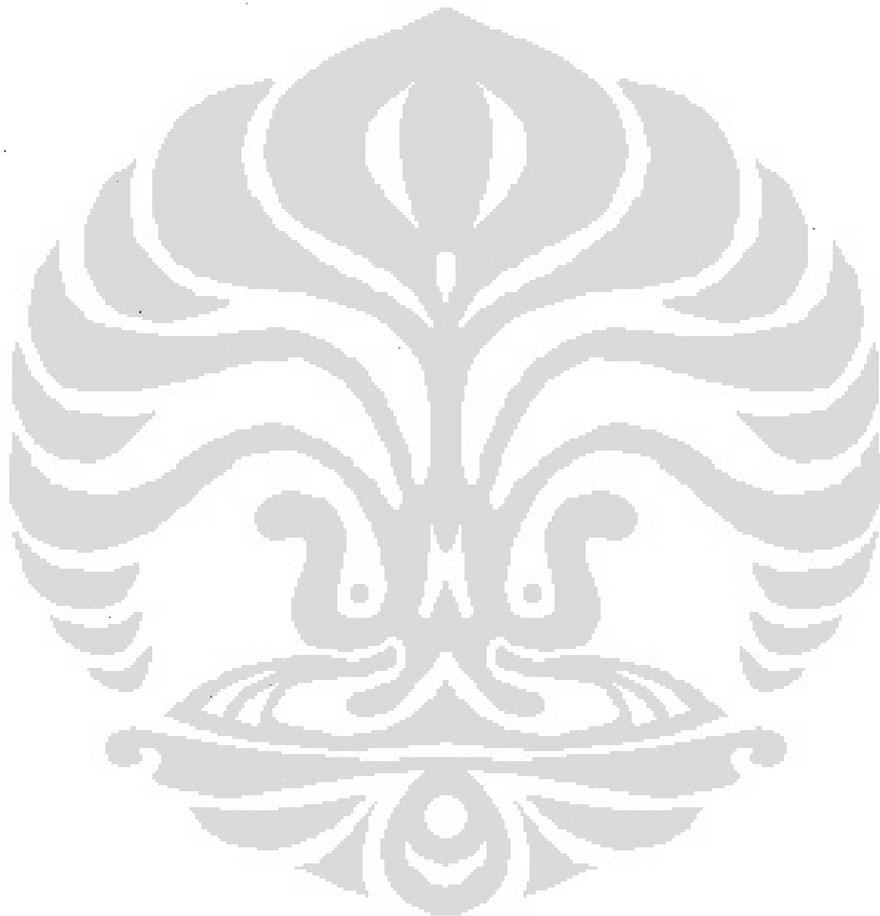
Penelitian tentang proyek PLTN di Muria ini di bagi dalam lima bab sebagai berikut :

**Bab I** merupakan Pendahuluan, mencakup uraian mengenai latar belakang penelitian dilakukan, permasalahan yang menjadi fokus studi, tujuan penelitian, tinjauan teoritik dan kerangka operasional konseptual/operasional yang menjadi bingkai penelitian, metodologi penelitian yang dipakai, serta sistematika laporan.

**Bab II** Mendiskripsikan sejarah pemilihan tapak PLTN dan gambaran lokasi penelitian termasuk warga negara yang menjadi lokasi penelitian

**Bab III** Membahas dimensi sebab dan dimensi dinamika konflik yang terjadi pada rencana pembangunan PLTN Muria serta membahas peran kepemimpinan dalam penyelesaian konflik proyek PLTN Muria.

**Bab V** Penutup, berisi kesimpulan temuan-temuan penelitian dan sejumlah saran yang dianggap penting terkait tema penelitian.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini mengambil *setting* sosial pada lokasi Proyek PLTN. yaitu di Dukuh Ujung Lemah Abang Desa Balong yang terletak sekitar 45 km arah timur laut dan pusat Kota Jepara. Tepatnya, kurang 1 km dari bibir pantai perairan Jepara. Luas lahan yang diperkirakan menjadi kawasan PLTN mencapai sekitar 200 ha, 2 yang terbagi menjadi tiga kategori kawasan, yakni kawasan merah (inti reaktor), kawasan kuning (bebas penduduk), serta kawasan hijau (jumlah penduduk terbatas). Lokasi Penelitian di Kabupaten Jepara dan Desa Balong dengan alasan, *Pertama* : Desa Balong tempat Dukuh Lemah Abang sebagai lokasi tapak menjadi daerah yang komunitasnya merasakan dampak langsung proyek PLTN. *Kedua*: sebagai proyek pemerintah pusat maka "kemarahan" komunitas yang ditumpahkan dalam berbagai bentuk seringkali disampaikan di Jepara sebagai ibu kota Kabupaten sehingga melibatkan masyarakat Jepara secara umum.

#### 2.1 Studi penentuan tapak PLTN

Studi pemilihan tapak telah di mulai sejak terlaksananya proyek studi kelayakan pembangunan PLTN (PSKP-PLTN), setelah melalui studi pendahuluan, maka pada tahun 1975 (workshop Karangates) telah berhasil dipilih 14 daerah calon tapak disepanjang pantai pulau jawa, yaitu 1) Tanjung Panjul 2) Tanjung Pontang 3) Tanjung Bungin, 4) Pedes, 5) Ujung Pamanukan, 6) Semenanjung Muria, 7) Lasem 8) Situbondo 9) Popoh 10) Pacitan 11) Pangandaran 12) Parigi 13) Pelabuhan Ratu Selatan 14) pelabuhan Ratu Utara. Selanjutnya ke 14 daerah calon tersebut dikompeticikan sehingga pada tahun 1979 (workshop Karangates) telah berhasil dipilih 5 daerah calon terbaik dengan urutan peringkat yaitu 1) Tanjung Panjul, 2) Semenanjung Muria, 3) Lasem, 4) Situbondo dan 5) Parigi. Pada tahun 1980-1983 dengan dibantu konsultan dari Italia telah dilakukan penilaian pemeringkatan ulang atas kelima daerah calon tersebut (BATAN-Nira Site Survey) dengan penilaian ini menghasilkan

Semenanjung Muria dengan tapak Ujung Watu sebagai kandidat terbaik. Selanjutnya selama empat tahun (1991-1996) dengan dibantu konsultan Newjtec, dilakukan penajaman penyelidikan pada daerah peringkat pertama hasil BATAN\_Nira yaitu daerah semenanjung Muria. Pada awal penyelidikan dilakukan sepanjang pantai utara Semenanjung Muria dari Ujung Piring hingga Ujung Watu sepanjang  $\pm 20$  Km, untuk mendapatkan dua tapak lain selain Ujung Watu. Penyelidikan menghasilkan 3 tapak yang layak dibangun PLTN di atasnya dengan urutan peringkat dari yang terbaik yaitu 1) Ujung Lemah Abang, 2) Ujung Grenggengan dan 3) Ujung Watu. Dengan demikian untuk pulau Jawa telah ditetapkan Ujung Lemah Abang sebagai pembanguan PLTN pertama. Adapun tapak Ujung Grenggengan dan Ujung Watu ditetapkan sebagai cadangan di masa depan

Dari penelitian itu kemudian lahir kesimpulan bahwa Ujung Lemah Abang telah bebas dari faktor-faktor penolak (*exclusion factor*), seperti patahan lempeng bumi yang dapat mengakibatkan gempa tektonik, letusan gunung berapi dan bahaya instabilitas fondasi. Sementara untuk studi sosial ekonomi budaya disimpulkan akan terjadi peningkatan ekonomi dan tenaga kerja sebanyak 83% dan 70% terutama untuk daerah yang berada pada radius 20-50 KM.

## 2.2 Kabupaten Jepara

Jepara sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada  $5^{\circ}43'20,67''$  sampai  $6^{\circ}47'25,83''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}58'37,40''$  Bujur Timur. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak.

Sebagaimana iklim di Indonesia, Kabupaten Jepara dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Menurut Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara, banyaknya hari hujan yang terbanyak adalah Kecamatan Nalumsari yaitu 122 hari sedangkan hari hujan paling sedikit terjadi di Kecamatan Tahunan yaitu 59 hari, curah hujan terbanyak adalah Kecamatan Bangsri yaitu 2,532 mm sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Jepara yaitu 1,397 mm.

### 2.2.1 Sejarah Jepara

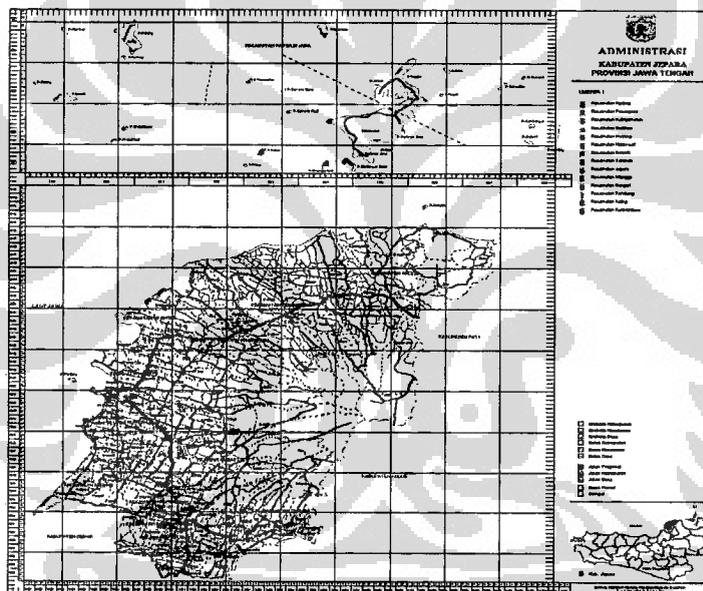
Nama Jepara berasal dari perkataan Ujung Para, Ujung Mara dan Jumpara yang kemudian menjadi Jepara, yang berarti sebuah tempat pemukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah. Menurut buku "Sejarah Baru Dinasti Tang (618-906 M)" mencatat bahwa pada tahun 674 M seorang musafir Tiongkok bernama Yi-Tsing pernah mengunjungi negeri Holing atau Kaling atau Kalingga yang juga disebut Jawa atau Japa, dan diyakini berlokasi di Keling, kawasan Jepara sekarang ini, serta dipimpin oleh seorang raja wanita bernama Sima atau Ratu Shima yang dikenal sangat tegas dan keras dalam memimpin rakyatnya. Namun menurut seorang penulis Portugis bernama Tome Pires dalam bukunya "Suma Oriental", Jepara baru dikenal pada abad ke-XV (1470 M) sebagai bandar perdagangan yang kecil yang baru dihuni oleh 90-100 orang dan dipimpin oleh Aryo Timur dan berada dibawah pemerintahan Demak. Kemudian Aryo Timur digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus (1507-1521). Pati Unus mencoba untuk membangun Jepara menjadi daerah/kota niaga.

Pati Unus dikenal sangat gigih melawan penjajahan Portugis di Malaka yang menjadi mata rantai perdagangan nusantara. Setelah Pati Unus wafat digantikan oleh ipar Falatehan yang berkuasa (1521-1536). Kemudian pada tahun 1536 oleh penguasa Demak yaitu Sultan Trenggono, Jepara diserahkan kepada menantunya yaitu Pangeran Hadiri suami dari Ratu Retno Kencono, namun pada tahun 1549 Pangeran Hadiri dibunuh oleh Aryo Penangsang akibat perebutan kekuasaan di kerajaan Demak setelah wafatnya Sultan Trenggono.

Kematian orang-orang yang dikasihi membuat Ratu Retno Kencono sangat berduka dan meninggalkan kehidupan istana untuk bertapa di bukit Danaraja. Setelah terbunuhnya Aryo Penangsang oleh Sutowijoyo, Ratu Retno Kencono turun dari pertapaan dan dilantik menjadi penguasa Jepara dengan gelar "Nimas Ratu Kalinyamat". Pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat (1549-1579), Jepara berkembang pesat menjadi bandar niaga utama di pulau Jawa dan menjadi pangkalan Angkatan Laut. Ratu Kalinyamat dikenal mempunyai jiwa patriotisme anti penjajahan, hal ini dibuktikan dengan pengiriman kapal perangnya ke Malaka untuk menggempur Portugis pada tahun 1551 dan 1574. Dan oleh orang Portugis

dijuluki “Rainha de Jepara” atau “Senora de Rica” yang artinya Ratu Jepara seorang yang sangat berkuasa dan kaya raya.

Selain itu Ratu Kalinyamat juga berjasa dalam membudayakan Seni Ukir yang sekarang jadi andalan utama ekonomi Jepara, yaitu perpaduan Seni Ukir Majapahit dengan Seni ukir Patih Bandar duwung yang berasal dari Negeri Cina. Mengacu pada semua aspek positif yang telah dibuktikan oleh Ratu Kalinyamat sehingga Jepara menjadi negeri yang makmur, kuat dan mashur, maka penetapan hari jadi Jepara mengambil waktu beliau dinobatkan sebagai penguasa Jepara, yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal Tahun 956 H atau 10 April 1549, ini telah ditandai dengan Candra Sengkala “trus karya tataning bumi” atau terus bekerja keras membangun daerah.



Gambar 2.1 Peta kabupaten Jepara

Sumber : Bapeda Kabupaten Jepara (2006)

### 2.2.2 Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara berdasarkan hasil Susenas 2006 adalah sebanyak 1.058.064 jiwa yang terdiri dari 532.459 laki-laki (50,32%) dan 525.605 perempuan (49,68%). Jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, pada tahun 2006, kepadatan penduduk Kabupaten Jepara mencapai 1.054 jiwa per km<sup>2</sup>. Penduduk terpadat berada di Kecamatan Jepara (2.995 jiwa per km<sup>2</sup>), sedangkan

kepadatan terendah berada di Kecamatan Karimunjawa (118 jiwa per km<sup>2</sup>). Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Jepara termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 699.422 jiwa (66,10%) dan selebihnya 308.867 jiwa (29,19%) berusia di bawah 15 tahun dan 49.775 jiwa (4,70%) berusia 65 tahun ke atas. Sedangkan besarnya angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Jepara adalah 512,73. Hal ini berarti bahwa setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung sebanyak 513 orang penduduk usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas.

### 2.2.3 Pendidikan dan Kesehatan

Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan (guru) yang memadai. Berdasarkan data dari kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dan kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara, pada tahun 2006 tercatat ada 765 SD/MI baik negeri maupun swasta, dengan jumlah murid sebanyak 126.538 siswa, sedangkan jumlah guru tercatat sebanyak 7.954 orang guru. Untuk sekolah setingkat SLTP (SMP dan MTs), tercatat sebanyak 156 sekolah baik negeri maupun swasta dengan jumlah murid 49.355 siswa dan 3.819 guru. Untuk sekolah menengah umum (SMA dan Aliyah) baik negeri maupun swasta tercatat sebanyak 66 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 18.389 siswa dengan 2025 orang guru.

Sedangkan untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta tercatat sebanyak 9 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 3.924 murid dan 347 guru. Bila dilihat di tingkat kelulusan EBTA, untuk tingkat SLTP, dari jumlah peserta EBTA sebanyak 6.805, yang berhasil lulus sebanyak 6.060 siswa (89,05%). Untuk tingkat SLTA lulus sebanyak 3.524 siswa (89,92%).

Sementara untuk kesehatan masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan kesehatan adalah menyediakan sarana kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas, baik dari segi finansial maupun lokasinya. Sarana kesehatan tersebut antara lain berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan tenaga kesehatan (medis/paramedis).

Pada tahun 2006 di Kabupaten Jepara terdapat 5 RSUD, 20 puskesmas, 45 puskesmas pembantu dan 39 balai pengobat. Selain itu sarana kesehatan lain yang berupa tenaga kesehatan adalah 72 dokter (umum dan spesialis), 238 bidan dan 209 tenaga paramedis. Fasilitas kesehatan lainnya adalah apotik dan toko obat yang tersebar di seluruh Kabupaten Jepara.

#### **2.2.4 Agama**

Sebagai daerah yang dikenal sebagai salah satu kota para wali maka mayoritas penduduk Jepara beragama Islam. Ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya tempat peribadatan di Kabupaten Jepara pada tahun 2006 mencapai 4.135 buah, terdiri atas : masjid, langgar dan musholla 96,83%; dan sisanya (3,17%) terdiri dari gereja protestan/katolik, vihara dan pura..

Disamping itu di Jepara juga terkenal dengan pendidikan pesantren dan menjadi Basis Nahdlatul Ulama yang cukup kuat, banyaknya pondok pesantren tercatat 196 buah, sementara jumlah guru pesantren sebanyak 3.112 orang, terdiri dari 2.249 guru laki-laki dan 863 guru perempuan. Adapun jumlah santrinya sebanyak 30.859 santri terdiri dari 17.106 santri laki-laki dan 13.753 santri perempuan

#### **2.2.5 Industri dan Ketenagakerjaan**

Menurut Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, banyaknya pencari kerja yang terdapat sampai dengan tahun 2006 sebanyak 13.591 orang, sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan Sarjana Muda ke atas (55,62%), setingkat SLTA (43,20%) selebihnya (1,18%) berpendidikan setingkat SD dan SLTP. Sedangkan penduduk Kabupaten Jepara berdasarkan lapangan usaha (sektor) dari data hasil Susenas 2006 sebagian besar berusaha / bekerja di sektor Industri (46,99%) dan Pertanian (16,15%), selebihnya berusaha / bekerja di sektor Pertambangan, Listrik, Konstruksi, Keuangan dan Jasa-jasa.

Sektor industri merupakan tiang penyangga utama daripada perekonomian Kabupaten Jepara. Sektor ini dibedakan dalam kelompok industri besar, industri

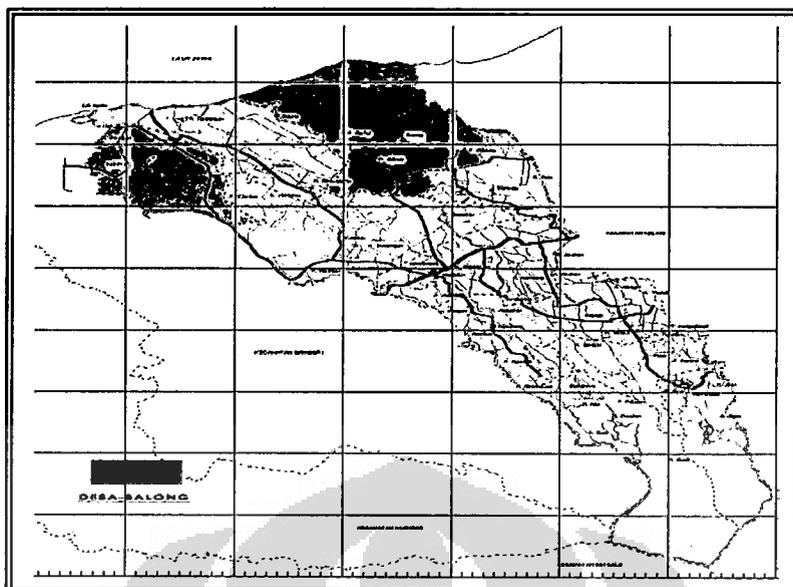
sedang dan industri kecil dan kerajinan rumahtangga. Menurut BPS, industri besar adalah perusahaan dengan karyawan / tenaga kerja 100 orang ke atas. Industri sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang. Industri kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang dan industri rumahtangga punya tenaga kerja kurang dari 5 orang.

Data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal, tahun 2006 menyatakan ada 12.944 buah perusahaan industri/unit di Kabupaten Jepara. Angka tersebut mencakup seluruh perusahaan (unit usaha) industri, baik yang besar/ sedang ataupun industri kecil/rumah tangga. Bila dibandingkan tahun 2006, terjadi penurunan jumlah unit usaha industri sebesar 20,31%.

Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Jepara terus diperlukan sejalan dengan roda perekonomian daerah. Energi listrik pada tahun 2006 ini sebagian besar dimanfaatkan/digunakan oleh rumahtangga yaitu 75,90%. Sedangkan untuk jumlah energi listrik yang terjual selama tahun 2006 adalah 272.471.162 KWH atau naik sebesar 13,67% dari tahun sebelumnya.

### **2.3 Desa Balong**

Desa yang terletak di kecamatan Kembang ini terdapat di pesisir laut pantai utara Jawa dan ±37 km dari Kota Jepara, Sampai dengan pertengahan tahun 1980-an masih terdiri dari kawasan perbukitan dan lembah sungai-sungai yang ditutupi hutan hujan tropis itu masih didominasi hamparan hutan alam yang lebat dengan segala keanekaragaman hayatinya. Diperkirakan belum ada aktivitas pengolahan dan pengelolaan sumberdaya alam yang tersimpan di dalamnya. Segala macam jenis hewan dan tumbuhan, yang sebagiannya kini sudah masuk kategori terancam punah, sampai dengan waktu itu masih hidup merdeka, terbebas dari eksploitasi masif oleh dan untuk kepentingan manusia. Klaim penguasaan terhadap kawasan itu masih dominan klaim teritorialitas ketimbang klaim tenurial.. Luas 1442,4 Ha termasuk didalamnya 462 Ha hutan negara, 608 Ha perkebunan negara yang terdiri dari perkebunan karet milik PTPN IX. Namun masih 200 Ha yang digunakan sebagai lahan pertanian penduduk



Gambar 3.2 Peta Kecamatan Kembang  
 Sumber : Bapeda Kabupaten Jepara (2006)

### 2.3.1 Penduduk

Jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 5141 Jiwa yang terdiri dari 2625 orang Laki-laki, 2516 orang Wanita, dengan 1516 Kepala Keluarga. Mata pencaharian utama penduduk yang berpendidikan rata-ratas sekolah Dasar ini adalah dari hasil pertanian terutama sebagai buruh tani. Warga desa Balong 95% terdiri dari etnis Jawa, sisanya adalah Bugis dan Sunda. Bahasa ibu yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Jawa halus, yang memperlihatkan karakter warga yang lemah lembut dan santun. Agama Islam menjadi agama mayoritas yang dianut warga Balong. sebagai salah satu tempat pertapaan salah satu sunan yaitu sunan Lemah Abang yang kemudian lebih dikenal dengan Syekh Sitti Jenar<sup>6</sup>. Warga balong adalah Islam Abangan<sup>7</sup> dengan tradisi thasawuf yang kental.

<sup>6</sup> Syekh Sitti Jenar atau Sunan Lemah Abang adalah salah seorang sunan yang ada dipulau Jawa yang dianggap murtad karena menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para sunan yang menjadi mainstream ajaran Islam saat itu .

<sup>7</sup> Clifort Gertz dalam bukunya *Religion of java* memetakan islam di Jawa menjadi 3 kategori yaitu Abangan, santri dan priyayi

### 2.3.3 Mata Pencaharian

Mata pencaharian didesa balong paling banyak sebagai Buruh tani yang bekerja pada perkebunan PTPN IX, disusul oleh karyawan swasta baik sebagai pegawai non pemerintah maupun sebagai buruh sewaan. Sementara untuk petani, karena lahan desa Balong sebagian di ambil sebagai lokasi perkebunan PTPN IX maka masyarakat yang hidup dari sektor pertanian tidak dominan, bahkan lebih banyak menjadi tukang kayu karena daerah Balong dan sekitarnya adalah penghasil Jati di Jepara.

Rincian mata pencaharian warga Balong adalah Petani sendiri 356 Orang, Buruh tani 570 Orang, Nelayan 5 Orang, Pengusaha atau wiraswasta 132 Orang, pengrajin 24 Orang , Buruh bangunan 69 Orang, karyawan swasta 467 Orang , PNS 17 Orang, TNI/polri 2 Orang, Pensiunan 64 Orang guru swasta 25 Orang Tukang batu 46 Orang, tukang kayu 405 Orang, Montir , pramu wisma 3 Orang, Sopir 52 Orang. Sebagian besar bekerja dan bermata pencaharian di desa Balong. Dari data tersebut terlihat komposisi mata pencaharian warga Balong cukup beragam.

### 2.3.3 Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Balong rata-rata tamat SD, hal ini dikarenakan akses pendidikan menengah yang tergolong jauh, sehingga membutuhkan biaya ekonomi yang tinggi untuk menempuh pendidikan SLTP walaupun beberapa tahun terakhir terdapat Madrasah Aliyah di Desa Balong. Untuk SLTA harus hanya terletak di ibukota kecamatan kembang yang relatif jauh. Rincian tingkat pendidikan, buta huruf 90 orang, tidak tamat SD 570 Orang, tamat SD 1321 Orang, Tamat SLTP 650 Orang, tamat SLTA 330 Orang, tamat D1 61 Orang, tamat Diploma-2 72 Orang, tamat Diploma-3 30 Orang dan tamat Strata-1 9 Orang.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peristiwa konflik adalah sebuah fenomena yang dapat diidentifikasi, dianalisis, dikategorikan, dipetakan dan diprediksi kedatangannya. Analisis tentang pola dinamika konflik ini merupakan kajian yang menarik karena berkenaan dengan antomi dari sebuah proses sosial yang menjelaskan peta bagaimana sebuah proses konflik berlangsung (Prayogo : 2006). Maka pada bagian ini membahas tentang bagaimana dinamika dan sebab konflik yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi dan peran kepemimpinan dalam mengatasi peristiwa konflik berdasarkan kerangka konseptual yang telah disusun serta penelitian yang telah dilakukan dilapangan.

#### **3.1 Dinamika Konflik**

Bagian ini memaparkan dinamika dalam konflik antara negara dengan komunitas lokal. Sebagaimana di sebutkan di muka dalam bahasan ini konflik negara-komunitas lokal dilihat sebagai sebuah proses sosial yang berlangsung dalam konteks sosial yang dinamis. Berpijak pada sejumlah hasil penelitian sebelumnya, terungkap bahwa konflik bukanlah sebuah peristiwa kebetulan melainkan ia memiliki karakteristik sebagai sebuah proses berpola. Sebelum sebuah peristiwa konflik terjadi telah muncul sejumlah indikasi kemungkinan peristiwa tersebut, namun seringkali indikasi ini tidak dipahami, dianggap sepele bahkan diabaikan.

Seperti telah dijabarkan dalam kerangka teori karakteristik dalam dinamika konflik di tandai oleh adanya faktor : 1) eskalasi dan bentuk. 2) Fluktuasi. 3) intensitas konflik 4) peran aktor dan lembaga, dan 5) Karakteristik lokal. Karakteristik lokal merupakan faktor baru yang ditemukan di sehingga dalam kerangka teori pada bab I faktor ini belum tercakup.

### 3.1.1 Eskalasi dan Bentuk

Eskalasi dan bentuk konflik merupakan dua hal yang terjadi secara paralel. Artinya eskalasi dalam ketegangan konflik dengan sendirinya membawa perubahan dalam bentuk konfliknya. Bentuk konflik dapat beragam, namun dapat diidentifikasi antara lain mulai dari bentuk yang paling ringan seperti rumor, keluhan, meningkat menjadi keresahan, laporan, tekanan, pengancaman, hingga ke bentuk demonstrasi massa, serta tindakan penyerangan secara fisik yang dapat menimbulkan kerusakan. Korban luka dan jiwa-atau sering disebut dengan *violent conflict*. Dengan demikian peningkatan eskalasi dan perubahan bentuk konflik adalah sejajar dan sejalan dengan peningkatan ketegangan hubungan antara kedua institusi yang berkonflik. Gerak eskalasi dan perubahan bentuk konflik menandai derajat konflik –atau sering disebut dengan jenis konflik– namun kadang hanya di bedakan antara konflik dengan atau tanpa kekerasan. Pola eskalasi yang digunakan di sini hanyalah satu dari sejumlah model, pada kenyataannya eskalasi kekerasan konflik tidak harus selalu berjalan berurutan menurut tahapnya melainkan dapat saja bergerak melompat antara tahap, misalnya dari tingkat ”keresahan” dapat saja langsung terjadi ”pengancaman”. Keadaan ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor seperti bagaimana respon negara, kuat-lemah dan banyak sedikit sebab konflik, manajemen dari pemerintah dan aparat lokal, ada tidaknya pemicu dan provokasi atau faktor lainnya. Namun secara umum gerak peningkatan konflik merupakan sebuah dinamika yang berpola dan dapat dipetakan serta di analisis perubahan (Prayogo : 2006).

Dari penelitian kami telah dapat diidentifikasi pola eskalasi dan bentuk konflik. Penetapan tapak lokasi PLTN telah dilakukan oleh pemerintah pusat Tahun 1992 sampai tahun 1995, Namun saat itu belum muncul konflik, hal ini di karenakan pada saat penelitian lokasi tapak pemerintah menurunkan aparat keamanan dan aparat birokrasi untuk mengamankan peneliti dan lokasi penelitian.<sup>8</sup> Hal ini masih sangat dimungkinkan karena rezim orde baru pada saat itu menggunakan tindakan represif untuk mengamankan semua kebijakannya. Demikian selama penentuan kandidat tapak PLTN tahun 1992 sampai dengan 2006, tidak muncul konflik dari warga Balong.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan I1, 15 mei

Konflik pertama kali muncul pada saat BATAN mendirikan tower klimatologi sebagai pemantauan perkembangan dinamika geologi dan iklim di desa Balong. Lokasi pembangunan yang mengambil lokasi tanah milik carik desa<sup>9</sup>, mulai di pertanyakan oleh warga.<sup>10</sup> kepada petinggi desa<sup>11</sup>, tidak mendapat jawaban yang memuaskan.<sup>12</sup>

Setelah berdirinya tower tersebut "rumor" akan dibangunnya PLTN di desa Balong beredar kuat, karena warga melihat di dirikanya tower tersebut sebagai simbolisasi pelaksanaan proyek PLTN. Dari rumor yang beredar kemudian berkembang "kekecewaan", proyek sedemikian besar yang akan dilaksanakan di Balong tapi warga tidak memperoleh sosialisasi sama sekali. Dari keadaan "kekecewaan" ini kemudian meningkat pada "tekanan" pada pihak-pihak yang menyetujui atau bersikap netral terhadap rencana pelaksanaan proyek ini. Tekanan ini mereka tujukan kepada petinggi desa dan camat kembang. Pola eskalasi ini berlangsung untuk semua kejadian sampai Juli 2007.

Pola yang relatif sama terjadi setelah kehadiran beberapa mahasiswa untuk melakukan sosialisasi PLTN di desa Balong. Mahasiswa yang datang dari beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta ini kehadirannya di tentang oleh petinggi desa karena tidak melalui prosedur formal berupa ijin dari Bupati atau camat namun warga bersikeras agar para mahasiswa di ijin untuk memberikan sosialisasi. Gerak eskalasi berasal dari "rumor" bahwa PLTN telah disahkan dengan UU untuk didirikan di Balong dan akan segera dilakukan pembebasan lahan. "Rumor" ini menimbulkan "keresahan" warga karena belum juga mendapatkan sosialisasi dari pemerintah mengenai nasib mereka kalau proyek PLTN ini didirikan, maka warga desa balong segera mengadakan "rapat" untuk membentuk paguyuban<sup>13</sup> yang kemudian dinamakan Paguyuban Masyarakat Balong (PMB). PMB ini lah yang menjadi wadah konsolidasi warga ketika muncul "rumor" terkait PLTN. Pada tahap ini eskalasi selalu bergerak

---

<sup>9</sup> panggilan untuk sekertaris desa

<sup>10</sup> Wawancara dengan I2, 12 Mei

<sup>11</sup> panggilan untuk kepala desa

<sup>12</sup> Pertemuan ratusan warga dengan kepala desa pada januari 2006 dibalai desa tidak menyepakati untuk menghadirkan pihak BATAN untuk memberikan penjelasan terkait berdirinya tower tersebut. Namun hinngga sekarang belum ada pihak BATAN yang turun sosialisasi terikait hal diatas.

<sup>13</sup> Paguyuban inilah yang kemudian menjadi payung warga balong yang menolak Proyek PLTN. Strukturnya dibuat dari tingkat desa sampai dengan RT/RW.

dari "rumor" menjadi "keresahan" kemudian meningkat menjadi "rapat" kemudian "demonstrasi". Eskalasinya menjadi masif apabila rumor yang muncul berkaitan dengan kehadiran pejabat pemerintah baik itu dari BATAN, Menristek bahkan anggota DPR-RI.

Dari pihak warga Balong melihat tidak ada respon yang baik dari pihak pemerintah sebagaimana yang mereka harapkan. Rapat-rapat warga kemudian selalu diarahkan untuk melakukan gerakan massa, merencanakan bagaimana demonstrasi massa dilakukan seperti merumuskan tuntutan, mekanisme gerakan dan pembagian tugasnya. Dengan demikian eskalasi konflik telah berubah menjadi gerakan terstruktur dan menjadikan PMB sebagai payung perjuangan. Karena pemerintah tidak memberikan respon sesuai yang diharapkan maka demonstrasi massa dengan berbagai modelnya terjadi pada beberapa momentum. Seperti kehadiran Anggota DPR-RI<sup>14</sup>, atau kehadiran wakil pemerintah pusat di Jepara serta beberapa momentum lain yang berkaitan dengan isu nuklir. Pada intinya gerak eskalasi dan bentuk konflik 2008 tahap pembebasan lahan untuk lokasi PLTN adalah : "rumor" → "Keresahan" → "rapat" → "Demonstrasi massa tanpa kekerasan". Perbedaan pentingnya adalah pada awal tahun 2006 sampai awal 2007 eskalasi konflik berakhir diancamkan dan cenderung tidak terstruktur. Namun sejak juli 2007 eskalasi konflik berakhir dengan demonstrasi tanpa kekerasan dan lebih masif serta terstruktur.

Dari gambaran proses konflik diatas jelas bahwa dinamika konflik berlangsung dalam gerak eskalasi dengan bentuk tindakan komunitas sejalan dengan meningkatnya ketegangan antara negara dengan komunitas, meningkatnya eskalasi dan perubahan bentuk konflik sangat tergantung pada beberapa hal. *Pertama* bagaimana respon negara, semakin rendah respon negara maka cenderung semakin cepat eskalasi konflik meningkat. *Ke-dua*, kuat lemahnya dan banyak sedikitnya sebab konflik, semakin kuat dan banyak sebab maka akan semakin cepat peningkatan eskalasi. Namun kuat lemahnya sebab, juga sejalan dengan tinggi-rendahnya tuntutan warga, semakin tinggi tuntutan tentunya semakin sulit negara memenuhinya. *Ke-tiga*, bagaimana peran pemerintah tidak

---

<sup>14</sup> Bulan 28 Juli 2008, warga balong berkumpul mendengarkan orasi dari Alvin Lie dan Sony keraf (anggota DPR-RI) kemudian tanggal 17 agustus 2008 upacara hari kemerdekaan di desa balong yang dihadiri Alvin Lie dan Faqih Chaeroni (anggota DPR-RI) beberapa anggota

cepat tanggap semakin cepat peningkatan eskalasi konflik. *ke-empat*, ada tidaknya pemicu dan provokasi, eskalasi konflik akan langsung meningkat jika ada pemicu bahkan dapat langsung menghasilkan lompatan eskalasi. Namun demikian, adanya pemicu dan provokasi tidak selalu dan secara langsung mendorong eskalasi konflik jika tidak ada sebab kuat. Dari gambaran ini dapat diidentifikasi eskalasi dan bentuk konflik dengan sifat dinamis yang bergerak dengan pola yang dapat diidentifikasi sebelumnya.

Dari paparan dapat diidentifikasi adanya pola eskalasi dan perubahan bentuk konflik, yakni adanya peningkatan eskalasi dan perubahan bentuk konflik sejalan dengan peningkatan ketegangan antara negara dengan komunitas lokal. Juga terlihat bahwa dinamika konflik negara dengan komunitas lokal adalah sebuah proses yang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan menjadi mengeras telah ada sejumlah indikasi dengan pola peningkatannya. "Rumor", dan "keresahan" merupakan indikator awalnya. Jika terjadi bentuk konflik dengan kekerasan yang optimum, maka berarti telah terjadi pengabaian terhadap gejala (indikator) awalnya.



**Gambar 3.1 PATOK BATAS**  
Pihak BATAN sudah menandai dengan patok batas yang akan digunakan untuk lokasi PLTN. Patok tersebut dibuat pada tahun 1990-an.

Sumber Budi Cahyono tahun (1997)

### 3.1.2 Fluktuasi konflik

Jika eskalasi konflik berkaitan dengan ketegangan hubungan dan bentuk konflik, fluktuasi<sup>15</sup> konflik merupakan kecenderungan gerak naik turun frekuensi konflik sejajar dengan tingkat ketegangan relasi negara dengan komunitas lokal. Fluktuasi konflik sangat berkaitan dengan tahap kegiatan proyek PLTN Serta kehadiran wakil pemerintah dan isu apa yang menyertainya.

Dari penelitian kami dilapangan dapat diidentifikasi kecenderungan konflik sudah dimulai pada tahap pembangunan tower klimatologi pada tahun 2006, meskipun proyek PLTN sudah berlangsung sejak tahun 1992 bahkan masuk ketika memasuki tahap penentuan tapak pada tahun 1995 belum terlihat kecenderungan konflik. Dan dapat diidentifikasi pada "rumor" akan dilakukannya pembebasan lahan berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi warga. Adanya "kesadaran"<sup>16</sup> sebagai pemilik lokal menjadi landasan berpikir bahwa sosialisasi dan kompesasi ekonomi atas pelaksanaan proyek harus menjadi prioritas untuk komunitas. Namun harapan ini tidak dapat dipenuhi oleh negara, mengakibatkan kecenderungan intensitas dan frekuensi konflik menjadi meningkat.

Pada tahap ini frekuensi konflik menjadi meningkat karena lebih banyak faktor yang menjadi sebab konflik, seperti "rumor", dampak radiasi nuklir yang tidak utuh di konsumsi oleh warga, retaknya komunikasi antar warga yang berbeda pandangan tentang proyek ini dan infiltrasi negara lewat pembentukan forum peduli lemah abang<sup>17</sup> yang dilihat warga sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memecah soliditas masyarakat di desa mereka. Rumor mengenai suap yang diterima oleh warga dari BATAN untuk menerima proyek ini dan sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah di sekitar desa tapi tak sekalipun dilakukan di desa Balong<sup>18</sup>. Pada periode ini konflik berlangsung cukup intens terutama terkait kehadiran wakil pemerintah pusat ke Jepara namun memasuki akhir 2007 dan awal 2008 intensitas cenderung menurun.

---

<sup>15</sup> Tingkat fluktuasi konflik dapat dilihat dari frekuensi konflik, yakni keseringan konflik pada satuan waktu tertentu, misalnya tahun.

<sup>16</sup> "kesadaran" ini diperkuat dengan dikeluarkannya UU otonomi daerah yang menegaskan sifat otonom satuan wilayah desa dan kabupaten.

<sup>17</sup> Forum ini dibentuk oleh masyarakat di sekitar lemah abang, yang menurut warga desa balong di indikasikan difasilitasi oleh BATAN. Wawancara dengan I6

<sup>18</sup> Wawancara dengan I5

Dari hasil wawancara mendalam dengan para informan membenarkan pada Juni 2007 sampai periode Februari 2008 terjadi kecenderungan peningkatan ketegangan konflik, utamanya terkait isu pembebasan lahan guna ijin tapak yang di rencanakan pemerintah tahun 2009. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah No 43 tahun 2006 tentang perijinan reaktor nuklir yang pada hakikatnya didasarkan pada perizinan yang telah dia akui secara internasional yaitu menyangkt izin tapak (*Site approval stage*), Izin Konstruksi (*Construction permit stage*), Izin komisioning (*commissioning lisenze stage*), Izin Operasi (*operating license stage*) dan Izin Dekomisioning (*Decomissioning license stage*). Tahapan selanjutnya diturunkan pada rencana jadwal pembangun Energi Nuklir 2000-2025.

Pada tahap Izin tapak yang didahului dengan Pembebasan lahan untuk tapak sekaligus Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang termasuk didalamnya studi kesiapan masyarakat disekitar lokasi proyek untuk menerima pelaksanaan proyek seharusnya dipersiapkan mulai tahun 2008. Pemerintah secara intensif mencoba melakukan sosialisasi ke masyarakat namun bersamaan itu juga sekaligus mendapatkan umpan balik berupa perlawanan yang di tunjukkan dalam berbagai model. Dalam presepsi masyarakat lokal mestinya pemerintah "memanusiakan" mereka dengan cara mensosialisasikan lebih awal proyek ini sebelum melakukan kegiatan tahapan proyek<sup>19</sup>. Perasaan tidak dimanusiakan ini muncul karena tiba-tiba saja ada pendirian riset klimatologi BATAN tanpa sepengetahuan warga secara menyeluruh, di tambah lagi pemerintah sengaja memfasilitasi didirikanya forum yang mendukung pendirian PLTN sehingga cenderung memecah belah kerukunan warga desa Balong. Selain pola komunikasi yang pemerintah yang cenderung elitis dengan hanya melakukan sosialisasi pada kalangan tertentu terutama aparat pemerintah dan guru-guru, yang justru berdampak pada semakin terpolarisasinya masyarakat di Desa Balong. Sehingga tidak aneh ketika pemilihan petinggi pada bulan Oktober 2007 warga memaksa calon petinggi untuk menandatangani penolakan PLTN di hadapan notaris.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan I5

Pada awal 2008 kecenderungan konflik menurun bersamaan dengan menurunnya aktivitas pemerintah untuk turun melakukan kegiatan di desa Balong baik itu sosialisasi maupun melanjutkan tahapan kegiatan proyek. Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya kelanjutan proyek PLTN ini paling tidak dalam waktu dekat<sup>20</sup>.

Dari paparan diatas jelas tergambar bagaimana fluktuasi konflik terjadi dalam kaitannya dengan peralihan kegiatan-kegiatan proyek. Perubahan tahapan kegiatan proyek akan berpengaruh pada stabilitas komunitas lokal. Utamanya rumor yang akan merugikan komunitas sehingga akan muncul kekuatiran dan presepsi negatif terhadap pemerintah maupun orang-orang yang di indikasikan mendukung pelaksanaan proyek PLTN. Secara umum permasalahan yang secara potensial bagi peningkatan fluktuasi konflik adalah : 1) Pada tahap pendirian kantor riset klimatologi BATAN. 2) tahap sosialisasi pemerintah pusat untuk pelaksanaan proyek izin tapak PLTN, biasanya di indikasikan kehadiran wakil pemerintah pusat ke Jepara. Setiap kehadiran wakil pemerintah pusat untuk kegiatan sosialisasi berhadapan dengan penentangan dari warga balong. 3) setiap momentum yang berkaitan dengan nuklir misalnya peringatan UU ketenaganukliran atau peringatan hari meledaknya PLTN Chernobyl di Ukraina.



Gambar 3.2 Kantor BATAN di desa Balong yang disegel warga

---

<sup>20</sup> Wawancara 17

### 3.1.3 Intesitas Konflik

Intesitas konflik merupakan faktor yang penting bagi identifikasi dinamika konflik- itu dapat juga di sebut sebagai indikator kunci- semakin tinggi intesitas berarti semakin tinggi tingkat ketegangan konfliknya. Dalam konflik negara dengan komunitas lokal, tingkat intesitas dapat di bagi dalam 3 golongan. golongan *pertama intesitas rendah* jika hanya berupa rumor, keresahan, dan laporan lisan dan tulisan. *ke-dua* disebut *intesitas sedang*, jika sudah terjadi tekanan pengancaman dan demonstrasi massa. golongan *ke-tiga* disebut *intesitas tinggi* jika konflik disertai dengan kekerasan fisik, pengrusakan fasilitas bahkan terjadi korban luka atau jiwa. Indikator utama dalam intesitas konflik memang terkait dengan faktor lain dalam dimensi dinamika konflik, yakni eskalasi dan bentuk, fluktuasi, peran aktor dan lembaga. serta karakter lokal. Peningkatan eskalasi adalah sejajar dengan peningkatan intensitas ataupun sebaliknya. Juga faktor karakter lokal yakni budaya dan organisasi lokal- dapat pula menentukan keras tidaknya konflik, semakin kuat dan banyak sebabnya cenderung semakin tinggi intensitasnya. faktor lain, tingkat intesitas ditentukan juga oleh bagaimana manajemen konflik dari aparat negara. Pada intinya intesitas konflik merupakan resultan dari sejumlah faktor yang menjelaskan bagaimana ketegangan konflik dalam relasi antara negara dan komunitas.

Pada paparan di atas telah disebutkan bagaimana peningkatan dan bentuk konflik yang berwujud dari mulai rumor hingga kekerasan fisik. Pada beberapa kejadian 2006 tingkat intesitas tertinggi adalah pengancaman dan demonstrasi massa dengan besaran yang kecil tanpa disertai pengrusakan fasilitas. Konflik pada saat itu tidak di ikuti oleh massa yang besar hanya melibatkan beberapa orang<sup>21</sup>. Hal ini disebabkan karena belum massifnya isu PLTN ini dan belum jelasnya kepentingan yang akan diperjuangkan. Secara umum pada periode ini intesitasnya dapat di golongkan rendah karena hanya sebatas pengancaman dan penekanan verbal saja tanpa ada kasus pengrusakan atau kekerasan yang terjadi.

Pada konflik tahun 2007 sampai awal 2008 tingkat kekerasan relatif tidak ada, namun diikuti oleh warga dalam jumlah yang besar sekitar 300-6000 warga terlibat pada setiap kegiatan penolakan proyek PLTN. Hal ini disebabkan dengan

---

<sup>21</sup> Wawancara I2 tanggal 12 Mei

makin masifnya pengetahuan warga mengenai dampak PLTN apabila terjadi keborocoran radiasi nuklir, yang di mulai dengan sosialisasi masif pada saat Istighosah yang dilakukan oleh sebuah LSM<sup>22</sup>, kemudian di ikuti oleh kehadiran mahasiswa di desa Balong untuk memberikan sosialisasi mengenai PLTN<sup>23</sup>. Dari tingkat kerusakan konflik ini relatif tidak ada hanya penyegelan kantor riset BATAN yang dilakukan dengan membuat tembok setinggi setengah meter sebagai simbolisasi penolakan warga terhadap proyek PLTN. Namun apabila dilihat dari jumlah massa yang terlibat maka konflik ini cukup mengejutkan dan menarik perhatian pemerintah dan dunia Internasional<sup>24</sup>. Jumlah massa yang turun dengan berbagai model aksi ini tergolong besar dan menarik untuk tingkat kabupaten Jepara. Keadaan ini paling tidak menunjukkan munculnya Kesadaran warga akan proyek PLTN ini.



Gambar 3.3 Spanduk penolakan PLTN. Spanduk serupa terdapat di hampir sepanjang jalan di Balong

<sup>22</sup> kegiatan sosialisasi penolakan PLTN yang pertama kali di lakukan dalam bentuk Istighosah sehingga mampu menarik warga dalam jumlah..

<sup>23</sup> Mahasiswa yang berasal dari berbagai macam perguruan tinggi atas nama Forum Solidaritas Mahasiswa Untuk Demokrasi (Fosmad) yang kemudian hingga thesis ini di buat masih berada di desa Balong. .

<sup>24</sup> Hal ini paling tidak terlihat dari kehadiran wartawan asing yang datang ke Balong dalam periode 2007 sampai 2008.

No	Waktu	Peristiwa	Issue
1	Januari 2006	Penolakan Tawaran PLTN yang disampaikan kepada utusan BATAN oleh beberapa orang warga.	Sementara PLTN masih dalam keadaan pro dan kontra, mestinya di selesaikan terlebih dahulu.
2.	Januari 2006	Pertemuan ratusan Warga dengan petinggi berdialog tentang PLTN dan pembuatan tempat riset.	PLTN belum tersosialisasi dengan baik kepada seluruh warga.
3.	Maret 2006	Intimidasi Camat terhadap tokoh masyarakat yang menolak PLTN.	Beberapa tokoh masyarakat Dianggap menghalang-halangi program pemerintah
4.	5 Juni 2007	Aksi akbar doa bareng, tolak PLTN yang dihadiri ± 3000 orang yang dihadiri beberapa seniman dan budayawan serta anggota DPR-RI dan dilaksanakan oleh LSM Masyarakat rekso Bumi (Marem).	Tolak PLTN -Urus lapindo saja tidak becus -Jawan Intevensi asing -Energi Nuklir energi berbahaya
5.	14 Juli 2007	Penolakan Petinggi kepada kepada mahasiswa yang datang untuk melakukan sosialisasi PLTN, dilanjutkan dengan dialog dengan warga.	Masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi tentang PLTN, terutama dari pihak diluar pemerintah
6.	23 Juli 2007	Pengumpulan massa dan Orasi penolakan PLTN saat kedatangan anggota DPR-RI anggota komisi VII.	Dana sosialisasi sebesar 5 miliar telah dianggarkan dalam APBN, namun masyarakat desa balong belum mendapatkan sosialisasi.
7.	17 Agustus 2007	Upacara 17 Agustus, Orasi dan pementasan wayang kulit, oleh dalang Ki Jiwo Tejo, yang dihadiri Oleh Yeni Wahid, Ketua PC NU Jepara serta beberapa Anggota DPR-RI komisi VII.	Meminta di robohkanya kantor riset BATAN Segai simbol dibatahkanya Proyek PLTN.
8.	28 Agustus 2007	Aksi massa menolak sosialisasi PLTN di tingkat Kecamatan	Sosialisasi pihak BATAN tidak memberikan informasi yang berimbang antara manfaat dan Mudarat PLTN.
9.	1 September 2007	Aksi 6000 obor berjalan kaki dari desa Balong ke Jepara sejauh ± 30 KM untuk menyatakan Penolakan PLTN kepada Menristek dan	Kekecewaan belum ditanggapinya secara serius harapan mereka terhadap

		Kepala BATAN yang hadir Di Jepara.	penolakan PLTN oleh pemerintah
10	30 September 2007	Istighosah yang dihadiri ± 1000 Orang untuk penolakan PLTN	Meminta keadilan kepada ALLAH SWT Untuk penolakan PLTN
11.	7 September 2007	Aksi penolakan PLTN oleh war ga	Tetap Tolak PLTN
15.	13 November 2007	Unjuk rasa meminta guru-guru yang menjabat di forum peduli lemah abang untuk mengundurkan diri.	Ada oknum guru yang mengintimidasi siswa untuk pro Proyek PLTN, sebab jika tidak maka akan dikeluarkan dari sekolah.
16.	25 Oktober 2007	Penanda tanganan perjanjian tolak PLTN bagi semua calon kepala desa dihadapan notaris.	Kepala desa Balong harus bersama-sama warga menolak PLTN.
17	30 November 2007	Unjuk rasa dengan Pameran kincir angin dalam rangka penolakan PLTN.	Simbol alternatif sumber energi, yang bisa digunakan selain Nuklir.
18.	2 Desember 2007	Pemutaran Film akibat Nuklir dan aksi berjalan kaki dari balong ke Jepara untuk menyambut kehadiran anggota DPR RI yang menolak PLTN.	Perjuangan penentangan PLTN harus terus dilanjutkan.
19.	28 Februari 2008	Menyegel kantor Riset Klimatologi BATAN	Simbolisasi berdirinya PLTN harus di runtuhkan
20	26 April 2008	Istighosah peringatan meletusnya reaktor nuklir Chernobil Di Ukraina	

Tabel 3.1 Peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi  
(di rangkum dari berbagai sumber)

Dari gambaran diatas intesitas konflik dapat dipetakan polanya. tinggi rendahnya intesitas terkait dengan sejumlah faktor teknis, sebagaimana di singgung diatas, yakni bagaimana fluktuasi, eskalasi peran aktor dan lembaga serta karakter lokal. Namun secara substansi intesitas ini sejatinya juga berkaitan dengan sejumlah faktor yang lebih besar lagi, yakni seberapa kuat sebab konflik, bagaimana respons negara serta bagaimana manajemen konfliknya. Semakin kuat sebab konflik, misalnya terdapat pelanggaran HAM berat, maka intesitas konflik cenderung semakin kuat. Demikian juga jika negara tidak atau terlambat memberikan respon atau bahkan mengabaikan gejala awal, maka intesitas akan semakin kuat karena biasanya tuntutan komunitas berkaitan dengan kepentingan

ekonomi rasional. Demikian pula halnya dengan manajemen oleh aparat jika terlambat, memihak dan sangat keras- bukan cepat, netral dan tegas- cenderung justru memperkuat intensitas konflik.

Intesitas konflik secara umum dapat diprediksi kemungkinannya dan sebenarnya aparat dan pihak keamanan negara cukup memahami kemungkinan ini, hanya sering kali pada level strategis manajemen internal tidak tanggap merespon kemungkinan peningkatan intensitas konflik, atau memang ada berbagai kepentingan lain yang terkait dengan konflik ini sehingga konflik merupakan sebuah "rekayasa " yang direncanakan atau sebuah skenario. Jika demikian yang terjadi maka ini merupakan kasus khusus. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa intesitas konflik merupakan cermin –atau sebagai indikator utama- dari dimensi dinamika konflik secara keseluruhan, semakin intensif kekerasannya maka semakin dinamis proses konfliknya. Kasus di atas dapat menunjukkan kemungkinan adanya variasi tingkat intesitas ini, namun secara umum tinggi rendahnya intesitas terkait dengan berbagai sebab, manajemen konflik, serta respon negara sendiri.

#### 3.1.4 Peran Aktor Atau Lembaga

Peran aktor dan lembaga dalam konflik negara dengan komunitas lokal merupakan faktor yang kehadirannya dapat berdampak positif atau sebaliknya negatif. Ada tidaknya aktor atau lembaga dapat memperkuat atau sebaliknya memperlemah atau bahkan meniadakan konflik, atau mempercepat atau memperlambat bahkan menunda konflik. Aktor atau lembaga yang dimaksud disini adalah *steakholder* yang signifikan dalam relasi konflik, mencakup antara lain tokoh masyarakat, aparat desa, aparat keamanan, tokoh politik, ulama, bahkan preman atau individu lain yang berpengaruh dalam hubungan konflik ini, sedangkan lembaga signifikan yang dimaksud mencakup lembaga desa (seperti RT, RW, BPD, Forum RW dan Desa), forum BPD serta lembaga seperti ormas, asosiasi, LSM, lembaga kepemudaan, serta yang juga penting adalah lembaga adat. Peran aktor dan lembaga ini sering menyatu atau tumpang tindih, sering kepentingan individu (aktor) diatas-namakan sebagai kepentingan lembaga namun tidak dapat sebaliknya.

Dari penelitian kami, lembaga sebagai bagian sangat menentukan eskalasi dan intensitas konflik. Kami mencatat ada lembaga yang secara langsung signifikan terhadap proyek ini. Yakni Paguyuban Masyarakat Balong (PMB), PC Nahdatul Ulama Jepara, Forum Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (Fosmad), Forum Peduli Lemah Abang dan Masyarakat Rekso Bumi (Marem). Paguyuban Masyarakat Balong adalah lembaga yang dibentuk oleh warga desa Balong pasca pendirian kantor riset PLTN, yang memiliki struktur dari tingkat desa sampai RT/RW. Fosmad adalah lembaga mahasiswa yang anggotanya berasal dari mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Mereka datang di Balong bulan Juni 2008, dengan maksud memberikan sosialisasi sekaligus melakukan pendampingan masyarakat untuk menolak PLTN<sup>25</sup>. Keberadaan menetap dan hidup bersama-sama warga menjadikan mereka kelompok yang berpengaruh dalam masa-masa konflik<sup>26</sup>. Forum Peduli Lemah Abang adalah lembaga pertama di tingkat masyarakat Balong yang dibentuk untuk menjadi forum konsolidasi masyarakat terkait proyek PLTN. Namun lembaga ini dilihat sebagai forum yang memfasilitasi kepentingan negara dalam proyek ini<sup>27</sup>, Sedangkan Marem adalah LSM lingkungan yang berkedudukan di Jepara dan mengadvokasi masyarakat pada konflik PLTN. Banyak lagi lembaga-lembaga yang memberikan fokus terhadap isu nuklir ini baik lembaga yang pada prinsipnya sudah ada dan memberikan perhatian pada proyek PLTN ini ataupun lembaga yang didirikan dengan khusus untuk proyek ini.<sup>28</sup>

Mengingat proyek ini belum jelas statusnya, -akan dilanjutkan atau dihentikan- maka lembaga-lembaga yang ada ini terus mempertahankan eksistensinya dan terus menerus memantau perkembangan proyek. Kecuali Forum peduli Lemah Abang yang di indikasikan sebagai lembaga bentukan BATAN untuk mendorong terlaksananya proyek ini pada tingkat komunitas<sup>29</sup>, mengalami "mati suri" tidak secara resmi di bubarkan akan tetapi tidak lagi melakukan aktivitas. Sementara itu peran lembaga-lembaga formal seperti BPD

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan I6

<sup>26</sup> Para Mahasiswa berada di Balong sudah selama 8 bulan ketika kami melakukan penelitian, dengan jumlah 14 orang dan melakukan sistem rooling grup untuk berjaga di Balong.

<sup>27</sup> Wawancara I2, I3 dan I6

<sup>28</sup> Lembaga yang ada dan focus pada kasus PLTN ini seperti Walhi, Percik atau lembaga yang didirikan untuk kasus PLTN ini adalah Masyarakat Tolak PLTN

<sup>29</sup> Wawancara dengan I6

forum RW atau Koramil, tidak mampu menjalankan aktivitas dengan baik karena dilihat warga sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Maka relatif hanya PMB yang menjadi alat perjuangan yang murni berasal dari masyarakat balong, dan Fosmad lembaga mahasiswa yang anggota berasal dari luar Balong tapi sementara berkedudukan di Balong, yang kemudian membentuk persekutuan baru dengan nama Koalisi Rakyat dan Mahasiswa Tolak Nuklir (Kraton).

Sedangkan secara individu atau tokoh masyarakat relatif tidak ada yang secara tunggal menonjol terkecuali ia bernaung dalam lembaga. Memang ada beberapa tokoh yang menonjol secara pribadi namun tidak secara langsung ketokohan itu muncul tunggal pada konflik PLTN ini. Pada awal-awal konflik tahun 2006 pada saat pendirian tempat riset BATAN, gerakan penolakan di inisiasi oleh beberapa tokoh lokal yang cukup berpendidikan. Dengan memperlihatkan sikap tegas secara pribadi namun tidak cukup menonjol karena terus mendapatkan tekanan dan ancaman dari camat atau petinggi desa. Oleh karena itu akhirnya di putuskan dibentuk lembaga, sebagai *Interest group*, selain untuk memperkuat kedudukannya juga sebagai alat pemersatu dan konsolidasi gerakan penolakan.

Semua lembaga ini yang memberikan perhatian kepada proyek PLTN, terutama lembaga-lembaga yang melakukan penolakan. tidak mengikatkan diri pada struktur yang sama. Dari wawancara kami dengan seorang salah informan semangat penolakan PLTN berangkat dari motivasi yang berbeda-beda. Ada yang berangkat dari semangat perlawanan terhadap kapitalisme dan Neoliberalisme. Ada aktor yang khawatir tidak dilibatkan dalam pelaksanaan proyek, atau merasa tersingkirkan, dan tidak dimanusiakan atau karena kekhawatiran terhadap konsekuensi yang menjadi beban lingkungan bila terjadi radiasi-terutama lembaga-lembaga di bidang lingkungan-. dan banyak motivasi lain yang menjadi latar belakang lembaga itu fokus pada isu PLTN.<sup>30</sup> Akan tetapi "kesadaran", agar gerakan penolakan ini dapat berlangsung dengan masif dan memperoleh perhatian yang serius dari negara bahkan dunia internasional, maka koordinasi gerakan pada momentum-momentum tertentu tetap dilakukan. seperti pada unjuk rasa

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan I2 dan I6

September 2008 yang melibatkan massa dalam jumlah yang banyak sekaligus melibatkan lembaga yang melakukan penolakan terhadap PLTN.

Peran lembaga-lembaga bisnis juga disebut-sebut terlibat dalam gerakan penolakan terhadap PLTN ini. Tidak ada bukti yang memperlihatkan keterliBATAN lembaga-lembaga ini secara langsung. Beberapa perusahaan memang pernah mengirimkan surat secara resmi kepada DPRD Kabupaten Jepara yang menolak keberadaan PLTN disana karena dapat menimbulkan *image*<sup>31</sup> bisnis yang merugikan bagi perusahaan<sup>32</sup>. Bahkan seorang informan menjelaskan bahwa secara personal beberapa pejabat perusahaan duduk sebagai anggota atau penasehat pada LSM-LSM yang terlibat pada penolakan proyek PLTN.<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan beberapa informan memang memperkuat dugaan keterliBATAN perusahaan-perusahaan disekitar muria terlibat dalam konflik PLTN ini.

Demikian pula keterliBATAN aktor politik dan partai politik dalam konflik ini. Berbeda dengan lembaga politik yang tidak terlihat keterliBATANya dilapangan, aktor dan partai politik secara terang-terangan memperlihatkan sikapnya terhadap Proyek PLTN. Terlepas apaun motif dari partai politik ataupun aktor politik sinergisitas dirasa perlu oleh warga Balong sebagai suport terhadap penolakan mereka Sebagai lembaga atau aktor politik tentu disadari bahwa kepentingan politik bisa menjadi motif dasar mereka<sup>34</sup>.

Jika pada periode 2006, konflik banyak didorong secara pribadi tokoh sehingga tidak terorganisir, tidak masif dan lebih sempit, maka pada mulai pertengahan 2007 setelah terbentuknya lembaga-lembaga anti PLTN ini maka gerakan penolakan menjadi lebih masif dan dikelola lebih terorganisir. Namun dengan beragamnya kelompok kepentingan yang ada, lembaga-lembaga ini lebih berperan sebagai "mobilisator" gerakan penolakan terhadap PLTN dari pada sebagai peredam konflik. Walaupun begitu lembaga-lembaga ini, disamping

---

<sup>31</sup> Di akui secara obyektif berdirinya PLTN tidak menimbulkan dampak langsung bagi perusahaan-perusahaan disekitar lokasi PLTN tapi bisa menimbulkan presepsi buruk terhadap produk mereka – terutama perusahaan rokok, makanan dan minuman-bahwasanya produk tersebut terkena dampak radiasi. Dan isu ini yang bisa memanfaatkan kompetitor perusahaan.

<sup>32</sup> Wawancara dengan I7

<sup>33</sup> Wawancara dengan I8 : mencontohkan salah seorang direktur PT Djaerum Kudus duduk sebagai penasehat pada LSM Marem

<sup>34</sup> Wawancara dengan I6

bertindak sebagai pendorong konflik sekaligus bertindak sebagai peredam terjadinya kekerasan. Karena disadari kekerasan dalam konflik dengan negara tidak produktif bagi gerakan penolakan. Secara keseluruhan jelas bahwa peran aktor dan lembaga memang tidak dapat diabaikan dalam dinamika konflik, artinya bagaimana eskalasi, bentuk serta intensitas konflik tidak terlepas dari peran aktor atau lembaga ini.

### 3.1.5 Karakteristik Lokal

Karakter lokal disini berkaitan dengan fungsi dua faktor penting, yakni organisasi dan budaya lokal. organisasi lokal yang dimaksud disini adalah berfungsi tidaknya organisasi komunitas seperti desa dan kecamatan serta organisasi adat jika ada, yang utamanya memiliki kaitan fungsi dengan aktivitas dan peristiwa konflik. Sedangkan budaya lokal adalah berfungsi tidaknya nilai, norma dan kebiasaan (tradisi) lokal berkaitan dengan perilaku kolektif komunitas atau khususnya dikaitkan dengan perilaku konflik.

Khusus berkenaan dengan budaya lokal, terdapat temuan menarik dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan. Bagaimana perilaku kolektif dapat dikendalikan sehingga tidak berkembang menjadi kerusuhan dengan kekerasan. Menurut sejumlah Informan adalah karena masih berfungsinya nilai-nilai budaya lokal yang bersumber pada ajaran agama (Islam) dan budaya stempat khususnya yang berkenaan dengan nilai dan norma sopan santun Jawa yang terkenal halus. Namun dapat saja berubah menjadi tidak terkendali apabila negara memberikan respon negatif terhadap tuntutan masyarakat.<sup>35</sup>

Secara umum warga masih menjunjung tinggi tata-krama. Budaya ini masih fungsional dalam perilaku bersama sehingga konflik tidak berkembang menjadi kekerasan. Dalam konteks ini budaya lokal dapat saja menjadi pendorong penolakan terhadap gerakan resistensi saat dirasakan ketidakadilan oleh warga, namun pada saat lain sekaligus berfungsi sebagai peredam konflik. Seorang informan mengatakan pada puncak tertentu dapat saja terjadi kekerasan bahkan keinginan untuk "makar" jika itu menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan I2 dan I4

respon yang serius dari negara<sup>36</sup>. Dari pengamatan dan hasil wawancara budaya dan tata krama masih berfungsi pada tingkat komunitas untuk meredam konflik.

Namun pada saat demonstrasi peran lembaga dan organisasi lokal disamping berperan sebagai pendorong konflik tapi juga menjadi peredam konflik sehingga demo massa dapat terkendali dan tidak terjadi kekerasan. Dalam situasi ini lembaga komunitas masih berfungsi sebagai pengatur perilaku kolektif, membuat tindakan bersama lebih terstruktur dan bertujuan namun terkendali. Kesadaran bahwa kekerasan akan membuat negara memiliki legalitas untuk mengintervensi komunitas secara hukum dan memaksa warga untuk patuh karena telah melakukan perbuatan melawan hukum membuat lembaga sangat berhati-hati dalam merancang aksi atau mengawasi semua perilaku warga komunitas<sup>37</sup>

Karakter lokal merupakan faktor yang cukup penting baik terhadap perilaku individu maupun perilaku kolektif dalam konflik. Pada tingkat individu, budaya dan organisasi lokal menjadi acuan moral dan pengorganisasian bagaimana "kekecewaan" dan emosi warga diwujudkan dalam tindakan resistensinya terhadap negara. pada tingkat kolektif, budaya dan organisasi lokal menjadi kerangka norma dan perilaku kolektif mewujudkan kekecewaan menjadi sebuah gerakan masif dan terarah untuk sebuah tujuan tertentu. dalam konteks ini ada-tidaknya dan berfungsi-tidaknya karakter lokal- yakni budaya dan organisasi

### **3.2 SEBAB KONFLIK**

Bab ini membahas dimensi sebab dari konflik yakni kondisi yang mendorong terjadinya konflik antara negara dan komunitas lokal. Dimensi ini berkenaan dengan sejumlah faktor, sebagaimana telah dipaparkan dalam kerangka konseptual, antara lain mencakup, ketimpangan, perubahan politik, eksploitasi, dominasi, dan pemberdayaan. Secara teoritik, konflik hanya akan terjadi jika faktor sebab signifikan. Namun adanya faktor sebab tidak serta merta menghasilkan konflik, melainkan konflik akan cepat dan keras mengemuka jika dilengfkapi oleh adanya faktor lain seperti pemicu, provokator, organisator atau mobilisator atau faktor lainnya. Namun sebaliknya, konflik sulit terjadi jika hanya

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan I4

<sup>37</sup> Wawancara dengan I6

disebabkan oleh adanya pemicu, provokator dan mobilisator, melainkan untuk terjadinya sebuah konflik diperlukan adanya faktor-faktor sebab yang secara signifikan menghasilkan keresahan, resistensi dan kemarahan komunitas.

### 3.2.1 Ketimpangan

Ketimpangan yang dimaksud disini utamanya pada ketimpangan secara ekonomi perlakuan dan sosial- antara negara dengan komunitas lokal merupakan keadaan yang sangat umum. Faktor ini akan menunjukkan dua realitas, bahwa *pertama* masyarakat di sekitar lokasi proyek yang masih tergolong miskin secara ekonomi. dan *kedua* proyek PLTN adalah proyek padat modal dengan teknologi modern yang jauh dari jangkauan masyarakat lokal untuk terlibat didalamnya.

Ketidakadilan secara ekonomi dan perlakuan nampak dilakukan oleh negara kepada aparat desa dan beberapa tokoh masyarakat, yang dianggap memihak pada pelaksanaan proyek PLTN, dengan memberikan fasilitas terhadap pembentukan lembaga berikut pelaksanaan program-programnya, dengan warga yang kritis terhadap pelaksanaan proyek ini<sup>38</sup>. Akibat lebih lanjut dari ketimpangan ini adalah secara vertikal menimbulkan pelapisan sosial antara warga yang pro PLTN dan kontra PLTN. Pemisahan ini kemudian secara horisontal menimbulkan konflik tersendiri antar warga, dalam berbagai model. Sebagai "pelampiasnya" mereka mempersalahkan negara, yang telah menjadi pokok persoalan sehingga ikatan sosial yang selama ini terbangun baik dan harmonis menjadi terganggu dan sering terjadi kesalahpahaman kalau menyangkut isu PLTN<sup>39</sup>. Meskipun batas-batas antara warga yang pro dan kontra PLTN tidak jelas benar tapi hal inilah yang justru membuat warga saling menaruh curiga terhadap sesama warga terutama diluar anggota PMB. Jangankan antar warga yang kontra dan pro sesama warga yang kontra saja sering kali muncul kecurigaan dan saling mengawasi<sup>40</sup>. Bagi masyarakat yang selama ini hidup dengan modal saling mempercayai dan mengayomi sebagai modal sosial untuk mengatur tata kehidupan mereka bersama, situasi yang semacam ini sangat

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan I2

<sup>39</sup> Wawancara dengan I2 dan I6

<sup>40</sup> Wawancara dengan I2

meresahkan. Bagi warga hal ini semakin mempertajam "dendam" mereka terhadap negara, yang selama ini bagi mereka memang tidak adil dalam memperlakukan warga negaranya.

Sementara untuk penggunaan fasilitas publik atau pelayanan publik yang lain tidak terjadi perbedaan bagi semua warga Balong. Yang menjadi masalah serius faktor ini muncul dalam bentuk ketidakpercayaan warga kepada negara untuk mengelola proyek tanpa "melukai" atau menimbulkan ketidakadilan dalam komunitas. Dengan terbukanya ruang komunikasi dan informasi maka warga Balong dapat melihat beberapa contoh lain, bagaimana negara mengelola proyek yang terkait dengan komunitas lokal. Dalam wawancara kami dengan beberapa informan, mereka sering mencontohkan kasus lumpur lapindo atau kedung ombo sebagai proyek yang telah membuat masyarakat diperlakukan dengan tidak adil<sup>41</sup>. Dengan *track record* negara dalam mengelola proyek yang bersentuhan dengan komunitas lokal yang buruk, sangat sukar untuk mereka bisa mempercayai negara, dapat berbuat lebih baik ketika melaksanakan proyek di lokasi mereka. Apalagi memang proyek ini sudah dimulai dengan gejala yang kurang transparan dan banyak yang ditutup-tutupi. Tidak adanya sosialisasi pada saat pendirian kantor riset klimatologi merupakan indikator yang tidak baik dari pemerintah dalam melaksanakan proyek ini. Sementara ketidakadilan ekonomi memang tidak terjadi karena tahapan proyek ini belum sampai pada tahap distribusi potensi-potensi ekonomi proyek kepada warga. hal ini tidak saja di temukan pada wawancara dengan masyarakat Balong tapi beberapa informan di luar komunitas juga meragukan kemampuan pemerintah secara institusi untuk melaksanakan proyek dengan resiko tinggi<sup>42</sup>.

Dari temuan ini dapat dicatat beberapa hal yang penting : *Pertama* : Ketimpangan walaupun tidak terjadi secara kongkrit namun warga dapat melihat, mengukur dan merasakan dengan contoh lain, bagaimana negara memperlakukan warga negara. *Kedua*, *Track record* negara yang tidak adil dan cenderung mengabaikan hak-hak warga negara dalam melakukan pengerjaan proyek yang lain telah meminimalkan "trauma" psikologis tersendiri bagi warga lokal untuk dapat mempercayai negara dapat melakukan proyek di tempat mereka dengan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan I2 dan I6

<sup>42</sup> Wawancara dengan I10

adil dan lebih baik. Sebagai akibatnya apapun yang akan dilakukan negara, selama tidak mampu memperlihatkan kepada mereka bukti bahwa pemerintah dapat mengerjakan proyek dengan baik dan tidak menimbulkan ketimpangan baik dalam ekonomi, perlakuan maupun secara sosial mereka akan terus menolak.

### 3.2.2 Perubahan Politik

Perubahan politik merupakan faktor yang khusus, yang dalam kaitannya dengan konflik antara komunitas dengan negara. Teori konflik hanya menekankan pada faktor ketimpangan, eksploitasi dan dominasi sebagai sebab terjadinya konflik. Faktor ini sudah ada pada prakteknya selama masa orde baru, namun konflik muncul dipermukaan atau mungkin hanya bersifat "tersembunyi" karena saat itu manajemen politik represif dan sentral. Dalam situasi seperti ini perubahan politik memberi peluang bagi manifestasi berbagai fenomena sosial laten dan ditekan kemunculannya dalam relasi antar institusi dalam masyarakat termasuk konflik.

Perubahan politik yang dimaksud disini adalah reformasi 1998 dan jatuhnya rezim Soeharto, kemudian berlanjut dengan digelarnya kebijaksanaan desentralisasi dengan pemberlakuan UU Otonomi daerah tahun 1999 –direvisi 2004- dan terakhir dilakukannya pemilihan kepala daerah langsung. Reformasi politik merupakan tonggak bagi perubahan politik berikutnya, jadi infrastruktur dasar bagi perubahan sistem politik dari otoritarian ke demokratik yang terbuka. Gelombang demokratisasi ini membawa anginperubahan dalam penegakan demokrasi yang menjadi visi utama setiap gerakan sosial yang ada terutama perlindungan di bidang hak sipil dan politik (Suharko : 2006). Namun penegasan desentralisasi dengan UU Otonomi daerah menjadi legalitas sekaligus legitimasi atas "otonomi masyarakat" terhadap pengaturan sumber daya –utamanya politik dan ekonomi – di tingkat lokal.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa fenomena umum yang terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia adalah reformasi politik menghasilkan proses demokratisasi yang kemudian mendorong desentralisasi sehingga keluarnya "otonomi daerah", selanjutnya demokratisasi dan otonomi daerah

mendorong tekanan bagi otonomi politik dengan sistem pilkada dan terakhir reformasi politik melahirkan kesadaran bahwa Otonomi daerah dan Pilkada menghasilkan kesadaran bahwa masyarakat lokal "memiliki otonomi lokal".

Dari penelitian kami dilapangan, konflik muncul setelah reformasi 1998, tepatnya tahun 2006 ketika tahapan proyek akan dimulai lagi. Sebelumnya walaupun tahapan proyek sudah dimulai akan tetapi, tidak terjadi konflik baik itu yang pribadi ataupun yang terkonsolidasi. Bahkan ketika para peneliti dari BATAN dengan konsultan Newjec Jepang menetapkan tempat mereka sebagai lokasi paling layak untuk PLTN dan kemudian memasang patok sebagai tanda kelayakan lokasi sekaligus menjadi pembatas area PLTN. Pada saat itu seorang informan mengatakan pemasangan patok dan kehadiran para peneliti selalu di kawal oleh aparat militer. Bahkan desa Balong di isolasi dengan melakukan identifikasi terhadap setiap orang yang keluar masuk Balong<sup>43</sup>. Penolakan terhadap PLTN pada saat itu tidak muncul dari masyarakat Balong sebagai lokasi tapak PLTN namun muncul dari para aktivis LSM dan tokoh dari luar Balong<sup>44</sup>. Selanjutnya oleh para aktivis anti PLTN disebut sebagai generasi pertama yang menolak PLTN<sup>45</sup>.

Praktek rejim represi Soeharto yang sangat sentralistik telah membuat warga tidak memiliki keberanian untuk menyatakan keinginan apalagi keberatannya. Dari hasil wawancara kami dengan para informan hampir semua membenarkan adanya faktor ini sebagai sebab lahirnya konflik baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa ungkapan muncul dalam potongan jawaban mereka : "masyarakat sekarang lebih bebas", "setelah reformasi masyarakat menjadi lebih berani", "keinginan masyarakat untuk mengungkapkan kengingannya sangat besar", 'Saya kira reformasi telah membuat masyarakat lebih terbuka mengakses informasi". Munculnya ungkapan-ungkapan ini memperlihatkan signifikansi yang kuat antara perubahan politik terhadap kemunculan konflik dan perlawanan terhadap negara. Perubahan politik membuat

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan I1

<sup>44</sup> Menurut Informan, Telah tiga generasi aktivis penolakan PLTN. Generasi pertama awal digagasnya PLTN tahun 1972, lalu generasi di tahun 1992 dan generasi ketiga tahun 2000-an

<sup>45</sup> Wawancara Dengan I6

masyarakat menemukan ruang yang lebih luas dalam mengungkapkan segala keinginannya dalam berbagai bentuk dan tidak seperti pada saat rejim orde Baru.

### 3.2.3 Eksploitasi

Faktor eksploitasi dapat berkaitan dengan dua hal, yakni eksploitasi secara obyektif dan subyektif, secara obyektif eksploitasi bermakna "pengambil-alihan" sumber daya, barang atau komoditas ekonomi lokal, seperti sumber alam, lahan, tenaga kerja. sumber ekonomi lain yang potensial atau dampak lingkungan yang merugikan (*natural depletion*). Secara subyektif eksploitasi adalah adanya persepsi kesadaran dikalangan warga komunitas berkenaan dengan kegiatan ekonomi atau proyek di wilayah mereka, bahkan secara subyektif dianggap melakukan "pengambil alihan" atau "pemerasan" kekayaan lokal dalam berbagai bentuk dan cara tanpa di imbangi dengan pertukaran secara adil dan seimbang atas pengambilalihan itu (Prayogo : 2006). Dengan dua makna interpretasi tersebut, eksploitasi menjadi kompleks untuk ditetapkan namun penting di bahas dalam kerangka konflik.

Dalam beberapa studi, konsep eksploitasi secara obyektif dikaitkan dengan masalah eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak bumi dan gas, bahan tambang, serta lahan produktif yang diambil oleh perusahaan untuk diperjual belikan. Terkait dengan upaya eksploitasi sumber alam diperlukan akuisisi lahan oleh terkait dengan pelaksanaan proyek seperti PLTN diperlukan akuisisi lahan oleh negara. Jika lahan tersebut memiliki makna penting, seperti lahan produktif, tempat tinggal, hutan lindung, atau lahan sakral maka proses akuisisi sering dengan paksa atau harga tanah yang tidak seimbang.

Dalam kasus proyek PLTN, pemahaman eksploitasi secara subyektif cukup dirasakan oleh warga komunitas. Belum terjadi akuisisi lahan oleh negara, karena tahapan yang direncanakan belum sampai pada tahap pembebasan lahan. walaupun akan terjadi terjadi pembebasan lahan oleh negara, maka sebagian besar lahan yang digunakan adalah milik PTPN IX<sup>46</sup> yang terdiri dari kebun karet. Hanya sebagian kecil lahan produktif warga yang direncanakan sebagai lokasi tapak PLTN yang akan di gunakan oleh proyek PLTN. Pada proses akuisisi lahan, karena

---

<sup>46</sup> BUMN milik pemerintah yang bergerak dibidang perkebunan dan pertanian.

sebagian lahan adalah milik PTPN IX maka prosesnya jauh lebih mudah karena aturan akuisi yang jelas. Namun tidak berhenti pada masalah lahan, karena pada PTPN IX itu juga mempekerjakan kurang lebih 1600 orang yang 361 orang berasal dari Balong orang- yang berprofesi sebagai buruh tani di perkebunan. Hal ini menjadi masalah tersendiri karena menyangkut sesuatu bersifat ekonomi rasional. Sebelum ada kejelasan tentang nasib buruh ketika PLTN mengambil alih lahan PTPN IX, tentu akan muncul resistensi tersendiri terkait pengambil alihan lahan tersebut.

Menjadi catatan penting adalah di tempat calon lokasi tapak PLTN menurut warga terdapat makam<sup>47</sup> Syekh Sitti Jenar atau Sunan Lemah Abang. Disamping itu dibibir pantai ada "punuk sapi"<sup>48</sup> yang diyakini tempat berubahnya Syekh Sitti Jenar dari Cacing menjadi manusia<sup>49</sup>. Kepercayaan ini diwariskan secara turun temurun dan telah menjadi identitas komunitas tersendiri. Dalam hal ini mengakuisisi lahan yang di atasnya terdapat simbol kepercayaan komunitas dipandang sebagai ancaman terhadap identitas komunitas. Identitas sakral, dalam beberapa kasus konflik negara dengan komunitas merupakan sebab utama dari terjadinya konflik, seperti kasus konflik hutan di Bulukumba Sulawesi selatan yang dilihat dapat merusak simbol-simbol masyarakat adat Kajang yang telah hidup dan memiliki kepercayaan terhadap identitas mereka. atau kasus konflik negara yang lain dengan beberapa masyarakat adat lainnya.

Dari hasil wawancara kami dengan para informan beberapa ungkapan yang warga sampaikan seperti : "warga merasa tidak ada kontribusi lokal dalam jangka panjang bagi warga dalam proyek dengan teknologi tinggi seperti ini, sementara dampaknya langsung dirasakan oleh warga setempat", warga menjadikan conto

---

<sup>47</sup> Tidak jelas benar maka yang disebut makam itu adalah tempat dikedumikannya jasad Syekh Sitti Jenar . karena terdapat banyak versi sejarah tempat syekh Sitti Jenar dikedumikan. namun ada juga yang menyebutkan bahwa itu adalah petilasan, yaitu tempat duduk yang dipakai sebagai pertapaan syekh Sitti Jenar yang kemudian ditanam dalam tanah. menamam tempat pertapaan ini memang lajim dilakukan oleh para pengikut para sunan yang ada di pulau Jawa sebagai bentuk ketatan kepada para suanan atau wali yang kemudian di tasbihkan sebagai makam sunan yang bersangkutan.

<sup>48</sup> Disebut punuk sapi karena bentuk tanah itu menyerupai punggung sapi. Punuk sapi yang terdapat di bibir pantai berasal dari tanah namun tidak pernah terkikis oleh hantaman gelombang pantai.

<sup>49</sup> Dalam salah satu versi cerita tentang syekh Sitti Jenar bahwa Sitti Jenar berubah dari cacing menjadi manusia

PLTU Tanjung jati sebagai kasus<sup>50</sup>. "Potensi masalah dampak lingkungan sangat besar", "Dampak lingkungan terjadi seperti di PLTU Tanjung Jati". Intinya ungkapan warga komunitas melihat terjadinya "eksploitasi", dan oleh sebab itu minimal dalam tahap awal warga dilibatkan secara umum faktor "eksploitasi" belum nampak keberadanya secara obyektif, namun warga dapat mengukur secara subyektif dampak eksploitasi yang berpotensi akan mereka terima kalau PLTN di laksanakan

### 3.2.4 Dominasi

Terkait erat dengan faktor eksploitasi adalah faktor dominasi, yakni bagaimana peran negara –yakni pemerintah melalui aparat keamanan terhadap masyarakat lokal terkait dengan kebijakan negara. Biasanya jika terjadi eksploitasi maka sudah dengan sendirinya menjelaskan adanya dominasi negara terhadap komunitas lokal melalui peran aparat keamanan. Namun hal demikian tidak selalu terjadi, eksploitasi dapat saja terjadi tanpa dukungan dari dominasi yang kuat dari negara. dominasi yang dimaksud disini adalah mengenai management relasi antara negara dan dengan komunitas lokal yang acap akali menggunakan cara paksa dan sepihak dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan. negara memiliki reputasi dengan *track record* yang panjang dalam menggunakan tangan aparat keamanan maupun aparat birokrasi dalam menyelesaikan masalah dengan komunitas.

Namun pada periode setelah orde baru, penggunaan dominasi dengan cara paksa justru tidak lagi produktif bagi penyelesaian konflik, bahkan menghasilkan resistensi yang kuat dari komunitas terhadap pemerintah. Dengan sistem politik terbuka, kontrol dari pers, NGO yang meluas serta keberanian masyarakat lokal sendiri meningkat, sehingga cara paksaan berangsur-angsur berkurang walaupun keadaan serupa masih ada beberapa praktek kebijakan. dalam banyak kasus seperti kasus tanah rumpin, kasus Kajang atau tambang Freeport, penggunaan kekerasan dalam mengakuisisi lahan milik warga justru tidak lagi efektif karena melahirkan resistensi dan kontraproduktif .

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan I2

Dari penelitian kami di lapangan, praktek dominasi ini cenderung sudah sangat menurun sejalan dengan kejatuhan rejim Orde baru. Pada saat tahapan penelitian lokasi tapak PLTN tahun 1992 ketika rejim orde baru berkuasa, para peneliti dari BATAN dikawal oleh aparat keamanan dengan mengisolasi lokasi desa Balong sehingga tidak dapat di akses oleh semua orang kecuali yang d beri ijin oleh aparat keamanan<sup>51</sup> demikian juga pemasangan patok untuk batas lokasi tapak PLTN ikut melibatkan aparat. demikian setiap aktivitas proyek PLTN pada masa orde baru mendapatkan pengamanan khusus dari aparat keamanan baik dalam skala lokal komunitas maupun dalam skala nasional berupa pengaman kebijakan. Akibatnya perlawanan tidak muncul dari komunitas lokal, penentangan hanya muncul dari beberapa tokoh nasional namun terdengar "sayup-sayup" .

Pada masa setelah orde baru praktek dominasi tidak lagi nampak secara mencolok seperti pada masa orde baru. Hanya pada awal-awal tahun 2006 setelah pendirian kantor riset klimatologi BATAN, upaya dominasi berupa pengancaman ataupun tekanan sempat dilakukan oleh aparat birokrasi, yaitu camat dan petinggi desa kepada beberapa tokoh masyarakat yang mempertanyakan proyek PLTN<sup>52</sup>. namun hal ini tidak berlangsung lama sejalan dengan meningkatnya "kesadaran" masyarakat terkait kebebasan mengungkapkan pendapat, dibarengi dengan semakin masifnya gerakan perlawanan maka tekanan dari pemerintah desa dan kecamatan juga menghilang. Meskipun begitu masyarakat Balong menyadari bahwa dominasi ini dapat "berganti rupa" dalam berbagai bentuk seperti turunya aparat kepolisian di Desa mereka pada masa-masa puncak konflik dengan alasan operasi minuman keras<sup>53</sup>. Cara ini sedikit banyaknya telah membuat warga Balong terintimidasi.

Dari uraian diatas jelas terlihat praktek dominasi merupakan bagian dari praktek negara pada proyek yang melibatkan komunitas lokal. Meskipun pada saat ini nampak belum terlihat dengan empiris namun kemungkinan akan muncul praktek itu tetap terbuka seiring dengan agenda politik energi nasional. termasuk kepentingan ekonomi politik global yang dapat menekan pemerintah untuk segera

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan I1

<sup>52</sup> Wawancara dengan I2

<sup>53</sup> Wawancara dengan I1, I2, I4 dan I6

mewujudkan rencana proyek PLTN. Meskipun sampai saat ini faktor ini tidak signifikan muncul pada masyarakat lokal.

### 3.2.5 Pemberdayaan

Jika ketimpangan, eksploitasi dan dominasi merupakan faktor yang berpusat pada negara maka pemberdayaan adalah konsep yang berpusat sebaliknya pada institusi komunitas lokal. berberda dengan pengembangan komunitas, gerakan pemberdayaan sejatinya adalah gerakan penguatan institusi terhadap *steakholdernya*, dalam hal ini adalah komunitas lokal dan pemerintah (pusat dan lokal). tentunya komunitas lokal tidak mampu melakukan pemberdayaan sendiri, peran fasilitator dari berbagai lembaga sangat di perlukan, umumnya beberbentuk

Lembaga swadaya masyarakat atau NGO dalam bentuk bantuan advokasi dan pendidikan poltik dan sosial, pers melalui pemberitaan dan analisisnya, serta kampus melalui publikasi dan pendidikan formalnya (Prayogo : 2006). Tiga sektor ini merupakan kekuatan yang muncul dalam berbagai wujud namun menyesuaikan diri terhadap atmosfir politik setempat Saat orde baru berkuasa, pengekanan terhadap bentuk dan gerakan koreksi ditekan dengan paksa. selama lebih dari 32 Tahun hampir tidak ada celah yang berarti bagi gerakan kaum perlawanan, walaupun ada selalu terhenti oleh kekuatan represif rejim. Dalam kondisi seperti ini gerakan-gerakan pemberdayaan menggunakan berbagai format dan wujud, dan tidak secara langsung menunjukkan kegiatan pokok mereka, misalnya yang paling umum di gunakan gerakan pelestarian lingkungan atau pembelaan hak adat atau budaya. Dibalik gerakan seperti ini dilakukan pendidikan dan advokasi bagi perubahan terhadap ketidakadilan baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun negara.

Pada kasus di Balong NGO ditingkat lokal yang melakukan pemberdayaan muncul mulai tahun 2006 sebagai forum yang bersamaan dengan konflik ini pertama kali muncul di permukaan. NGO seperti Forum Lemah Abang diawal pembentukanya di maksudkan untuk memberikan sosialisasi terhadap berdirinya PLTN di Balong, akan tetapi belakang karena dindikasikan tidak bertindak sebagai konrol yang berimbang terhadap situasi konflik di Balong karena cenderung menuntut sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan proyek ini. Hal

inilah yang mengakibatkan Forum ini tidak mendapatkan simpati dari masyarakat yang kontra PLTN bahkan justru menjadi sasaran tekanan dan ancaman dari komunitas. Selanjutnya pada pertengahan 2007 berdiri LSM yang paling berpengaruh adalah Paguyuban Masyarakat Balong (PMB). Pada prakteknya PMB lebih bersifat sebagai tempat koolesolidasi bagi perjuangan untuk melakukan penolakan terhadap proyek PLTN dari pada sebagai fungsi kontrol dan koreksi terhadap proyek ini. Di Jepara sendiri LSM yang fokus pada proyek ini adalah Masyarakat Rekso Bumi (Marem), yang menjadi sandaran bagi komunitas pada proyek ini terkait dengan kebutuhan komunitas akan jawaban teknologi bagi PLTN. hal ini dikarenakan para memiliki pengurus yang LSM ini terdiri dari orang-orang yang memiliki kapasitas untuk bicara PLTN ataupun Variannya karena

Disamping LSM-LSM yang berkedudukan di Jepara dan Balong ini, banyak LSM yang memberikan perhatian terhadap konflik ini, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Persemaian cinta Kemanusiaan (Percik), lingkaran Salatiga untuk telaah hubungan Ilmu dan Agama (Listhia). Namun dari wawancara kami dengan informan lembaga-lembaga, ini memberikan support dan kontrol dari luar Balong dan Jepara. Peran mereka biasanya dengan mengadakan seminar, lokakarya ataupun aksi untuk memperlihatkan kepada masyarakat secara keseluruhan mengenai proyek PLTN. Seberapa efektif peran mereka dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kasus konflik ini, diakui oleh warga tidak dapat diukur dengan baik. Karena biasanya kehadiran mereka di Balong hanya terkait pada momentum-momentum tertentu<sup>54</sup>.

Selain LSM-LSM ini peran pemberdayaan juga dilakukan oleh Ormas dan Organisasi kemahasiswaan seperti Nahdatul Ulama dan Forum Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi. Peran mereka dalam proses pemberdayaan ini jauh lebih efektif karena beberapa alasan. *Pertama* : keberadaan mereka yang relatif hidup bersama dengan warga Balong, membuat mereka secara emosional memiliki ikatan yang kuat. Karena disamping masalah PLTN mereka juga membantu warga dalam beberapa persoalan kemasyarakatan yang lainnya<sup>55</sup>. *Kedua* : keberadaan ditengah warga inipula yang membuat mereka dapat mengendalikan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan I1

<sup>55</sup> Wawancara dengan I6

semua isu dan mendorongnya keningkat warga. *Ketiga* : pendidikan mereka yang relatif baik membuat warga Balong, relatif memposisikan mereka sebagai komunitas terdepan dalam konflik ini.

Dari penelitian kami peran LSM, Ormas dan Organisasi kemahasiswaan yang hidup ditengah komunitas sangat signifikan. Peran mereka yang memberikan informasi yang berbeda dari apa yang telah di sosialisasikan pemerintah mengenai PLTN, Keberimbangan informasi PLTN relatif berada dalam kontrol lembaga-lembaga ini. informasi-informasi yang selalu menjadi konsumsi warga seperti : apa sebenarnya PLTN itu ? , kenapa pemerintah menginginkan dilaksanakan proyek ini ? , bagaimana citra pemerintah dalam melakukan proyek ? , siapa aktor yang paling berkepentingan pada proyek ini ? seberapa besar manfaat proyek ini bagi komunitas ? Bagaimana dampak Radiasi nuklir apabila terjadi kebocoran nuklir ? dan berbagi informasi lain terkait proyek PLTN termasuk mengontrol isu yang muncul dimedia massa bahkan ikut menciptakan blog<sup>56</sup> guna menginformasikan situasi komunitas pada dunia luar. Informasi-informasi ini telah mendorong sebab konflik termasuk bagaimana dinamikanya konflik ini. Penolakan atau penerimaan masyarakat terhadap pembangunan PLTN tidak hanya terletak pada upaya pemerintah meyakinkan kemampuan teknologi yang digunakan, tetapi juga penting dalam memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap dampak yang akan ditimbulkan PLTN<sup>57</sup>. Upaya membangun keyakinan akan jaminan ini sangat ditentukan oleh sosialisasi dan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah.

### 3.3 Kepemimpinan

Bagian ini membicarakan faktor kepemimpinan dalam penyelesaian konflik proyek PLTN, kepemimpinan yang dimaksud adalah semua individu yang merencanakan, menggerakkan, dan mengarahkan konflik yang berasal dari negara baik dari tingkat pusat, daerah –propinsi dan kabupaten- maupun pada sub-sub kerja yang terkait pada proyek ini. Masih sangat sedikit studi kepemimpinan yang berkaitan dengan konflik, meskipun diakui bahwa salah satu fungsi

<sup>56</sup> Fosmad membuat blog WWW. Atntinuklir.blogspot.com sebagai alat propaganda kepada dunia luar mengenai proyek PLTN.

<sup>57</sup> Wawancara dengan I10

kepemimpinan adalah menangani konflik yang ada dibawah koordinasi dan kendali kepemimpinannya (Hadari Nawawi : 1995).

Para pemimpin harus menyadari bahwa karena konflik disebabkan oleh faktor-faktor yang berlainan, maka model yang digunakan dalam pengelolaan konflik juga berlainan, tergantung keadaan. Memilih sebuah model pemecahan konflik yang cocok tergantung pada beberapa faktor, termasuk alasan mengapa konflik terjadi, dan hubungan khusus antara pimpinan dengan pihak yang terlibat konflik. Menurut Greenhalgh (1999), efektivitas pimpinan organisasi dalam menangani konflik tergantung pada seberapa baik mereka memahami dinamika dasar dari konflik, dan apakah mereka dapat mengenali hal-hal penting yang terdapat dalam konflik tersebut.

Dalam upaya melaksanakan kepemimpinan, selain memiliki kemampuan dan keterampilan dalam kepemimpinan, seorang pemimpin sebaiknya menentukan gaya kepemimpinan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi anggota komunitas. studi ilmiah yang dilakukan oleh banyak ahli mengenai kepemimpinan, dan hasilnya berupa teori-teori tentang kepemimpinan. Sehingga teori-teori yang muncul menunjukkan perbedaan. Pada kepemimpinan yang terkait dengan konflik, indikator yang dapat digunakan adalah kecepatan (*speed*) tindakan yang dilakukan oleh pemimpin, prioritas (*priority*) dan fleksibilitas (*fleksibility*) untuk meredam atau menyelesaikan konflik.

### **3.3.1 Kecepatan Tindakan**

Indikator ini menjelaskan peranan kepemimpinan dalam kecepatan mengambil tindakan dalam penyelesaian konflik. Sebagaimana dijelaskan pada kerangka konseptual konflik bukan peristiwa yang kebetulan dan terjadi begitu saja. prosesnya selalu melalui tahapan-tahapan dan fluktuasi. Berawal dari ketidaksesuaian sasaran dan tujuan antara individu atau kelompok, yang bergerak sampai pada tahapan puncak konflik yang membuka peluang terjadinya kekerasan. Namun seringkali mengalami lompatan tahapan atau berhenti sebelum mencapai puncak konfliknya. pada saat itulah faktor ini mengambil kecepatan tindakan kepemimpinan untuk mengarahkan situasi konflik. Banyak kasus konflik di Indonesia yang seringkali terlambat diantisipasi oleh tindakan

kepemimpinan meskipun indikator munculnya konflik sudah terlihat pada tahapan awal, sebagai akibatnya konflik mencapai pada tahap kekerasan.

Dalam hal proyek PLTN presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan : "Indonesia akan berdiri di depan untuk suatu perjuangan nuklir untuk perdamaian. Amerika masih punya banyak, Rusia masih banyak, Inggris banyak. Tiba-tiba di Asia muncul di Israel, kemudian Pakistan, India, ada di Korea Utara. Bayangkan, itu bukan yang kita pilih. Yang kita pilih, nuklir untuk tujuan damai, untuk kesehatan, untuk energi, untuk makanan, dan lain-lain".<sup>58</sup> Bahkan Dalam Blue Print Departmen Energi dan Sumber Daya Mineral terkait Kebijakan Energi Nasional di muat PLTN digunakann untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sebesar 2 %, yang kemudian dilanjutkan dengan program sosialisasi oleh kementrian Negara Riset dan Teknologi, antara lain melalui pembuatan buku bahan ajar dan pesan layanan masyarakat melalui media massa serta mengadakan acara-acara seputar teknologi nuklir.<sup>59</sup>

Meskipun secara konseptual proyek ini sudah menjadi kebijakan strategis pemerintah akan tetapi masih terdapat banyak hambatan dikoordinasikan antar sektor maupun antara struktur yang menangani proyek ini. BATAN Misalnya hanya merasa sebagai badan teknis yang melaksanakan kebijakan dari Kemenristek, karena untuk penganggaran program dan proyek ini berada di bawah wewenang Kemenristek.<sup>60</sup> Koordinasi di unit kerja yang tidak optimal inilah yang membuat program –terutama sosialisasi- tidak dapat berjalan maksimal, lamban tidak mampu mengikuti dinamika yang berkembang di dalam masyarakat.

Dari penelitian kami di lapangan indikator munculnya konflik ini sudah mulai terlihat pada saat warga yang "resah" mempertanyakan kantor riset di BATAN, kepemimpinan di tingkat lokal dalam hal ini Petinggi Desa dan Camat Kembang tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai terkait proyek PLTN. diperparah lagi dengan upaya camat dan petinggi desa mencoba membangun dominasinya dengan mengancam tokoh masyarakat yang

---

<sup>58</sup> Suara Pembaruan, Jumat, 6 Juli 2007 hal 11 kol 1

<sup>59</sup> Koran Tempo, Selasa, 19 Juni 2007, Hal.A4 Kol.2-4

<sup>60</sup> Wawancara dengan I7

mempertanyakan proyek PLTN<sup>61</sup> menimbulkan resistensi tersendiri. Meskipun laporan akan terjadinya konflik di tingkat warga masuk di pimpinan Kabupaten Jepara namun tidak ada tindakan kepemimpinan yang dilakukan.

Sejak awal tahun 2006 sampai dengan puncak aksi massa -dari awal juni 2007 sampai september 2007-, tidak ada upaya untuk memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada komunitas terkait dengan proyek ini<sup>62</sup>. Bahkan kemudian sosialisasi dilakukan oleh NGO dan organisasi kemahasiswaan dalam bentuk istighosah atau nonton film nuklir. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintah ini terasa efektif dan mampu menjawab "kehausan" pengetahuan masyarakat Balong mengenai PLTN, terlepas bahwa sosialisasi ini menguntungkan atau merugikan pelaksanaan proyek ini dari "kaca mata pemerintah". Jelasnya apa yang dilakukan oleh NGO dan lembaga kemahasiswaan ini lebih mengikuti dinamika dan tuntutan sosial yang ada dalam masyarakat balong

Sementara dari pihak pemerintah tidak ada tindakan kreatif kepemimpinan untuk menangani konflik ini selain tindakan rutin berupa laporan dinamika masyarakat dan pengawasan aparat hukum terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum oleh warga Balong. Kelambanan ini diakibatkan oleh *Pertama* : pemimpin di tingkat lokal –baik itu Kabupaten maupun kecamatan- tidak merasa memiliki proyek ini. proyek ini dilihat sebagai milik pemerintah pusat sehingga tindakan dan semua langkah yang diambil harus melalui kepemimpinan pusat<sup>63</sup>. *kedua* : koordinasi antar sektor yang menjalankan program sosialisasi tidak optimal sehingga program yang dijalankan tidak menyentuh masyarakat Balong –tidak tepat sasaran. *Ketiga* : kakunya tindakan kepemimpinan karena terikat pada program yang sudah direncanakan sehingga dinamika dimasyarakat yang berkembang cepat di abaikan. *ke-empat* : kejelasan dari kelanjutan pelaksanaan proyek ini pasca menguatnya konflik tingginya tingkat resistensi komunitas yang tidak pasti dari pemerintah pusat terutama

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan I2

<sup>62</sup> Wawancara dengan I2 dan I6

<sup>63</sup> Wawancara dengan I4 dan

presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakibatkan kepemimpinan –terutama struktural- dibawah tidak mengambil langkah penyelesaian konflik<sup>64</sup>

Dari paparan diatas terlihat bahwa tinadakan kepemimpinan lamban dalam upaya untuk segera meredam konflik dan menormalisasi sikap komunitas untuk lebih positif terhapa proyek PLTN. Juga terlihat dari semua koordiansi yang lemah dari sektor-sektor terkait apalagi dengan ketegasan dari kepempinan puncak terkait dengan pelaksanaan proyek ini yang tidak ada maka semua upaya penyelesaian konflik ini berjalan lambat.

#### 4.3 Prioritas

Indikator ini berbicara tentang alternatif tindakan kepemimpinan yang dilakukan untuk meredam atau menyelesaikan konflik. Penentuan prioritas didasarkan pada dua pemikiran. *pertama* pemikiran praktis dan taktis untuk mencegah agar pengaruh konflik tidak berkembang secara cepat dan tidak merusak kehidupan secara keseluruhan. *Kedua* adalah pemikiran strategis dan visioner dimana pengaruh konflik untuk jangka panjang ditelaah kembali sekaligus dengan potensi peluang yang menyertainya. Ini merupakan konsekuensi logis sebagai seorang pemimpin, karena mau tidak mau, suka tidak suka, ia harus berani mengambil langkah di saat dibutuhkan kecepatan menentukan keputusan. Karena posisinya sebagai *problem solver*, seorang pemimpin dituntut benar-benar harus memiliki daya analisis yg tinggi, sehingga keputusan yang diambilnya sudah dipertimbangkan secara matang. Ia akan menggali nilai-nilai obyektif dalam mengambil keputusan dan menyingkirkan jauh-jauh hal-hal yang bersifat subyektif termasuk memikirkan alternatif-alternatif tindakan dalam situasi konflik.

Pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN dijadwalkan beroperasi pada 2016-2017 di Semenanjung Muria. Namun, hingga kini kepemilikan PLTN belum dipastikan. Adapun pilihan kepemilikannya: sepenuhnya milik pemerintah atau swasta; pilihan lainnya: sebagai gabungan pemerintah dan swasta. Belum adanya kejelasan mengenai status kepemilikan rencana PLTN, mampu mengakibatkan proyek itu mundur. Tahun 2007 dijadwalkan penuntasan masalah kepemilikan PLTN, kemudian dilanjutkan pada 2008 selesai proses tender. Pada tahun 2010

---

<sup>64</sup> wawancara dengan I7

dijadwalkan konstruksinya sudah mulai berjalan<sup>65</sup>. Semakin tidak jelasnya arah dari proyek ini mengakibatkan "keresahan" masyarakat berjalan semakin lama. dan pada momentum-momentum tertentu dapat bergerak pada tahapan konflik yang tidak dapat di kendalikan.

Dari penelitian kami dilapangan, kami mencatat alternatif tindakan yang dilakukan pemerintah dengan memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat di luar Balong semakin membuat warga merasa "tidak dimanusiakan". karena mereka yang akan merasakan dampak langsung dari proyek ini namun sosialisasi dilakukan di tempat lain<sup>66</sup>. Demikian pula dengan Selama ini, bantuan berupa bibit padi, pupuk, pakan ternak, dan ternak. BATAN juga akan memberikan beasiswa kepada 10 pelajar asal desa yang dijadikan tapak PLTN, untuk studi di Sekolah Tinggi Teknik Nuklir (STTN) Yogyakarta. warga Balong merasa tidak mendapatkan dampak langsungnya. Terakhir semua produk sosialisasi yang dibuat oleh BATAN melalui sekolah-sekolah semakin meresahkan warga karena dilihat tidak berdampak langsung pada warga balong tapi justru berpotensi melahirkan komunitas yang pro PLTN di tengah warga yang pada gilirannya akan memicu konflik horisontal warga<sup>67</sup>.

Seorang informan yang juga anggota DPRD Jepara menjelaskan bahwa yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap PLTN ini, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan nuklir ?, siapa yang jadi pemilik PLTN ?, dan bagaimana skema tindakan yang diambil bila terjadi kecelakaan ? singkatnya pemerintah pusat harus memberikan jaminan kepastian hukum kepada warga terhadap apa yang mereka pertanyakan selama ini. dalam bentuk peraturan pemerintah atau kalau perlu dalam bentuk undang-undang. Ini yang menjadi prioritas tindakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah pusat. kalau ada jaminan kepastian seperti ini maka semua elemen kepemimpinan dapat ikut memberikan jaminan terhadap pelaksanaan proyek ini<sup>68</sup>. Tindakan yang selama ini dilakukan terlalu teknis dan sering tidak holistik dapat menyelesaikan pokok dari konflik. bahkan terkadang melahirkan resistasi

---

<sup>65</sup> Kompas, Jumat, 11 Mei 2007 hal 14 kol 1-4

<sup>66</sup> Wawancara dengan I3

<sup>67</sup> Wawancara dengan I2

<sup>68</sup> Wawancara dengan I4

yang semakin mendalam<sup>69</sup>. Sedangkan dari pihak pemerintah daerah baik itu kabupaten Jepara dalam hal ini Bupati mengambil sikap pasif sambil tetap melakukan tugas rutin untuk mengontrol warga agar tidak melakukan kegiatan melanggar hukum<sup>70</sup>, dengan menurunkan intel dari Pemda, Kepolisian ataupun dari Kodam untuk sekedar memastikan bahwa setiap bentuk konflik tidak mengarah kepada kekerasan.

Dari paparan diatas terlihat bahwa sudah dilakukan alternatif dan prioritas tindakan dalam rangka meredam atau menyelesaikan konflik. Akan tetapi sebagaimana yang di sampaikan oleh para informan tindakan taktis dan praktis hanya mencegah konflik tidak sampai pada kekerasan tetapi sebagai upaya strategis jangka panjang belum tepat sasaran karena tidak mengena pada akar persoalan yang sesungguhnya. Bahkan seringkali alternatif yang sifatnya praktis dan taktis semakin membuat keresahan warga semakin menguat.

### 3.3.3 *Fleksibilitas*

Indikator ini terkait tingkat kelenturan pemimpin dalam meredam atau menyelesaikan konflik sampai pada derajat tertentu. fleksibilitas ini menjadi tuntutan kepemimpinan dari tingkat atas sampai bawah apalagi di tingkat pelaksana, syarat fleksibilitas dalam upaya penyelesaian konflik sangat dibutuhkan karena dinamika masyarakat yang terus berubah dengan cepat. Dalam kondisi Konflik, hal ini cenderung terjadi jika anak buah tidak mandiri. Sebaliknya, *outer circle* yang dalam kondisi normal lebih berorientasi pada operasi semata, dalam kondisi Konflik perlu mengembangkan perannya dan mendesak ke dalam, memasuki *inner circle* dalam batasan tertentu. Dari penjabaran-penjabaran di atas, jelaslah bahwa disamping perkembangan fokus tanggung jawab penyusun strategi dan perencana, sebenarnya peran pelaksana yang biasanya juga menyandang peran sebagai pemberi informasi dan sebagai penerima perubahan perlu digabungkan dengan peran sebagai penasihat, yang tentunya disesuaikan dengan cakupan wewenang dan tanggung jawabnya.

---

<sup>69</sup> wawancara dengan I1

<sup>70</sup> Wawancara dengan I9

Dalam kasus PLTN ketergantungan kepada program dan tahapan proyek yang telah disusun sangat tinggi, karena pada level atas cenderung berpikir ekonomi-politik. Dalam blue print pelaksanaan proyek dimasukan pula faktor sosial-ekonomi sebagai faktor studi menentukan tapak akan tetapi menjadi dikecilkan peran masyarakat pada sisi sosial desakan "kapitalisme" yang kuat<sup>71</sup>. bahkan sebelum meskipun muncul resistensi dari pihak komunitas tender proyek terus coba dijejaki oleh pemerintah pusat oleh beberapa negara.

Dari penelitian kami di lapangan, indikator ini tidak mampu diperankan oleh pelaksana dilapangan. faktor ketidak inginan mengambil resiko berhadapan langsung dengan warga dan kepentingan secara pribadi tidak begitu jelas membuat kepemimpinan di tingkat lokal bertindak menunggu saja kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Sebagai akibatnya tidak ada upaya dari pemerintah lokal tidak untuk melakukan tindakan kreatif yang dapat meredam atau menyelesaikan konflik. faktor penganggaran juga telah membuat semua tindakan menjadi begitu terbatas. Semua *item* program yang telah dibuat pada penganggaran dilaksanakan dengan kaku karena anggarannya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan program awal<sup>72</sup>. Petunjuk dari atas yang tidak jelas, tegas dan tidak memberikan kepastian ini yang membuat kepemimpinan lokal tidak mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan yang dapat meredam konflik.

Program sosialisasi dan tindakan pemimpin yang lebih kreatif dan inovatif dengan pendekatan karakteristik lokal sangat penting dilakukan karena melihat dengan pendekatan budaya, apakah warga bersikap negatif atau positif, atau apakah mereka menolak atau tidak. Jawaban itu tergantung pada persepsi. Mengapa umumnya masyarakat khawatir ? Karena, kata 'nuklir' masih baru dan belum jadi kosakata umum. Jadi wajar kalau mereka takut. Justru ini tantangan buat pemerintah untuk berdialog.<sup>73</sup> Dari paparan diatas kami melihat indikator ini tidak dapat dilakukan dengan baik oleh pemimpin yang ada dari pusat sampai di tingkat yang paling didaerah. Kepemimpinan pada semua level Masih sangat

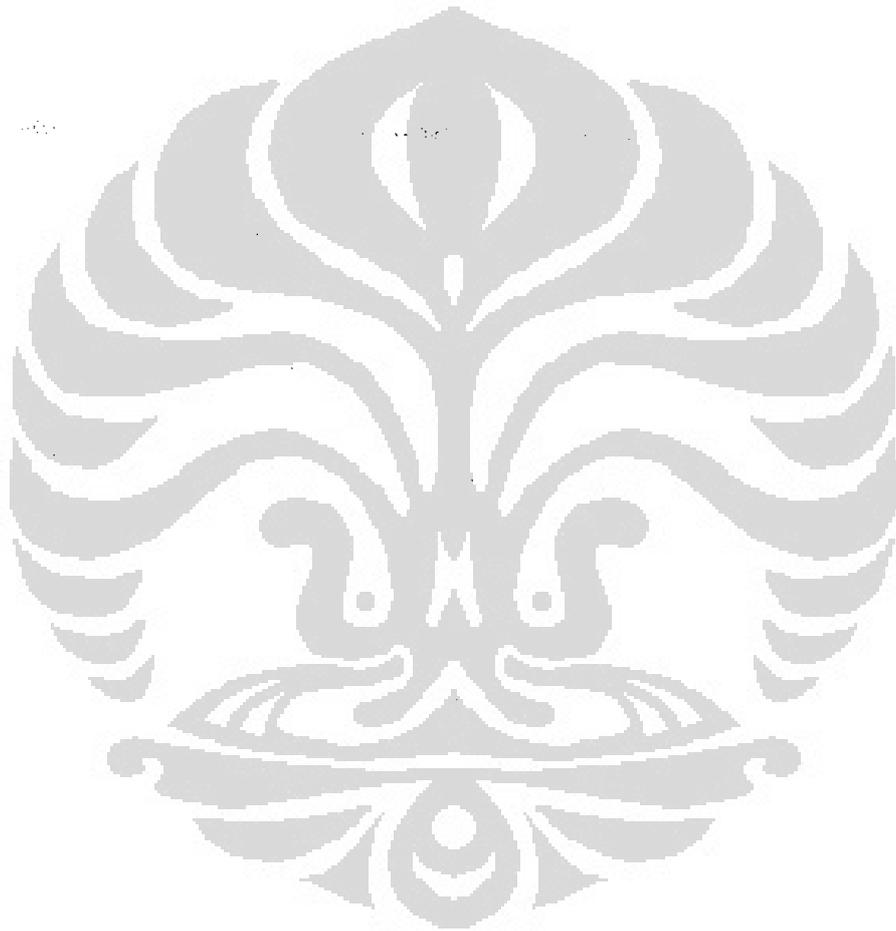
---

<sup>71</sup> wawancara dengan I6

<sup>72</sup> Wawancara dengan I7

<sup>73</sup> [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), Jumat, 22 Juni 2007

terikat oleh aturan birokrasi yang ketat meskipun situasi konflik membutuhkan tuntutan yang lebih *fleksibel*.



## BAB IV

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Faktor-faktor sebagaimana dipetakan dalam model kerangka konseptual, seluruhnya signifikan berlaku -pada tingkat tertentu- dalam kasus Proyek PLTN. Hubungan antar faktor dalam dimensi dinamika konflik cukup kompleks, secara substansial, indikator utama yang perlu dilihat dalam dinamika konflik adalah intensitas konflik –yakni tingkat kekerasan- namun terbentuknya intensitas konflik secara terbatas dipengaruhi pula faktor lain dalam dimensi dinamika, yakni eskalasi, fluktuasi, peran aktor dan lembaga, serta karakteristik lokal. Demikian pula pada faktor sebab yakni ketimpangan, perubahan politik, eksploitasi, dominasi, dan pemberdayaan.

1. Secara umum hubungan antara faktor dalam dimensi konflik dapat dipetakan polanya yakni : 1) Semakin tinggi eskalasi konflik akan semakin tinggi intensitas dan sebaliknya; 2) semakin tinggi fluktuasinya (frekuensi) konflik akan semakin tinggi pula intensitas dan sebaliknya. Sedang dalam faktor peran aktor dan lembaga perlu dilihat apakah peran aktor dan lembaga sebagai pendorong atau peredam. 3) semakin signifikan peran aktor dan lembaga akan semakin rendah intensitasnya bahkan konflik dapat dicegah jika berperan sebagai pendorong demikian pula sebaliknya jika sebagai peredam. 4) Semakin keras budaya lokal dan semakin disfungsi organisasi lokal akan semakin tinggi intensitas konfliknya dan sebaliknya. Dan dari keberlakuan, derajat sebab yang dilihat dari jawaban para informan secara kualitatif dapat mengekspresikan tingkat signifikansi sebab konflik pada tingkat tertentu, 1) untuk ketimpangan tidak nampak secara empiris namun cukup signifikan pada subyektifitas warga dengan mengukur dan melihat praktek negara terhadap warga negara secara keseluruhan, 2) eksploitasi secara obyektif belum terjadi, tapi secara subyektif sangat signifikan karena menyangkut identitas warga lokal yang terancam, 3) perubahan politik sangat signifikan dengan melihat bahwa

sebelum reformasi 1998 tidak terjadi konflik meski sudah berjalan tahapan proyek, 4) dominasi tidak signifikan karena praktek ini tidak nampak dijalankan oleh negara, 5) pemberdayaan sangat signifikan terlihat menjadi kontrol terhadap semua isu yang terkait PLTN dan membentuk persepsi warga terhadap proyek ini. Pada kasus ini faktor rendahnya tingkat pendidikan warga yang dipertemukan dengan faktor pemberdayaan, yang berbeda kepentingan dengan negara menjadi faktor penting yang signifikan dalam memicu konflik.

2. Faktor kepemimpinan dalam perannya untuk meredakan konflik ini belum dijalankan dengan baik. Dengan indikator 1) kecepatan tindakan kepemimpinan tidak nampak dilakukan meskipun indikasi konflik sudah nampak, 2) prioritas sudah dijalankan akan tetapi dilihat tidak tepat sasaran, 3) fleksibilitas kepemimpinan tidak baik karena sangat terikat pada aturan birokrasi.

## 5.2 Saran

Beberapa saran memang muncul pada saat wawancara dengan informan, secara umum warga tidak menginginkan PLTN didirikan di Balong, dan menyarankan pemerintah untuk mencari sumber energi alternatif lain untuk mengatasi krisis energi. Dari gambaran diatas nampak bahwa dinamika dan sebab konflik merupakan gejala yang dapat di baca indikasi kemunculannya. Oleh sebab : *Pertama* itu maka sebaiknya pemerintah dapat memperhatikan kemunculan indikator itu dan segera mengambil tindakan kepemimpinan untuk meredam dan mencegah kekerasan yang potensial terjadi. *Kedua* dalam jangka panjang, pemerintah harus memberikan jaminan kepastian terhadap PLTN tidak hanya dalam jaminan teknologi, akan tetapi kepastian hukum dan kepercayaan secara institusional untuk mengelola proyek dengan potensi resiko yang besar. *ketiga* ruang dialog dibuka dengan transparan dan akuntabel bagi semua stekholder, termasuk bagi semua NGO dan lembaga yang terlibat dalam proyek ini tidak menutup ruang dialog dengan kunci utama kepemimpinan untuk

penyelesaian konflik. *Ke-empat* pemerintah menggunakan media, tokoh-tokoh lokal untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada warga terutama warga lokasi tapak PLTN





Tak pernah terbayang dari benak saya untuk sampai pada titik ini, mimpi anak kampung yang jauh dari hiruk pikuk capital namun kuat gairah pendidikannya. Lahir sebagai anak pertama dari 4 bersaudara, dari keluarga guru kemudian dibalut oleh banyak impian untuk lebih baik. Lahir 27 tahun yang lalu di Watuputih, tepatnya subuh ketika fajar minggu tanggal, 8 Maret 1981, langsung mendengar azan yang di kumandangkan ayah bergama Islam. Sepak Bola, Jogging, Bulu Tangkis dan Membaca adalah hobi sejak kecil

Menyelesaikan pendidikan SD-SMU di kampung halaman, Muna kota Jati. Kemudian melanjutkan SI Jurusan Elektro, Fakultas Teknik, Sub Program Teknik Energi Elektrik, Universitas Hasanuddin, di Makassar. Jakarta saya jejak pada tahun 2006 dan masuk Di Univesitas Indonesia pada Program Studi Ketahanan Nasional Kosentrasi Kajian Pengembangan Kepemimpinan.

Dunia kemahasiswaan sebagai ruang aktualisasi dilewati dengan berbagai aktivitas internal maupun eksternal kampus. Senat Mahasiswa Mahasiswa Teknik Unhas pernah dipercaya sebagai Ketua Bidang Kerohanian dan Ketua Bidang Eksternal. Sementara HMI pernah dipercaya sebagai Ketua cabang Makassar Timur dan sekarang Sebagai Salah Seorang Fungsionaris Pengurus Besar Himpinan Mahasiswa Islam (PB HMI). Untuk pekerjaan setelah Luntang lantung bekerja sebagai konsultan Telekomunikasi dan sekarang bekerja sebagai staf Ahli Anggota DPR-RI.

## DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

### Informan 1 Kode I1

Nama : KH Nuruddin Amin  
 Umur : 42 Tahun  
 Asal : Kecamatan Bangri  
 Jabatan : Ketua cabang Nahdatul Ulama  
 Kabupaten jepara  
 Posisi : Tokoh Masyarakat/ Organisasi  
 Kemasyarakatan



### Informan 2 ode I2

Nama : Setiawan Sumedi  
 Umur : 37 Tahun  
 Asal : Desa balong  
 Jabatan : Ketua paguyuban Masyarakat  
 Balong (PMB)  
 Posisi : Tokoh Masyarakat/Organisasi  
 Kemasyarakatan



### Informan 3 Kode I3

Nama : Arifin  
 Umur : 40 tahun  
 Asal : Kecamatan Jepara  
 Jabatan : Guru Madrasah  
 Posisi : Masyarakat Balong

### Informan 4 kode I4

Nama : Solihin  
 Umur : 49 Tahun  
 Asal : Kecamatan Kaliyamatan  
 Jabatan : Ketua Cabang Partai Kebangkitan  
 Bangsa Kabupaten Jepara.  
 Posisi : Tokoh Masyarakat/  
 Anggota DPRD Kab Jepara



#### Informan 5 Kode I5

Nama : Lilo sunarya  
Umur : 62Tahun  
Asal : Kecamatan Jepara  
Jabatan : Ketua Masyarakat Rekso Bumi  
(Marem)  
Posisi : Tokoh OrganisasiKemasyarakatan



#### Informan 6 Kode I6

Nama : Darul Hasyim  
Umur : 27 Tahun  
Asal : Yogyakarta  
Jabatan : Ketua Forum Solidaritas Mahasiswa  
Untuk Demokrasi (Fosmad)  
Posisi : Tokoh Organisasi Mahasiswa

#### Informan 7 kode I7

Nama : Prapto  
Umur : 46 Tahun  
Asal : Kecamatan Keling Kab jepara  
Jabatan : Pegawai Batan  
Posisi : PegawaiBatan yang di tempatkan  
di Jepara

#### Informan 8 Kode I8

Nama : Mahmud  
Umur : 46 Tahun  
Asal : Kecamatan Bangri  
Jabatan : Pegawai Pemda  
Posisi : masyarakat jepara

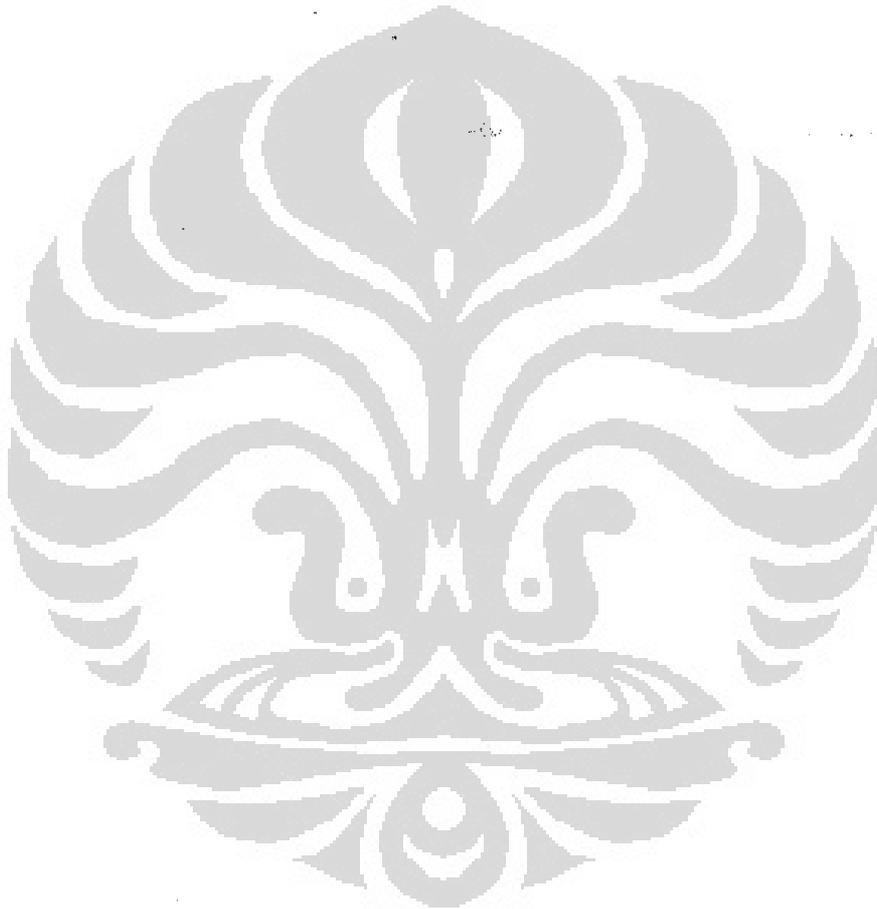


#### Informan 9 Kode I9

Nama : Mukhsinin  
Umur : 61 Tahun  
Asal : Kecamatan Bangri  
Jabatan : Ketua DPRD Jepara  
Posisi : Tokoh Masyarakat/

Informan 1 Kode I10

Nama : Dr Asnatio Lasman  
Umur : 52 Tahun  
Asal : Tangerang  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas  
Tenaga Nuklir (BAPETEN)  
Posisi : Kepala pengawas pengguna Nuklir



### Pedoman Wawancara

Usia responden :

Pekerjaan :

Peran/posisi :

#### Sejarah Konflik

1. Berapa kali konflik (fisik) antara pemerintah dengan masyarakat pernah terjadi ?
2. Jika pernah kapan saja ?
3. Apa saja bentuk konfliknya ?
4. Siapa saja yang terlibat ?
5. Apa saja yang menjadi sengketaan ?
6. Berapa lama konflik terjadi ?
7. Bagaimana dinamikanya ?

#### Sebab

##### *Perubahan politik*

1. Bagaimana informan melihat perbedaan sikap/perilaku Pemerintah terhadap Masyarakat sebelum dan sesudah reformasi ?
2. Perubahan-perubahan apa saja yang paling menonjol ?

##### *Ketimpangan*

1. Bagaimana bapak melihat ada perbedaan perilaku pemerintah terhadap masyarakat yang menyetujui PLTN dengan masyarakat yang tidak menyetujui PLTN ?
2. Perbedaan yang paling menonjol ?
3. Adakah perbedaan dalam penggunaan fasilitas umum ?

##### *Eksploitasi*

1. Menurut anda apakah kegiatan proyek PLTN mengeruk sumber daya alam ?
2. Menurut anda apakah Proyek PLTN ini merusak lingkungan warga ?
3. Apakah kegiatan Proyek PLTN ini mengurangi lahan produktif ?

##### *Dominasi*

1. Bagaimana pendekatan pemerintah terhadap penyelesaian konflik dengan pemerintah ?
2. Bagaimana saja keterlibatan aparat dalam konflik ini ?

##### *Pemberdayaan*

1. Bagaimana NGO dalam membantu masyarakat dalam masalah dengan pemerintah ?
2. Apakah ada bantuan dana untuk kegiatan dengan pemberdayaan dengan masyarakat ?
3. Apakah bantuan NGO bermanfaat dan efektif buat masyarakat ?

## **Dinamika**

### *Fluktuasi*

1. Pada tahap proyek apa konflik terjadi ?
2. Masalah apa yang terkait dengan konflik dan tahap kegiatan proyek ?

### *Intensitas*

1. Bagaimana intensitas konflik terjadi, adakah tindakan kekerasan ?
2. apa yang menyebabkan konflik tersebut berkembang menjadi kekerasan ?

### *Bentuk*

1. Bentuk-bentuk konflik apa yang sering terjadi ?
2. mengapa konflik ini terjadi ?
3. Adakah pengaruh faktor tertentu sehingga terjadi bentuk konflik yang seperti ini ?

### *Aktor/institusi*

1. adakah elit/tokoh lokal yang berperan dalam konflik ini, siapa mereka ?
2. Apa peran mereka ?
3. Bagaiman peran pemerintah lokal ?
4. Adakah lembaga lain yang terlibat ? siapa mereka ?
5. Adakah dinamika kolaborasi antar lembaga menghadapi perusahaan ?
6. Atau adakah kolaborasi perusahaan-lembaga masyarakat menghadapi komunitas ?

### *Penguat/intensifier*

1. Adakah indikasi peran provokator
2. Adakah advokator yang membela masyarakat menghadapi perusahaan ?
3. adakah kepentingan organisasi/lembaga ini ?

## **Bagaimana Cara pemerintah dalam mengatasi konflik ini ?**

1. Bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan proyek ini ?
2. Apakah ada indikasi pemerintah menurunkan aparat keamanan untuk mengiifiltrasi warga ?
3. Bagaimana posisi pemerintah daerah (Bupati, camat, lurah/kepala desa) dalam konflik ini ?

## **Peran kepemimpinan**

1. bagaimana cara para pemimpin komunitas (kyai, tokoh masyarakat dll) menyikapi konflik ini ?
2. Bagaimana peran pemimpin formal (bupati, camat, lurah/kepala desa) dalam mengatasi konflik ini ?

3. bagaimana tingkat kepatuhan Komunitas pada pemimpin formal dan pemimpin non formal mereka ?
4. Apa yang menyebabkan perbedaan tingkat kepatuhan tersebut.

### **Sosial Mapping**

#### Static

1. Siapa tokoh/institusi yang berpengaruh dan disegani (pro dan Kontra) apa peranya ?
2. Apa perhatian dan kepentinganya ?
3. Bagaimana modus Tokoh/institusi ini bekerja ?
4. Dimana desa beroperasinya ?
5. Siapa pendukungnya ?
6. Siapa sumber resourcesnya ?
7. Siapa yang bisa berkomunikasi dengannya ?

#### Presepsi dan harapan

1. Apa harapan ini menurut mereka rasional (dapat dipenuhi )
2. Apa jalan keluar yang di tawarkan informan ?
3. Bagaiman melaksanakan jalan keluar tersebut ?

### **Konflik**

#### Potensi dan skala konflik

##### Umum :

1. Apa dan bagaimana sejarah konflik komunitas dan negara yang pernah terjadi ( Misalnya masalah tenaga kerja, dampak lingkungan, sumber alam tanah dll ?

### **Pedoman observasi ?**

#### Wawancara

1. Suasana wawancara
2. Siapa saja yang terlibat wawancara ?
3. Bagaimana reaksi emosi informan terhadap butir pertanyaan
4. catat kesimpulan-kesimpulan penting ?

#### pedoman catatan lapangan

1. catat hasil temuan harian
2. catat hubungan antar temuan
3. catat kesimpulan2 sementara
4. catat orang/tokoh yang dapat ditelusuri lebih jauh

## TRANSKRIP WAWANCARA

**Informan 1**

Pertanyaan :

Apakah pernah ada konflik fisik dalam kasus ini ?

Jawab :

Tidak pernah ada, yang ada hanya perang urat saraf, terror opini, misalnya menristek mengatakan akan segera dibangun, maka menyulut kemarahan warga, kecuali kekerasan phiskis yang berupa ancaman tetapi kita tidak dapat mengideintifikasi datangnya dari mana, boleh jadi hanya dinamika dalam masyarakat atau dari negara. Tapi besar kemungkinan dari negara atau yang berurusan denganya. Karena ancaman tidak hanya diterima oleh warga balong tapi aktivis anti nuklir di luar jepara, misalnya mas aam dtelepon oleh pengancam "kalau ndak berhenti kamu tak culik" kami sudah laporkan ke komnas HAM dan kepolisian, bahkan saya beberapa hari yang lalu menerima ancaman lewat telepon. Ada yang diancam menggunakan surat, dan zakori anshori diancam dengan SMS

Pertanyaan :

sudah berapa lama, konflik ini berlangsung ?

Jawab :

Kalau awal 90, pemerintah agak represif menurunkan aparat keamanan, tidak semua orang bisa masuk ke balong kalau ada mobil plat luar kota akan diperiksa aparat. Tapi pada saat itu masyarakat ekspektasinya demonstrasinya belum seperti sekarang. Awal 2007 baru mulai masyarakat ada variabel perubahan politik yang mempengaruhi itu, berbeda dengan jaman orde baru sekarang karena reformasi politik masyarakat lebih terbuka dan kalau ada ancaman-ancaman masyarakat lebih leluasa menyampaikannya kepada publik, sehingga negara tika akan melakukan tindakan kekerasan karena itu akan kontra produktif dengan gagasan pendirian PLTN ini.

Pertanyaan :

Apakah ada diluar balong yang mendukung penolakan PLTN ?

Jawab :

Khususnya di balong tapi di jepara, pati dan kodus semua pada umumnya menolak, khusus pati dan kodus disana basis industri makanan dan rokok , sebenarnya kalau mau lihat secara obyektif pada saat PLTN beroperasi tidak akan menimbulkan radiasi bagi industri. Tapi yang namanya bisnis tergantung sentimen pasar, misalnya industri rokok, ketika disampaikan bahwa rokok jarum terkena dampak radiasi karena dekat dengan lokasi PLTN, tentu orang tidak berkepentingan untuk meneliti apakah rokok jarum terkena dampak radiasi, akan tetapi konsumen tentu akan mengambil langkah aman untuk tidak mengkonsumsi jarum. Dan demikian pula ribuan home indutri rokok, makanan susu dan lain-lain . belum lagi banyaknya penduduk yang bekerja dalam sektor itu yang mencapai ratusan ribu orang. Dalam konteks kodus 70 % APBDnya berasal dari pajak

rokok. Saya pikir pemerintah harus berpikir secara serius untuk melanjutkan proyek ini.

Pertanyaan :

Apakah ada perbedaan perlakuan perbedaan terhadap orang yang yang pro dan kontra ?

Jawab :

Saya kira sampai saat ini tidak ada perbedaan yang dilakukan pemerintah dan tidak nampak dengan jelas justru akan sangat kontra produktif jika pemerintah melakukan perbedaan itu, oleh karena itu pemerintah cenderung mengambil posisi aman

Pertanyaan :

Belum ada indikasi pemerintah menurunkan aparat ?

Jawab :

Itu sifatnya diplomatik turun dalam konteks lain misalnya operasi Miras, apakah ada agenda lain dibalik itu kita tidak tahu. Keterlibatannya sejauh ini hanya menjaga agar tidak terjadi tindak kekerasan di Balong, misalnya kemarin ada satu guru yang mengintimidasi murid-muridnya, yang kemudian dilaporkan kepada orangtuanya yang memicu konflik horisontal. Termasuk juga propaganda mahasiswa gadungan, sehingga saling melapor ke polisi. Di sini masyarakat curiga karena polisi mengundang saksi-saksi dari pihak yang kontra saja.

Pertanyaan :

Peran serta NGO memberdayakan warga ?

Jawab :

Selama ini NGO ada diluar ring, mereka hanya mensupport dari luar belum masuk sampai kemasyarakat, ada beberapa seperti Walhi dan greenpeace. Bentuk partisipasi mereka hanya memberikan informasi dampak yang mungkin muncul baik dari politik ekonomi dan lingkungan. Yang selama ini tidak pernah didapatkan dari pemerintah. Mereka juga mengadakan demo-demo di kota bekerja sama dengan mahasiswa, buruh-buruh pabrik dan pengusaha.

Pertanyaan :

Seberapa efektif bantuan itu ?

Jawab :

Sejauh ini kita belum melihat dan mengukur tingkat efektifitasnya akan tetapi saya kira yang paling efektif adalah oendampingan yang dilakukan mahasiswa yang tinggal dan menetap di balong.

Pertanyaan :

Tahapan apa yang paling serius mendapatkan tanggapan dari warga ?

Jawab :

Selama ini ini belum ada sosialisasi sehingga kita tidak dapat mengetahui tahapanya. Yang paling mendapatkan tanggapan serius adalah pendirian kantor batan dibalong yang dilihat warga sebagai simbolisasi pendirian PLTN.

Pertanyaan :

Intesitas konflik dari awal mulainya konflik ini ?

Jawab :

Mulai dari tahun itu relatif konstan menyangkut kedatangan seorang atau momentum tertentu tapi pada prinsipnya semua bentuk konflik itu tidak saling mengurangi kualitas maupun kuantitas konfliknya.

Pertanyaan :

Tokoh atau elit lokal yang terlibat ?

Jawab :

Ada beberapa tokoh partai politik yang terlibat dari PKB dan PDIP tapi peranan mereka sejauh ini hanya memberikan suport saja

Pertanyaan :

Bagaimana kolaborasi antar lembaga yang anti PLTN ini ?

Jawab :

Ya beda-beda kami dari NU, kemudian dari PMB dan mahasiswa dalam Fosmad yang membentuk koalisi masyarakat dan mahasiswa anti PLTN. Ada yang koalisi BEM-Bem di berbagai kota seperti Semarang. Lalu marem yang merupakan kolaborasi antara individu-individu dan pengusaha. Judulnya semua tolak nuklir tapi kepentingannya berbeda. Karena berangkat dari kepentingan berbedanya maka seringkali tidak ada koordinasi gerakan dari berbagai kepentingan ini karena berangkat dari titik yang berbeda saya kira itu semua dinamika dalam masyarakat saja.

Pertanyaan :

Peran pemerintah selama ini ?

Jawab :

Saya kira hanya mengikuti standar operasional pegawai negeri saja.

Pertanyaan :

Rekomendasi untuk gus ?

Jawab :

Pemerintah harus lebih intensif berdialog dengan terbuka dan memperlihatkan keuntungan apa yang dapat diperoleh oleh warga sehingga warga dapat dengan legowo menerima PLTN.

## **Informan 2**

Pertanyaan :

Bagaimana bentuk konflik selama ini ?

Jawab :

Saya kira selama ini adalah perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra kemudian dalam bentuk demonstrasi awalnya ketika pendirian kantor batan di balong, ketika saya tanyakan pada petinggi desa beliau tidak tahu, dan saya kira

sampai sekarang tidak ada penjelasan secara resmi dari pihak batan isu yang kami dengar itu sebagai pusat penelitian tapi kok dimuali dengan ketidak jujuran. Kalau begini siapa yang bisa dipercaya.

Pertanyaan :

Apakah pernah ada sosialisasi dari pemerintah ?

Jawab :

Tidak pernah ada sosialisasi, bahkan kami tercengang ketika sony keraf pada saat aksi bulan juli 2007 mengatakan bahwa sudah ada turun sudah 5 milyar untuk dana sosialisasi penderian PLTN. Tidak pernah ada sosialisasi kalau ada saya juga heran kalau pihak Batan mengatakan sudah mengadakan sosialisasi itu dilakukan dimana ?

Pertanyaan :

Apakah ada perbedaan sikap pemerintah dalam memperlakukan warga negara ?

Jawab

Belum ada perbedaan sikap pemerintah, hanya ada upaya untuk mendirikan lembaga yang memfasilitasi keinginan pemerintah untuk mendirikan PLTN walaupun forum ini tidak sempat terbentuk.

Pertanyaan :

Apakah PLTN mengeruk Sumber daya Alam ?

Jawab :

Yang jelas pertama sosial ekonmi masyarakat akan terganggu, seperti petani, peternak, dan yang kerja di PTPN sebagai buruh mereka akan bekerja dimina ? belum lagi disitu ada situs-situs sejarah yaitu makam syekh sitti jenar, kita akan sukar menjelaskan pada generasi yang akan datang tentang peninggalan sejarah ini. Dan beberapa persoalan nasional yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah seperti kasus lapindo selanjutnya meledaknya serpong. Apakah dengan kemampuan yang seperti ini indonesia dapat menjamin aman dalam mengelola teknologi tingkat tinggi ? . apakah negara dapat mengatasi apabila terjadi kecelakaan dan radiasi.

Pertanyaan :

Bagaimana dengan NGO yang membantu ?

Jawab :

Saya kira yang lain memberikan support dengan melakukan sharing pengetahuan saja, tapi untuk membangun strategi gerakan bersama-sama kami tidak kami lakukan, tidak ada keterkaitan dengan masyarakat di Balong, saya kira teman-teman mahasiswa yang ada di grass root, kami hanya melakukan kegiatan sesuai kemampuan kami. Hanya pernah melakukan pemberdayaan beberapa kali.

Pertanyaan :

Apakah ada kelompok yang pro sudah membentuk forum tertentu ?

Jawab :

Sudah yaitu forum lemah abang tapi saya kira sudah banyak yang mundur terutama mereka yang berada dib along.

Pertanyaan :  
Harapan mas ?  
Jawab :

Ya PLTN jangan di bangun, pemerintah berpikir ulang dan lebih arif dan untuk mengatasi krisis energi ini pemerintah mencari sumber-sumber energi yang lain.

#### **Informan 4**

Pertanyaan :  
Pernah ada konflik fisik pada kasus ini ?

Jawab :  
Pernah ada yang merasa terancam saja, ketika muncul dikoran warga terprovokasi sehingga mengancam akan melakukan kekerasan kepada orang-orang yang pro PLTN

Pertanyaan :  
Bentuknya konfliknya selama ini ?

Jawab :  
Selama ini hanya ada demo-demo saya kira yang paling besar itu dilaksanakan pada tanggal 1 september 2007 dan selama ini sifatnya kontinu tapi tidak melibatkan massa yang besar karena kalau melibatkan massa yang besar akan cenderung mengganggu kehidupan ekonomi warga

Pertanyaan :  
Apakah perubahan sikap akibat reformasi ?

Jawab :  
Karena PLTN keputusannya dipusat maka pemerintah daerah sifatnya menunggu keputusan pusat termasuk DPRD,

Pertanyaan :  
Apakah ada perbedaan sikap antara yang pro dan kontra ?

Jawab :  
Saya kira sampai saat ini tidak ada semuanya diperlakukan sama, tapi belum jelas juga kategorisasinya yang mana PLTN kita hanya tahu ketika mereka sudah menyuarakanya.

Pertanyaan :  
Apakah merusak lingkungan produktif warga ?

Jawab :  
Saya kira iya karena cukup luas yang akan diambil oleh lokasi tapak PLTN, termasuk ada makam yang menjadi situs peninggalan nenek moyang yang ada dilokasi tapak.

Pertanyaan :  
Keterlibatan LSM-LSM dalam konflik ini ?

Jawab :

Mereka ikut menyuarakan PLTN diluar balong dalam berbagi dalam aksi diluar balong seperti dikudus pati dan semarang, dan memberikan informasi serta pengetahuan terkait PLTN. Untuk dukungan dana saya kira belum ada selama ini dukungan moral.

Pertanyaan :

Bagaimana sikap pemerintah daerah sendiri ?

Jawab :

Saya kira sampai saat ini sifatnya menunggu saya tahu persis mereka pada saat rapat muspida saya mewakili DPRD karena belum ada ketegasan sikap dari pemerintah pusat.

Pertanyaan :

Apakah ada peranan perusahaan dalam penolakan PLTN ini ?

Jawab :

Setahu saya akan perusahaan-perusahaan sekitar muria seperti kudus dan pati kalau untuk jepara karena dekat daerah tapak, tapi isu yang paling menggagu adalah image perusahaan jelek terhadap sentimen pasar karena akan terkena radiasi.

Pertanyaan :

Apakah ada kesan ada provokator ?

Jawab :

Ada kegiatan selalu ada yang menggerakkan, kita sukar mengidentifikasi siapa dan kepentinganya apa saya kira kurang untuk di identifikasi.

Pertanyaan :

Peran pemerintah ini sendiri ?

Jawab :

Peran pemerintah daerah sendiri sampai saat ini masih menunggu karena ini proyek pusat dana sosialisasinya juga dari pusat sejauh ini belum ada dari APBD yang digunakan untuk dana sosialisasi. Yang ada selama ini karena pemerintah tidak punya sikap sebagai akibatnya masyarakat hanya menerima sosialisasi dari pihak yang kontra dan tidak berimbang.

Pertanyaan :

PKB kenapa menolak ?

Jawab :

Saya kira sumber daya manusia kita untuk mengelola PLTN ini belum memadai, mengelola kereta api yang kecepatannya 80 km perjam masih seing kecelakaan.

Pertanyaan :

Rekomendasi bapak ?

Jawab :

Kalau tetap harus dilaksanakan maka perlu dicari tempat yang tidak padat penduduknya. Sosialisasi harus dilakukan kepada para tokoh yang paham nanti para tokoh ini yang akan memberikan pengertian pada masyarakat, kalau datanya dari pemerintah maka warga apatis karena ini menyangkut anggaran besar. Lalu

pemerintah harus memberikan jaminan kepastian kalau terjadi kecelakaan nuklir harus jelas siapa pemiliknya, siapa yang bertanggung jawab dan skemanya harus jelas kalau perlu dibuat dalam peraturan pemerintah atau undang-undang.

**Informan 5**

Pertanyaan :

Sudah ada kekerasan yang terjadi ?

Jawab :

Belum ada kekerasan fisik tapi, kalau phiskis sudah ada berupa ancaman.

Pertanyaan :

Bentuk-bentuk Konflik ?

Jawab :

Ya berupa unjuk rasa dan demonstrasi yang kumpulkan dari berbagai elemen, karena kami sudah lelah dengan berkirim surat tapi tidak ditanggapi

Pertanyaan :

Bagaimana sejarah PLTN ?

Jawab :

Sebenarnya di balong ini mulai tahun 1986 tapi bersama dengan itu muncul kecelakaan chernobyl. Dan lalu dilanjutkan dengan tahun 2006 tapi krisis moneter 1997 maka mulailah lagi direncanakan lagi sekarang dan kita sendiri melihat ada resistensi dari masyarakat

Pertanyaan :

Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ?

Jawab :

Pertamkali pemerintah melakukan sosialisasi kepada aparat kabupaten dan kecamatan, perguruan tinggi sedangkan kami sosialisasi dimasyarakat, baik plus maupun minusnya tapi kalau pemerintah hanya memberitahukan plusnya dan kurang transparan. Sebenarnya ilmunya sama tentang nuklir kami bukan yang anti nuklir untuk perdamaian tapi ini soal kejujuran ilmu pengetahuan.

Pertanyaan :

Apakah ada pengaruh perubahan politik ?

Jawab :

Sebenarnya konflik yang terjadi pertama adalah konflik internal dalam pemerintahan, kelompok menristek, kelompok ESDM, kelompok SBY dan kelompok Kalla. Di negeri ini kan bukan rahasia lagi kalau tiap proyek begini menyangkut komisi dan prestise untuk kekuasaan

Pertanyaan :

Tahapan-tahapan konflik mencapai eskalasi yang serius sejak kapan ?

Jawab :

Ketika batan masuk membangun kantor riset, masyarakat bertanya tapi tidak ditanggapi, malah memasukan alat berat segala, ini membuat masyarakat tersinggung karena tempatnya mau diaduk-aduk kok nggak pake permissi, sampai saat ini rasanya belum ada pihak batan yang melakukan sosialisasi.

## **Informan 6**

Pertanyaan :

Bagaimana biasanya ide aksi ?

Jawab :

Idenya dari pembicaraan yang menggelinding, aksi itu muncul kalau ada momentum misalnya peringatan kecelakaan chernobyl. Dan kedatangan ketua Batan.

Pertanyaan :

Pernah ada kekerasan Fisik terjadi Balong ?

Jawab :

Pernah ada kekerasan antar warga, ketika ada orang pro membagi-bagikan uang 50 ribu rupiah yang kita tidak tahu dari mana asalnya yang jelas katanya untuk mereka yang mau menerima PL TN. Sehingga orang-orang kontra terprovokasi dan melakukan pemukulan yang dipukul perempuan. Tapi yang paling sering adalah kekerasan fisik terjadi dan kita sudah melporkan ke Balong. Apakah ini dinamika dalam masyarakat dan atau oleh negara, saya kira negara punya andil kalau konteksnya HAM karena negara tidak melakukan antisipasi untuk mencegah kekerasan terjadi.

Pertanyaan

Apakah ada peran perubahan politik pada kasus ini?

Jawab

Siapa yang berani melawan soeharto, yang kedua soal memberi artikulasi pada media sehingga di Blow up habis-habisan. Ini soal strategi gerakan saja.

Pertanyaan :

Keterlibatan aparat ?

Jawab :

Muspida saya kira tidak secara serius melibatkan aparat seperti polres maupun kodam, intel-2 kodim yang selama ini komunikasi terjalin denan baik. Pada saat diskusi mereka nanya ke saya masa nggak bisa diterima. Bisa kata saya boleh diterima kalau pemerintah mau jujur bahwa PLTN ini adalah proyek Militer.infiltrasinya lewat pembentukan forum lemah abang.

Pertanyaan :

Apa yang menjadi kepentingan paling serius teman-teman Mahasiswa Di Balong ?

Jawab

Terus terang kami meyakini bahwa PLTN ini bukan hanya sekedar listrik dan energi, lebih dari itu adalah ini soal militer dan bisnis lintas negara. Jadi agenda kami adalah menentang agenda neoliberalisme, yang begitu menggurita di dunia ketiga.

Pertanyaan

Bagaimana dengan isu provokasi ?

Kalau kau lihat jalan kaki dari balong ke jepara sejauh 37 km wah liar bisa anak-anak , perempuan sama-sama. Saya berpikir apakah ini benar hanya soal kelihaihan

mahasiswa atau LSM berpropaganda. Saya kira akar perjuangan ini sudah cukup lama. Itulah yang bisa membuat hal itu dan emosi itu bisa terkumpul.

#### **Informan 7**

Pertanyaan :

Apakah batan tidak pernah melakukan sosialisasi ?

Jawab :

Batan sudah pernah melakukan sosialisasi diantaranya seminar, lokakarya, dan pembagian benih padi, bibit ternak hasil teknologi nuklir, kami sudah melakukan sosialisasi boleh ditanya kepada petinggi desa, atau pada saat 17-an kami memberikan bantuan.

Pertanyaan :

Berdirinya kantor batan tidak ada sosialisasi dengan warga ?

Jawab :

Kalau mengenai sosialisasi itu yang seperti apa kami lakukan pertemuan dengan warga, nanti situasinya memanas setelah masuknya orang luar yang mengaku mahasiswa. Dan lembaga yang belakangan muncul pimpinan pak medi

Pertanyaan

Konflik yang muncul bentuknya seperti apa ?

Jawab :

Mereka bersama mahasiswa berkampanye negatif tentang PLTN, sementara kami tidak berusaha memberikan umpan balik, jadi ini sifatnya searah. Kemudian mereka bertemu dengan Walhi, dan greenpeace.

Pertanyaan :

Disini letak persoalannya warga merasa belum pernah ada sosialisasi sementara batan merasa sudah ada sosialisasi ?

jawab :

Batan itu adalah lembaga negara yang bersifat teknis dengan pengembangan iptek dan nuklir, kami menjadi sulit jika bertemu dengan UU yang lain seperti APBN, kami tidak punya akses kesana. Kami ingin melakukan banyak sosialisasi tapi kami tidak sampai wewenangannya, Batan itu hanya supporting unit. Untuk kebijakan ada di menristek atau ESDM, kami bukan BUMN yang bisa menggerakkan semua instrument.

Pertanyaan :

Apa bapak melihat indikasi adanya keterlibatan pengusaha dalam konflik ini ?

Jawab :

Ya kami melihat dalam pengurus Marem kami melihat beberapa pejabat jarum kudu yang ada disitu. Ada beberapa pengusaha jenang kudu yang masuk disitu kalau membuka semua file suara merdeka saya kira kelihatan.

## **Informan 8**

Pertanyaan :

Konflik fisik dalam kasus ini pernah terjadi ?

Jawab :

Belum pernah terjadi, kalau saling mengancam itu sering terjadi ditingkat masyarakat dan saling mengintai.

Pertanyaan :

Bagaimana sikap pemerintah ?

Jawab :

Kalau bupati tidak pernah menyatakan apakah menerima atau menolak, karena ini proyek pusat selama ini yang dilakukan hanya mencegah agar tidak terjadi konflik horisontal yang terjadi antara yang pro dan kontra. Termasuk pemerintah kecamatan dan desa hanya menunggu saja.

Pertanyaan :

LSM yang membantu ?

Jawab :

Selama ini LSM yang membantu dari yang kontra PLTN, seperti marem sedangkan yang pro tidak berani memperlihatkan diri. Biasanya mereka hanya memberikan bantuan moril pada saat ada kegiatan

Pertanyaan :

Dinamika konfliknya seperti apa

Jawab :

Konflik akan meningkat bila ada rencana kunjungan dari pejabat-pejabat pusat, atau peringatan hari-hari tertentu. Misalnya chernobil atau UU ketenaganukliran.

Pertanyaan :

Harapan pak mahmud ?

Jawab :

Sebetulnya kami sebagai aparat hanya menunggu petunjuk dari pusat saja , karena ini proyek pusat dan sebaiknya ada ketegasan yang cepat dari pemerintah pusat.

## **Informan 9**

Pertanyaan :

Siapa yang paling keras menolak PLTN ?

Jawab :

Saya pikir hampir elemen yang selama ini kontra yang membentuk kaukus untuk menolak PLTN ini. Bentuknya dalam demo massa dan unjuk rasa

Pertanyaan :

Tuntutan yang paling mendasar

Jawab :

Adalah takut keboroan nuklir karena dianggap belum siap, mungkin kurang perhatiannya papa saat sosialisai kemudian di DPR sendiri sebetulnya sudah ada sosialisasi

Pertanyaan :

Apakah ada isu merusak SDA ?

Jawab

Tuntutan warga disana ya seperti itu tapi kalau kita melihat saya kira tidak ada masalah dengan hal itu.

Pertanyaan

Langkah penyelesaian konflik ini

Jawab :

Memberikan pengertian pada masyarakat baik yang pro maupun yang kontra untuk, kami dari dewan sementara ini bersikap netral.

### **Informab I10**

Pertanyaan :

Menurut bapak dimana letak utama munculnya konflik ini ?

Jawab :

Saya kira pada prinsipnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah secara umum yang relatif rendah.

Pertanyaan ?

Kesulitan pemerintah dalam kasus ini ?

Jawab

Memang agak sulit menjelaskan mekasma dan cara kerja teknologi tinggi seperti ini termasuk sistem keamanannya kepada masyarakat awam. Sehingga ada kendala sosialisasi disitu.